

2017

Balai Wilayah Sungai Sumatera VII

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



LAPORAN

RIVER BASIN ORGANIZATION
BALAI WILAYAH SUNGAI
SUMATERA VII

R B O - 2017

2017

Balai Wilayah Sungai Sumatera VII

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



LAPORAN

RIVER BASIN ORGANIZATION
BALAI WILAYAH SUNGAI
SUMATERA VII

R B O - 2017



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GEDUNG DAN MUSHALLA AS-SALAM
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII

DIRESMIKAN OLEH
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

M. Hasan

DR. Ir. MOHAMAD HASAN, Dipl. HE
BENGKULU, APRIL 2014

BAB 1

1.1 Latar Belakang

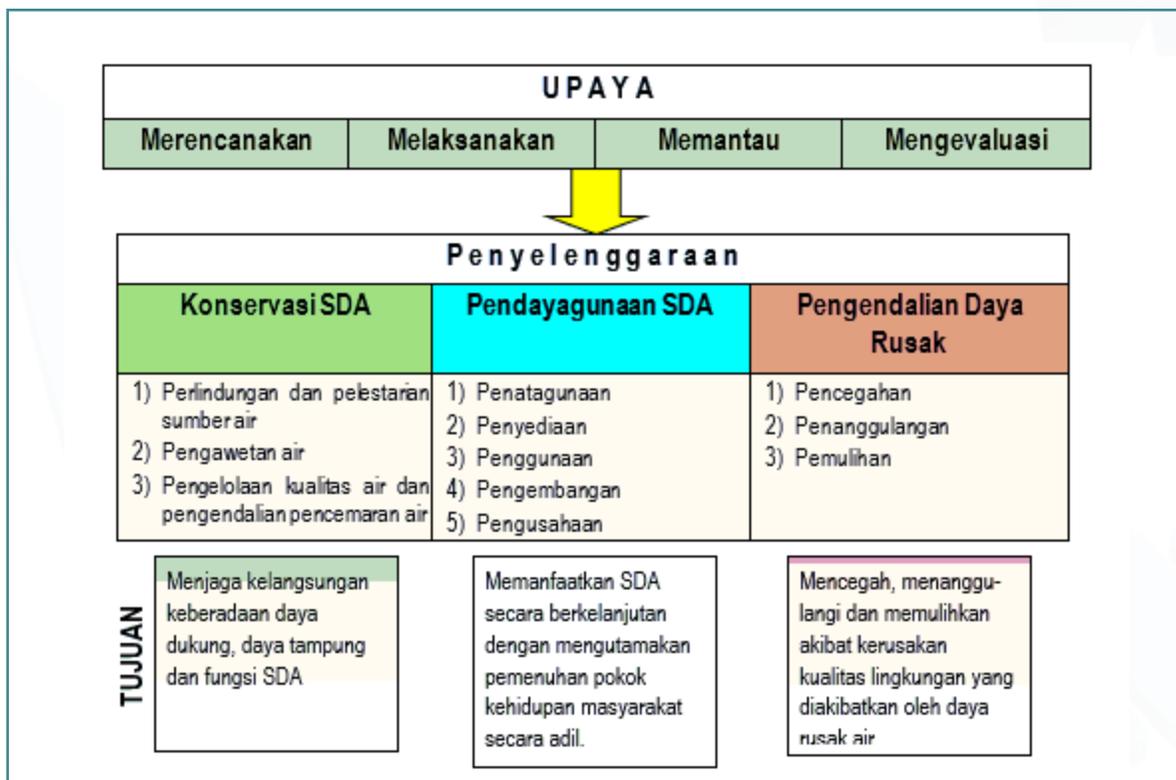
Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di Indonesia menghadapi persoalan yang sangat kompleks dengan melibatkan semua pihak baik pengguna, pemakai, maupun pengelola dari tahun ke tahun. Mengingat disamping air mempunyai beberapa fungsi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang masing-masing dapat saling bertentangan, juga interaksi ruang yang terbatas dan tidak terbarukan memunculkan dimensi persoalan baru yaitu pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) yang semakin meningkat untuk berbagai keperluan dan pemanfaatan ruang untuk kehidupan manusia. Padahal di lain pihak ketersediaan SDA semakin terbatas bahkan cenderung semakin langka, terutama akibat penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk oleh limbah bahan berbahaya beracun (B3), sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan masyarakat menjadi rusak. Pencemaran pada sumber-sumber air tersebut akan menjadi beban social yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Terjadinya perubahan iklim global, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pengembangan aktivitasnya serta intensitas kegiatan ekonomi, telah membuat perubahan pada sumberdaya alam yang sangat cepat.

Pembukaan lahan guna keperluan perluasan daerah pertanian, perkebunan, pemukiman dan industri yang tidak mengindahkan peraturan, juga tidak terkoordinasi dengan baik dalam suatu kerangka pengembangan tata ruang, telah mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, erosi, tanah longsor, banjir serta ditambah lagi dengan perkembangan kawasan perkotaan yang sangat pesat. Apabila hal seperti ini tidak diantisipasi, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik antara para pemakai air akibat terjadinya benturan kepentingan antara lain adanya kepentingan rumah tangga, pertanian dan industri, termasuk penggunaan air permukaan dan air bawah tanah di perkotaan.

Hal ini semakin sulit manakala permintaan (demand) tidak lagi seimbang dengan ketersediaan SDA untuk pemenuhannya (supply). Oleh karena itu perlu upaya secara proporsional dan seimbang antara pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan SDA baik dilihat dari aspek teknis maupun dari aspek legal. Untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat di berbagai keperluan, tidak dapat dihindari lagi bahwa perlunya upaya bersama untuk mewujudkan perencanaan pengelolaan SDA yang terpadu/ Integrated Water Resources Management (IWRM) yang berbasis wilayah sungai guna menentukan langkah dan tindakan yang harus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengoptimalkan potensi pengembangan SDA, melindungi/melestarikan serta meningkatkan nilai SDA dan lahan dan pengelolaannya didasarkan pada "one plan, one river basin, one integrated management" dimana merupakan satu-kesatuan pengelolaan dari hulu, tengah dan hilir.

PSDA Wilayah Sungai adalah merupakan suatu pendekatan holistik, yang merangkum aspek kuantitas dan kualitas air. Perencanaan tersebut merumuskan Pola PSDA yang di dalamnya berisi dokumen Rancangan Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, Pengendalian Daya Rusak Air di wilayah sungai.

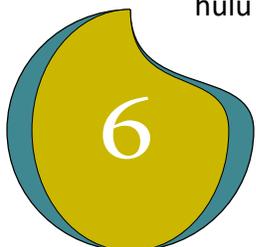
Gambar 1. Lingkup PSDA Menurut Pola PSDA Wilayah Sungai



Tahun 2012 telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pola Wilayah Sungai sebagai wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWS Sumatera VII), dengan Wilayah Sungai Terawang Muar 01.38.A2 yang terdiri dari 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi Provinsi Bengkulu dan Jambi serta Wilayah Sungai Nasal-Padang Guci 01.42.A2 yang terdiri atas 19 DAS yang meliputi Provinsi Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan sebagai Wilayah Sungai Lintas Provinsi. Untuk itu dibutuhkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam rangka PSDA yang handal dan profesional.

Wujud UPT yang menjadi kepanjangan tangan untuk menyelenggarakan PSDA yang menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini adalah BWS Sumatera VII beserta fungsi-fungsi yang melekat pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT), yaitu SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumatera VII Provinsi Bengkulu dan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera VII Provinsi Bengkulu.

BWS Sumatera VII sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada di Provinsi Bengkulu, yang bertugas mengelola SDA meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan dalam rangka Konservasi SDA yang berkelanjutan, Pendayagunaan SDA yang adil untuk pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kualitas dan kuantitas, Pengendalian Daya Rusak Air, Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan SDA, peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta Informasi dalam pembangunan SDA, Kelembagaan Pengelolaan SDA dari hulu sampai dengan hilir wilayah sungai secara menyeluruh, terintegrasi, berkesinambungan serta ber-



wawasan lingkungan ini, bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal SDA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BWS Sumatera VII merupakan River Basin Organization (RBO) yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan PSDA di wilayah sungai yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mengubah “mind set” dari orientasi pembangunan ke orientasi pelayanan dan berupaya kinerjanya berbasis hasil (output). Untuk itu dibutuhkan:

1. Dukungan/komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan;
2. Dukungan manajemen yang profesional;
3. Dukungan sumberdaya yang handal yaitu : sumberdaya manusia (SDM), sumber pendanaan, pengetahuan teknologi dan peralatan.

Untuk mengukur kinerja BWS Sumatera VII menggunakan alat/tool RBO Performance Benchmarking yang dikeluarkan oleh Networks of Asian River Basin Organization (NARBO) yang telah dilaksanakan oleh anggota NARBO di 14 negara di Asia. Kegiatan Performance Benchmarking ini telah dilaksanakan oleh BWS Sumatera VII dimulai tahun 2011 dengan upaya peningkatan kinerja berdasarkan Self Assessment (SA). Report of performance benchmarking yang telah dilakukan, dikaji ulang oleh Peer Review Team of Performance Benchmarking. Kegiatan performance benchmarking merupakan tolok ukur dalam DIPA atau rencana anggaran tahunan.



Gedung Balai Wilayah Sungai Sumatera VII

1.2 Struktur Organisasi

1.2.1 Visi, Misi dan Sasaran Strategis

A. VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi adalah suatu gambaran yang mencerminkan keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dengan memperhatikan lingkungan strategis serta mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada, BWS Sumatera VII mempunyai visi yang selaras dengan visi Direktorat Jenderal SDA, yaitu :

Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Memadai Sebagai Sarana Pendukung untuk
Mewujudkan Kemanfaatan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

Dengan demikian visi di atas terkandung makna bahwa SDA sebagai salah satu unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang harus dikelola secara berkelanjutan sehingga keberadaan dan fungsinya tetap terpelihara. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air harus dilaksanakan secara adil dan merata sehingga setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya secara memadai, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya maupun untuk meningkatkan ekonominya. Meskipun air merupakan SDA yang dapat diperbaharui namun bukan berarti keberadaannya tak terbatas. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan secara efisien dan efektif.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi maka diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. BWS Sumatera VII memiliki sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk dapat mewujudkan tugas pokok bidang SDA, Direktorat Jenderal SDA menetapkan misi yang terkait yaitu :

- a. Konservasi SDA;
- b. Pendayagunaan SDA (penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaannya).
- c. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air;

- d. Pembedayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah;
- e. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi SDA

C. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan pelaksanaan tugas pengelolaan bidang SDA oleh BWS Sumatera VII sebagai wujud pencapaian visi dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tertuang dalam Rancangan PSDA BWS Sumatera VII, yang meliputi :

- a. Meningkatkan kelembagaan dan rencana pengelolaan SDA;
- b. Meningkatkan pengelolaan SDA;
- c. Meningkatkan pemanfaatan SDA secara bersama, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- d. Melindungi dan melestarikan lingkungan;
- e. Meningkatkan pengelolaan bencana alam terhadap lingkungan;
- f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap PSDA;
- g. Meningkatkan pemanfaatan penggunaan data dan informasi PSDA

Sesuai dengan Rencana Strategis BWS Sumatera VII 2015–2019, tujuan yang hendak dicapai oleh BWS Sumatera VII adalah keberhasilan dalam pengelolaan bidang SDA. Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menetapkan tiga sasaran strategis :

- 1) Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa;
- 2) Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan;
- 3) Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir.

Sasaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuh Sasaran Strategis Balai WS Sumatera VII sesuai dengan Peta Strategi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yaitu :

1. Kelembagaan dan Perencanaan

- Mempunyai kerangka kerja organisasi yang efektif, bertanggung jawab dan bekerja secara kemitraan dengan seluruh stakeholders pada WS Sumatera VII baik yang berada pada DAS utama maupun bukan DAS utama;
- Mekanisme koordinasi PSDA WS yang efektif;
- Legalitas PSDA WS yang efektif secara menyeluruh dan terpadu;
- Merencanakan pola PSDA yang transparan, efektif dan menyeluruh serta sesuai dengan RT/RW Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi stakeholder;

- Mempunyai mekanisme perizinan yang efektif dalam rangka penggunaan air permukaan dan air tanah termasuk pembuangan air kotor;
- Pengelola/instansi PSDA harus menggunakan teknologi tepat guna, efektif dan berkelanjutan;
- Pembuat keputusan para tenaga ahli dan pemangku kepentingan dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan SDA termasuk kaji ulang dan prosedur pelaksanaan AMDAL.

2. Pengelolaan dan Pengembangan SDA

- Meningkatkan dan melestarikan sumber-sumber air yang ada untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi, industri, tenaga listrik dan lainnya;
- Mengusahakan pengadaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di WS Sumatera VII;
- Merencanakan kapasitas prasarana SDA sesuai dengan detail desain;
- Melakukan pelatihan PSDA terhadap seluruh prasarana SDA yang ada pada WS Sumatera VII.

3. Pendayagunaan Sumber Air

- Melakukan pendistribusian air yang adil dan merata antar daerah hulu, hilir dan perbatasan dengan DAS utama;
- Menetapkan hak guna air kepada setiap pengguna air yang berwenang;
- Mengantisipasi segala perselisihan/ konflik penggunaan sumber air WS dengan cepat dan adil.

4. Perlindungan Lingkungan

- Merencanakan tata guna secara lengkap dan detail dalam usaha mengurangi dampak aktifitas manusia terhadap lingkungan;
- Melindungi dan tidak mengurangi luas hutan yang ada;
- Reboisasi daerah tangkapan hujan yang prioritas (kawasan lindung) dan melaksanakan pelatihan pertanian pada lahan tepat guna (kawasan budidaya) untuk mengurangi erosi lahan.

5. Bencana banjir dan kekeringan

- Penyusunan rencana secara efisien dan efektif di dalam menanggulangi daya rusak bencana banjir dan akibat yang ditimbulkannya;
- Penanganan wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan secara cepat dan merata.

6. Pemberdayaan Masyarakat

- Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang penggunaan dan perlindungan SDA WS;
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat secara penuh dalam kegiatan perencanaan dan perawatan DAS;
- Mengikut sertakan masyarakat dalam mengatur pelayanan air dan pengelolaan daerah tangkapan air hujan.

7. Data dan Informasi

- Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang lengkap dan detail mengenai sumber air dan lahan potensial yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat yang membutuhkannya;
- Menggunakan metode partisipasi masyarakat dalam memverifikasikan data-data yang dapat dipergunakan;
- Menyusun dan mengelompokkan data-data untuk pemetaan WS;
- Menetapkan model dan operasional PSDA yang akurat;
- Menyusun program penelitian SDA.



1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 34/PRT/M/2015 tanggal 1 Juli 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BWS Sumatera VII merupakan Balai Tipe A yang terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha.
- b. Seksi Program dan Perencanaan Umum.
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- d. Seksi Pelaksanaan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 102 menyatakan bahwa;

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tata-laksana, penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, urusan kas dan pembendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga, serta melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses sertifikasi barang milik negara.
- 2) Seksi Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, penyusunan usulan program dan anggaran, pengelolaan SISDA dan komunikasi publik, analisis dan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber-sumber daya air, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis, serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan perencanaan umum.
- 3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, pengembangan, penyediaan bimbingan teknis, serta penerapan sistem manajemen mutu sarana dan prasarana jaringan sumber air dan pemanfaatan air, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- 4) Seksi Operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, perencanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan rekomendasi teknis, penyediaan bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan OP sarana dan prasarana SDA termasuk alokasi air, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi PSDA, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, serta pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS.

Tugas dan tanggung jawab Struktural BWS Sumatera VII adalah sebagai berikut:

1. Kepala Balai WS

a. Tugas:

1) Penyusunan pola dan rencana PSDA pada WS.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

2) Penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/ pengembangan SDA.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

3) Persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.
- 5) Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan SDA.
- Tahapan:
- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
 - b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
 - c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.
- 6) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS.
- Tahapan:
- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
 - b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
 - c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.
- 7) PSDA yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air pada WS.
- Tahapan:
- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
 - b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
 - c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.
- 8) Pengelolaan sistem hidrologi.
- Tahapan:
- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
 - b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
 - c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

9) Pengelolaan SISDA.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

10) Mengelola OP SDA pada WS.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

11) Membina pelaksanaan bimbingan teknis PSDA yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

12) Mengawasi pelaksanaan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan SDA pada WS.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

13) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi PSDA pada WS.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.
- d) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- e) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- f) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

14) Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam PSDA.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

15) Memimpin pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

- 16) Mengawasi pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

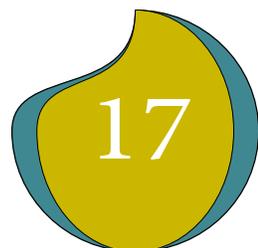
- 17) Memimpin pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta koordinasi dengan instansi terkait.

Tahapan:

- a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
- b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

b. Tanggung jawab:

- 1) Bertanggung jawab terhadap perencanaan meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak pada sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstruksi bidang SDA di BWS Sumatera VII meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak pada sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.
- 3) Bertanggungjawab terhadap OP SDA di BWS Sumatera VII meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur SDA akibat bencana alam.
- 4) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di BWS Sumatera VII.
- 5) Bertanggung jawab dalam pemberian bimbingan teknis bidang SDA di BWS Sumatera VII sesuai peraturan perundang-undangan (pembinaan hidrologi, perencanaan WS, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan aset SDA, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat).



- 6) Bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi bidang SDA di BWS Sumatera VII.
- 7) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi di BWS Sumatera VII.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. Tugas:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan rencana pengadaan pegawai

Tahapan:

- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
- b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
- c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

- 2) Melakukan kegiatan administrasi kepegawaian berdasarkan rencana kerja organisasi, pengangkatan, penugasan, mutasi, dan lain-lain.

Tahapan:

- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
- b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
- c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

- 3) Melakukan kegiatan administrasi data pegawai berdasarkan berkas data personalia, surat keputusan, perubahan status, dan lain-lain.

Tahapan:

- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
- b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
- c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

- 4) Melakukan kegiatan administrasi keuangan pegawai seperti penyusunan daftar gaji, TKK, uang makan, SPPJM, SPPD, SPM dan lain-lain.
- Tahapan:
- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

- 5) Melakukan kegiatan administrasi penegakan disiplin pegawai

Tahapan:

- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
- b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
- c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

- 6) Melakukan kegiatan administrasi jabatan struktural

Tahapan:

- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
- b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
- c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

- 7) Melakukan kegiatan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian

Tahapan:

- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
- b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

- c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- b. Tanggung jawab:
 - 1) Kelancaran dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas Subbagian.
 - 2) Terbinanya prestasi, kedisiplinan, tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas bawahan.
 - 3) Terarahnya pelaksanaan tugas-tugas Subbagian sesuai rencana dan program kerja Balai.
 - 4) Terbinanya koordinasi dan hubungan kerja yang harmonis dengan unit-unit kerja lingkup Balai.
 - 5) Teragendanya surat-surat masuk dan keluar, kerapian dan keamanan surat, naskah, dokumen serta terdistribusikan surat-surat dari atasan kepada unit-unit kerja lingkup Balai dengan baik.
- 3. Kepala Seksi Program dan Perencanaan Umum
 - a. Tugas:
 - 1) Penyusunan pola dan rencana PSDA pada wilayah Balai WS.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
 - 2) Pelaksanaan evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan PSDA pada WS.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

- c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- 3) Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
 - 4) Penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
 - 5) Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
 - 6) Penyiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.

- b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- 7) Pengelolaan SISDA dan komunikasi publik.
- Tahapan:
- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- 8) Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum.
- Tahapan:
- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- 9) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan program dan perencanaan umum.
- Tahapan:
- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

- b. Tanggung jawab:
 - 1) Bertanggung jawab terhadap pembuatan pola dan rencana PSDA pada WS.
 - 2) Bertanggung jawab terlaksananya evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan PSDA pada WS.
 - 3) Bertanggung jawab terlaksananya analisa mengenai dampak lingkungan.
 - 4) Bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS.
 - 5) Bertanggung jawab atas usulan program kegiatan dan anggaran.
 - 6) Bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa.
 - 7) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan SISDA dan komunikasi publik.
 - 8) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum.

4. Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan

- a. Tugas:
 - 1) Melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
 - 2) Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

- c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- 3) Melakukan penyiapan rekomendasi teknis dalam penyelenggaraan OP sarana dan prasarana SDA.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- 4) Melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- 5) Melakukan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi PSDA.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- 6) Melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.

- b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- 7) Melaksanakan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS.

Tahapan:

- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- b. Tanggung jawab:
- 1) Bertanggung jawab pengumpulan data yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
 - 2) Bertanggungjawab dalam penerapan sistem manajemen mutu.
 - 3) Bertanggungjawab dalam penyiapan rekomendasi teknis.
 - 4) Bertanggungjawab atas pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini.
 - 5) Bertanggungjawab dalam memberikan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi PSDA.
 - 6) Bertanggungjawab dalam penanggulangan kerusakan akibat bencana.
 - 7) Bertanggungjawab dalam pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS.
 - 8) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana.

5. Kepala Seksi Pelaksanaan

penyiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, pengembangan, penyediaan bimbingan teknis, serta penerapan sistem manajemen mutu sarana dan prasarana jaringan sumber air dan pemanfaatan air, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- a. Tugas:
- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
 - 2) Perencanaan teknis, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan .
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
 - 3) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air, yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk, bendungan, dan tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang mencakup air baku, air tanah, irigasi, rawa dan tambak.
Tahapan:
 - a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

- 4) pengembangan, penyediaan bimbingan teknis, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana SDA, yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk, bendungan, dan tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang mencakup air baku, air tanah, irigasi, rawa dan tambak.

Tahapan:

- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
 - b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
 - c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
- 5) Penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Tahapan:

- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme pelaksanaannya.
- b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahannya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
- c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

b. Tanggung jawab:

- 1) Bertanggung jawab terhadap kesiapan bahan pelaksanaan jaringan sumber air, yang mencakup pelaksanaan perencanaan teknis, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air, yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk, bendungan, dan tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang mencakup air baku, air tanah, irigasi, rawa dan tambak.
- 2) Bertanggung jawab terhadap kesiapan bahan pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana SDA, yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk, bendungan, dan tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang mencakup air baku, air tanah, irigasi, rawa dan tambak.

- 3) Dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana SDA, yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk, bendungan, dan tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang mencakup air baku, air tanah, irigasi, rawa dan tambak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Sendiri bahwa Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas dan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan Kementerian sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan. Pejabat inti Satker/ Pejabat Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Kasatker/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang;
- b. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
- e. Bendahara Penerimaan;
- f. Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Lampiran 3.a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 Tanggal 14 November 2011 Tentang Ketentuan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum bahwa tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) adalah sebagai berikut :

1. Atasan Kepala SNVT
 - a. Tugas:
 - 1) Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Kepala SNVT, terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
 - 2) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Pembantu Atasan dan Atasan Langsung Kepala SNVT untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satker.
 - 3) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Kordinator Wilayah untuk koordinasi pelaksanaan tugas SNVT melalui Atasan Langsung/ Pelaksana Program.
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah koordinasinya kepada Menteri dalam rangka mencapai tujuan Rencana Renstra Kementerian.
 - 5) Menetapkan struktur organisasi SNVT.

- b. Tanggungjawab:
 - 1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan umum tugas Kasatker.
 - 2) Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra Kementerian dan menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan dalam Renstra.
 - 3) Bertanggungjawab atas penyusunan program yang mengacu kepada Renstra dalam rangka mewujudkan rencana outcome.
 - 4) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
 - 5) Bertanggungjawab atas keberhasilan kinerja Satker.

2. Kepala SNVT

- a. Tugas:
 - 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
 - 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU net.
 - 3) Menetapkan Pejabat Pengadaan.
 - 4) Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 5) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak.
 - 6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA.
 - 7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
 - 9) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/ jasa dan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
 - 10) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I.

- 11) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/ Tim Ahli untuk pelaksanaan apabila perlu.
 - 12) Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
 - 13) Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
 - 14) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan.
 - 15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker yang dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsungnya.
 - 16) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM.
 - 17) Menandatangani Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak (dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
 - 18) Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 19) Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 20) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ lembaga (RKA-K/L) untuk tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab:
- 1) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/ rencana kerja yang tertuang dalam DIPA.
 - 2) Bertanggungjawab atas semua penerimaan/ pengeluaran Satker yang membebani APBN.
 - 3) Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/ SPK/ Kontrak tersebut. (Dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
 - 4) Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan.

- 5) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/ Kekayaan Negara Satker.
- 6) Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang di alokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/ Atasan Langsung/ Penanggungjawab Program.

3. Pejabat Pembuat Komitmen

- a. Tugas:
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi: Spesifikasi teknis Barang/ Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Kontrak.
 - 2) Menertibkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa.
 - 3) Menandatangani Kontrak/ Surat Perintah Kerja.
 - 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa.
 - 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
 - 6) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker.
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan.
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan termasuk anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap triwulan.
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
 - 10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket pekerjaan, dan/ atau jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan.
 - 11) Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, apabila diperlukan.
 - 12) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Anwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan.
 - 13) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 14) Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa.
 - 15) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Kasatker.

- 16) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
 - 17) Menandatangani pakta integritas.
 - 18) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA.
 - 19) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan dinas).
 - 20) Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/ jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola.
 - 21) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang.
 - 22) Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satker, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun yang swakelola.
 - 23) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya atas persetujuan Kasatker dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
 - 24) Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan.
 - 25) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker.
 - 26) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab:
- 1) Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/ SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya.
 - 2) Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/ output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA.
 - 3) Bertanggungjawab kepada Kasatker.

4. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
 - a. Tugas:
 - 1) Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 - 2) Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
 - 3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
 - 5) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, No. Rekening dan nama Bank).
 - b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/ atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenan).
 - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kadaluwarsa).
 - 6) Memeriksa pencapaian tujuan dan / atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/ atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - 7) Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 dengan ketentuan;
 - a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar.
 - b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
 - c) Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Akuntansi/ Verifikasi Keuangan.
 - d) Lembar kelima disampaikan pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Pembuat Komitmen.

- e) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - 8) Menyampaikan SPM yang telah ditandatangani ke KPPN setempat.
 - 9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala SNVT selaku Atasan Langsung.
- b. Tanggung jawab:
- 1) Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan pengeluaran.
 - 2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

5. Bendahara Pengeluaran

- a. Tugas:
- 1) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan SNVT pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran.
 - 2) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
 - 3) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
 - 4) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara.
 - 5) Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara.
 - 6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran.
 - 7) Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan meliputi kesesuaian atas persetujuan Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja SNVT untuk Belanja Barang (52); Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honorarium, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, penerbitan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; dan Belanja lain-lain (58), dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

haraan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke pada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas.

- 8) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/ pejabat Yang ditunjuk apabila persyaratakan pembayaran tidak terpenuhi.
 - 9) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing Instansi yang terkait.
 - 10) Menyelenggarakan tata kedisiplinan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.
 - 11) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada:
 - KPPN setempat
 - BPK RI
 - Menteri Pekerjaan Umum
- b. Tanggung jawab:
- 1) Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan.
 - 2) Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara.
 - 3) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

6. Penanggungjawab Unit Akuntansi SNVT

1. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
 - a. Tugas:
 - 1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca SNVT sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - 2) Menyampaikan LRA dan neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
 - 3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) beserta Arsip Data Komputer 9ADK) secara tepat waktu.

- b. Tanggung Jawab:
 - 1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
 - 2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

- 2. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
 - a. Tugas:
 - 1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satker sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - 2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu.
 - 3) Menyampaikan laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer.

- b. Tanggung jawab:
 - 1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
 - 2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

7. Petugas e-Monitoring SNVT

- a. Tugas:
 - 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a) Rekaman DIPA dan POK yang telah di sahkan.
 - b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan).
 - d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja.
 - e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.

- 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e-Monitoring on-line.
 - 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line.
 - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan secara periodik sesuai ketentuan.
 - 5) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai ketentuan.
- b. Tanggung jawab:
- 1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan kegiatan (back-up data maupun cetakan).
 - 2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Wilayah Sungai Sumatera VII di dukung oleh 222 orang pegawai dan 99 orang tenaga penunjang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS Pusat : 167 orang
- PNS Daerah : 55 orang
- Non PNS : 99 orang
- Total : 321 orang**

Berdasarkan Jenis Kelamin pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dapat di rinci sebagai berikut :

- Laki-laki : 254 orang
- Perempuan : 67 orang
- Total : 321 orang**

Berdasarkan klasifikasi Golongan dapat dirinci sebagai berikut :

- Golongan IV/Pembina : 4 orang
- Golongan III/Penata : 161 orang
- Golongan II/Pengatur : 144 orang
- Golongan I/Juru : 12 orang
- Total : 321 orang**

Balai Wilayah Sungai Sumatera VII di dukung oleh SDM yang berlatar belakang Engineer dan non-engineer dengan komposisi sebagai berikut :

- Engineer : 101 orang
- Non Engineer : 220 orang
- Total : 321 orang**



Pelaksanaan Salah satu kegiatan Sosialisasi di BWS Sumatera VII

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3,1 Maksud

Maksud Kegiatan ini adalah sebagai upaya meningkatkan secara bertahap kinerja BWS Sumatera VII yaitu :

- a. Pendayagunaan SDA agar dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi SDA secara berkelanjutan.
- b. Terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi SDA;
- c. Tercapainya sebesar-besar kemanfaatan SDA secara efektif dan efisien;
- d. Terwujudnya keserasian antar berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
- e. Terlindungnya hak setiap warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk ber peran dan menikmati hasil pengelolaan SDA; dan
- f. Terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan SDA.

1.3,2 Tujuan

Tujuan Kegiatan adalah terwujudnya pelayanan PSDA yang handal oleh BWS Sumatera VII yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam pemenuhan kebutuhan SDA bagi semua pemanfaat di wilayah sungai dengan memperhatikan lingkungan hidup, keberadaan hukum adat masyarakat setempat, sifat alamiah karakteristik air untuk generasi saat ini dalam jangka waktu 20 tahun mendatang. Untuk mengetahui Status BWS Sumatera VII, diadakan SA berdasarkan indikator RBO Performance Benchmarking.

1.3,3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh BWS Sumatera VII melalui kegiatan ini adalah :

- a. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam konservasi SDA di Wilayah Sungai Terawang Muar dan Nasal Padang Guci.
- b. Memberikan arahan tentang kebijakan pendayagunaan SDA di Wilayah Sungai Terawang Muar dan Nasal-Padang Guci dengan memperhatikan kebijakan daerah, termasuk arahan dalam pe nataan ruang wilayah;
- c. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam pengendalian daya rusak air di Wilayah Sungai Terawang Muar dan Nasal-Padang Guci;
- d. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) di Wilayah Sungai Terawang Muar dan Nasal-Padang Guci;
- e. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam peran serta masyarakat dan swasta dalam PSDA Wilayah Sungai Terawang Muar dan Nasal-Padang Guci

1.4 Isu-isu Strategis

Mengingat pengelolaan SDA merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan semua pihak sebagai pengguna, pemanfaat maupun pengelola, maka pengelolaan SDA di wilayah sungai perlu dilakukan secara terpadu dan dilaksanakan secara holistik yang melibatkan seluruh stakeholders SDA di wilayah sungai. PSDA di Wilayah Sungai Terawang Muar dan Nasal Padang-Guci sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh isu-isu strategis yang terjadi, baik isu strategis nasional maupun isu strategis lokal.

1.4.1 Isu Strategis Nasional WS Terawang Muar

a. Millennium Development Goals (MDG's)

Dalam pergaulan masyarakat internasional, Indonesia terikat pada kesepakatan Millenium Development Goals dan Johannesburg Summit 2002 yang menargetkan agar jumlah penduduk yang belum mendapat layanan air bersih dan sanitasi pada Tahun 2000, berkurang hingga separuh pada Tahun 2015. Sementara itu, tingkat layanan terhadap kebutuhan air bersih dan sanitasi pada saat ini masih rendah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh perkotaan, pedesaan, pulau-pulau kecil dan kawasan pantai, merupakan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Perlunya peningkatan layanan air bersih dan sanitasi di beberapa daerah perkotaan, pedesaan dan kawasan pantai di Wilayah Sungai Terawang Muar.

b. Ketahanan Pangan

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengembangan daerah irigasi yang berada di kabupaten Mukomuko, yang meliputi 46 Daerah Irigasi dengan skala irigasi kecil/ sederhana sampai besar.

c. Ketersediaan Energi

Dalam rangka mendukung kebutuhan energi nasional, memungkinkan dikembangkannya potensi tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik:

1. Kabupaten Mukomuko, terdapat potensi energi air yang dapat dikembangkan menjadi PLTMH : Air Rami (77,62 KW), Air Ipuh (115,34 KW), Air Terawang (77,62 KW), Air Pandan (10KW), Air Selagan (441,98 KW), Air Manjuto 234 KW).
2. Kabupaten Merangin, terdapat potensi energi air yang dapat dikembangkan menjadi PLTA seperti di Kecamatan Jangkat, Sungai Batang Langkup.

d. Perubahan Iklim Global

Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi (termasuk ekosistem di daerah Arktika dan Antartika), lokasi yang tinggi serta ekosistem- ekosistem pantai. Jumlah curah hujan melebihi dari jumlah curah hujan normal dan banyak terjadi banjir yang melebihi baik besarnya maupun lokasinya dari tahun- tahun sebelumnya. Banjir tersebut menyebabkan terganggunya aktifitas masyarakat dan abrasi pantai. Sebagai contoh terjadi banjir di Kecamatan Kota Mukomuko, Desa Pondok Batu dan Tranbandet yang diakibatkan luapan Sungai Air Hitam (Selagan). Banjir ini menggenangi pemukiman dan jalan. Terjadi abrasi pantai di Pantai Ipuh, Dikit dan Kota Mukomuko yang mengakibatkan kerusakan jalan lintas barat Sumatera. Isu global climate change di Wilayah Sungai Terawang Muar memerlukan suatu tindak lanjut penelitian perubahan iklim dari data klimatologi.

1.4.2 Isu Strategis Lokal WS Terawang Muar

- a. Ancaman tsunami, gempa, dan intrusi air laut di pesisir barat Kabupaten Mukomuko.
- b. Kabupaten Mukomuko memiliki kesuburan tanah yang tinggi, sehingga sangat sesuai untuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Pertanian tanaman pangan terutama padi tadah hujan, jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu. Perkebunan meliputi karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi dan teh.
- c. Bencana banjir sering terjadi tiap tahunnya di Kecamatan Lubuk Pinang terutama di Desa Tanjung alay, Desa Arah Tiga, Desa Lubuk Pinang, Desa Sumber Makmur dan Desa SP.7. Kecamatan XIV Koto di Desa Lubuk Sanai dikarenakan meluapnya Sungai Manjunto. Selain itu banjir juga terjadi di Kecamatan Kota Mukomuko yaitu di Desa Tanah Harapan, Desa Pondok Batu, Tranbandet, Desa Tanah Rekah dan Desa Bandaratu. Kecamatan Teras Terunjam Desa Pondok Kopi dikarenakan meluapnya Sungai Selagan.
- d. Pencemaran sungai dijumpai di Sungai Air Dikit, Sungai Manjunto, Sungai Air Rami, Sungai Air Berau Hilir, Sungai Selagan, dan Sungai Air Ipuh Hilir, baik pencemaran yang dikarenakan limbah industri, rumah tangga, penambangan liar, maupun perkebunan sawit. Pencemaran ini perlu segera diatasi karena mengganggu kehidupan biota air di tersebut.
- e. Kerusakan bangunan pengaman tebing terjadi di Sungai Muar Kecamatan Ipuh. Apabila tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan mengancam pemukiman masyarakat dan jalan negara.

- f. Terjadi abrasi pantai di Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit, dan Kecamatan Ipuh (Kabupaten Mukomuko) yang berpotensi mengalami kerusakan hutan mangrove dan pesisir.
- g. Di Kabupaten Mukomuko terdapat potensi irigasi seluas 12.207 ha dan yang telah berfungsi seluas 6.981 ha. Tetapi sekarang ini sudah banyak terjadi alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi perkebunan sawit termasuk pabrik sawit.
- h. Pertumbuhan penduduk dan kegiatan perkotaan masih sangat terkonsentrasi di Mukomuko Kota.
- i. Terancamnya kondisi Taman Nasional Kawasan (TNKS) di Kabupaten Mukomuko, Kerinci, dan Merangin yang disebabkan oleh perambahan hutan, jual beli area hutan, pembuatan jalan pada lokasi bentang alam.

1.4,3 Isu Strategis Nasional WS Nasal Padang Guci

a. MDG's

Peningkatan layanan air minum/air baku di Kabupaten Kaur (Kecamatan Muara Sahung, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Tetap, dan Kecamatan Luas) dengan bersumber dari Sungai Luas dengan debit sebesar 0,31 m³/dt. Pada saat ini air yang baru dimanfaatkan sampai tahun 2020 adalah sebesar 36 l/dt.

b. Ketahanan Pangan

Kabupaten Bengkulu Selatan pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan kegiatan usaha pertanian yang sangat signifikan, menurut data luas panen produksi padi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, terjadi kenaikan produksi padi dan kenaikan luas areal panen. Dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 2004, menunjukkan bahwa luas areal panen sebesar 15.796 Ha naik menjadi 17.160 Ha pada tahun 2008, sedangkan untuk produksi padi naik dari 59.212 ton pada tahun 2004 menjadi 67.754,26 ton pada tahun 2008. Kabupaten Kaur pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan kegiatan usaha pertanian yang sangat signifikan, menurut data tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, terjadi kenaikan produksi padi dan kenaikan luas panen, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa produksi penurunan luas panen padi pada tahun 2003 yang mencapai 8.031 Ha naik menjadi 11.301 Ha pada tahun 2007, sedangkan untuk produksi padi naik dari 29.940,106 ton pada tahun 2003 menjadi 41.941,49 ton pada tahun 2007. Sesuai dengan kondisi potensi pangan di Wilayah Sungai Nasal–Padang Guci pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan arahan, bahwa Wilayah Sungai Nasal–Padang Guci dijadikan sebagai penyedia pangan utama provinsi.

c. Ketersediaan Energi

Kapasitas jaringan pembangkit listrik di Wilayah Sumatera sudah sangat mendesak untuk ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, sering terjadi pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Arah pengembangan Wilayah Sumatera sebagai pusat pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam mutlak membutuhkan pasokan energi listrik yang andal dengan sistem jaringan yang terintegrasi untuk satu wilayah. Pada wilayah Sungai Nasal-Padang Guci akan direncanakan pembuatan waduk salah satunya untuk memenuhi ketersediaan listrik yaitu di DAS Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, DAS Padang Guci Kabupaten Kaur, DAS Nasal Kabupaten Kaur dan DAS Luas Kabupaten Kaur.

d. Perubahan Iklim Global

Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. IPCC menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi (termasuk ekosistem di daerah Artuka dan Antartika), lokasi yang tinggi serta ekosistem-ekosistem pantai. Akhir-akhir ini di Wilayah Sungai Nasal-Padang Guci jumlah curah hujan melebihi dari jumlah curah hujan normal dan banyak terjadi banjir yang melebihi baik besarnya maupun lokasinya dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh banyaknya tebing sungai yang longsor dan kritis akibat banjir, seperti yang terjadi di Sungai Padang Guci, Sungai Nasal dan Sungai Kinal.

1.4.4 Isu Strategis Lokal WS Nasal Padang Guci

a. Kerusakan DAS

Kerusakan DAS terjadi di Desa Talang Guci I dan II Kecamatan Padang Guci seluas 50 ha, Air Bengkenang berupa semak belukar seluas \pm 1500 ha.

b. Bencana Banjir

Bencana banjir sering terjadi tiap tahunnya di Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas \pm 100 ha dan lama banjir sekitar 5 (lima) jam. Selain itu di kejadian banjir juga sering terjadi Desa Talang Guci I dan II Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur. Penyebab banjir dikarenakan banyaknya kerusakan hutan di bagian hulu sungai yang disebabkan karena penebangan liar dan konversi lahan menjadi perkebunan sawit.

c. Krisis Air

Krisis air terjadi pada musim kemarau di Kecamatan Seginim, Kecamatan Nipis, dan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

d. Penambangan Liar

Di sepanjang Sungai Nasal banyak terdapat penambangan liar material-material sungai yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Apabila tidak ditertibkan, akan terjadi eksploitasi secara besar-besaran yang mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai.

e. Pencemaran Sungai

Pencemaran sungai banyak dijumpai di Sungai Air Manna dan Sungai Air Sarak, baik pencemaran yang dikarenakan limbah industri, rumah tangga, penambangan liar, maupun perkebunan sawit. Pencemaran ini perlu segera diatasi karena mengganggu kehidupan biota air di tersebut.

f. Erosi Tebing Sungai

Erosi tebing sungai terjadi di Sungai Padang Guci, air menggerus tebing sungai yang terdapat jalan provinsi yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Sehingga perlu segera ditangani agar perekonomian masyarakat tidak terganggu atau terputus.

g. Abrasi Pantai

Terjadi Abrasi pantai di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur sebagai daerah pesisir yang mempunyai panjang garis pantai \pm 60 km, berpotensi mengalami kerusakan hutan mangrove dan pesisir.

h. Irigasi

Di Kabupaten Kaur terdapat potensi irigasi dengan luas 7.114 ha, dan yang telah berfungsi seluas 6.129 ha. Di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat potensi irigasi dengan luas 13.808 ha, sudah menjadi sawah seluas 10.595 ha dan belum menjadi sawah seluas 3.196 ha.

i. Perikanan

- Di muara sahung Kabupaten Kaur terdapat tebat (danau) alami sekitar 70 ha dan sedang dikembangkan keramba jaring apung.
- Di pesisir pantai banyak terdapat potensi perikanan yang belum dikembangkan yang menjadi satu kesatuan dengan konservasi pantai berupa mangrove.



Sungai Padang Guci Kabupaten Kaur



BAB 2



Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang 525 kilometer, terletak pada bagian Barat dan merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari Utara ke Selatan serta diselang-selingi daerah yang bergelombang, sedangkan pada bagian Timur berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai kurang lebih 1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi terdiri dari 9 (sembilan) daerah Kabupaten/Kota meliputi :

No	Kabupaten	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Kabupaten Bengkulu Selatan	1,185.70
2.	Kabupaten Rejang Lebong	1,515.76
3.	Kabupaten Bengkulu Utara	4,424.60
4.	Kabupaten Kaur	2,363.00
5.	Kabupaten Seluma	2,400.44
6.	Kabupaten Muko – Muko	4,036.70
7.	Kabupaten Lebong	1,929.24
8.	Kabupaten Kepahiang	664.80
9.	Kabupaten Bengkulu Tengah	1,123.94
10.	Kota Bengkulu	144.52
Jumlah		19,788.70

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

2.2 Inventarisasi Data Fisik dan Sosial Wilayah Sungai

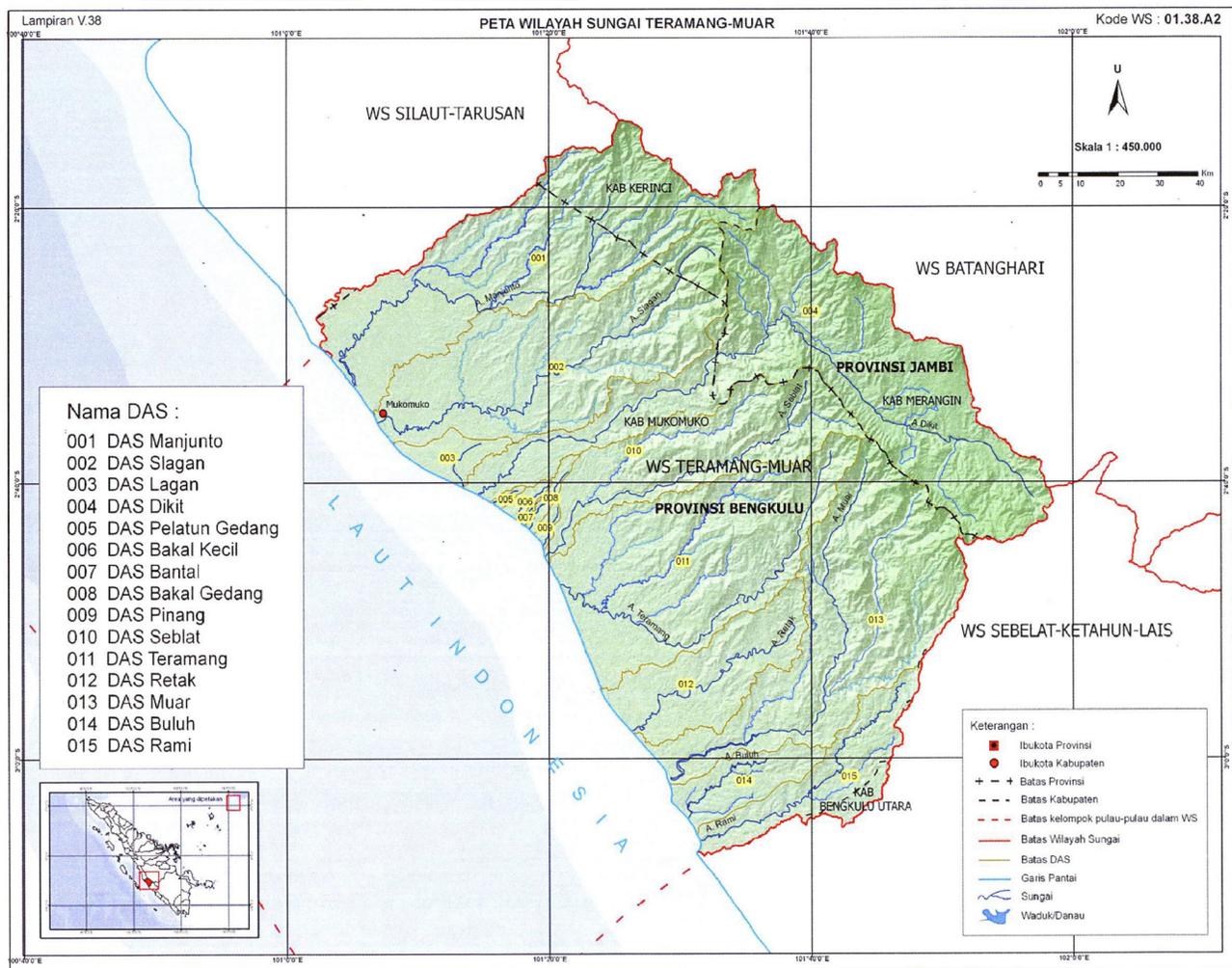
a. Wilayah Sungai Teramang Muar (WS Teramang Muar)

1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Secara geografis WS Teramang Muar meliputi wilayah administrasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi dan pada posisi 1010 00' 53,78" – 1010 58'47,42" BT dan antara 20 13' 5,50" - 30 11' 16,0" LS, dengan batas administrasi WS Teramang Muar adalah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

WS Teramang Muar yang masuk pada wilayah administrasi Provinsi Bengkulu tercakup 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara. WS Teramang Muar yang masuk di wilayah administrasi Kabupaten Mukomuko adalah Kecamatan V Koto, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Manjuto, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan Penarik, Kecamatan Pondok Sugu, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Air Rami, sedangkan WS Teramang Muar yang masuk di wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara adalah Kecamatan Putri Hijau.

WS Teramang Muar yang masuk di wilayah administrasi Provinsi Jambi tercakup 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. WS Teramang Muar yang masuk di wilayah administrasi Kabupaten Merangin adalah Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Sungai Tenang, sedangkan WS Teramang Muar yang masuk di wilayah administrasi Kabupaten Kerinci adalah Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Gunung Raya. Peta administrasi di WS Teramang Muar disajikan pada Gambar di bawah ini:



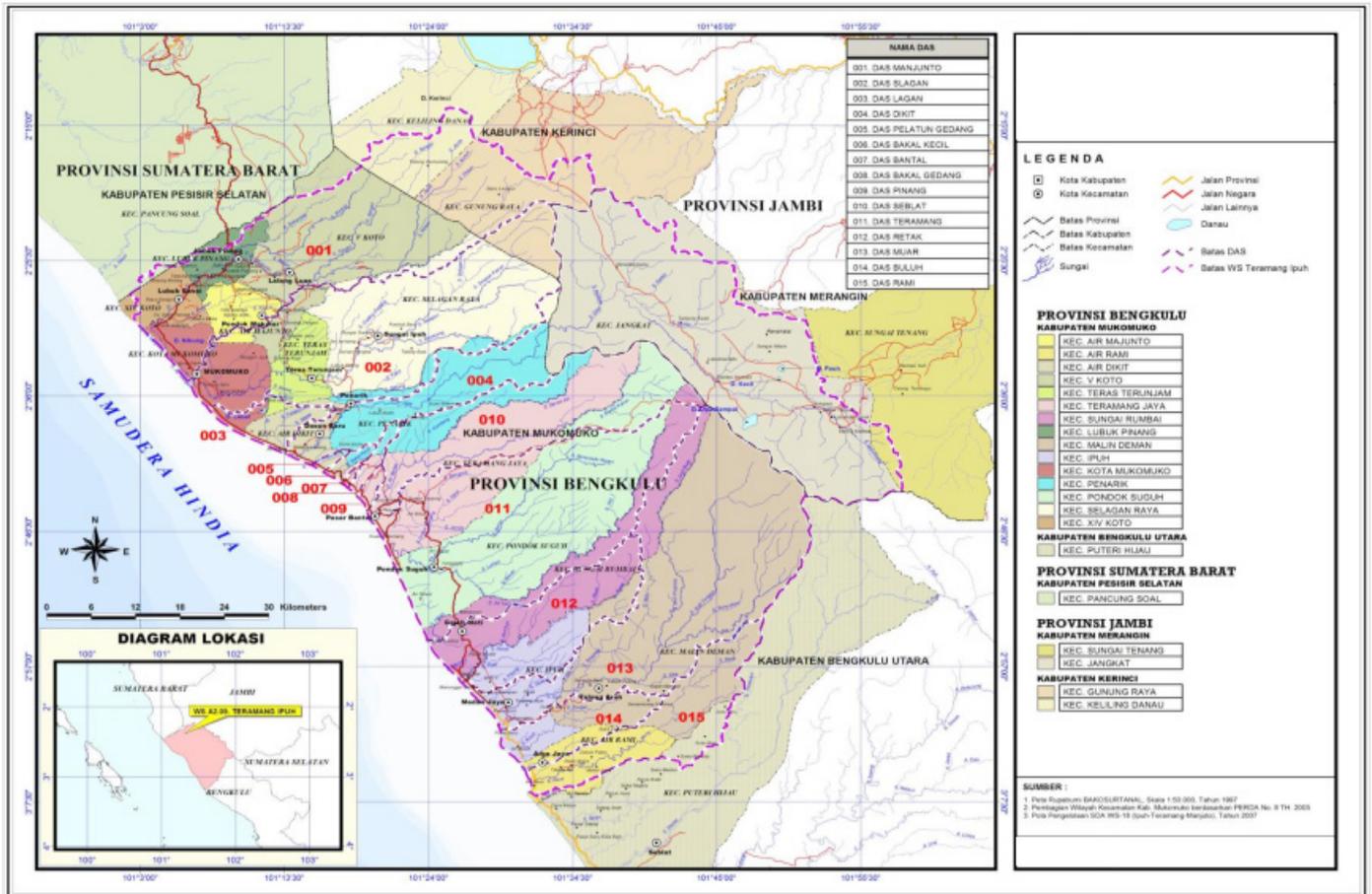
Gambar 2.2 Peta Wilayah Sungai Teramang Muar

WS Teramang Muar terdiri dari 15 DAS seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut:

No.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (km ²)
1.	Manjuto	850,39
2.	Slagan	720,88
3.	Lagan	62,65
4.	Dikit	1088,68
5.	Pelatun Gedang	6,44
6.	Bakal Kecil	15,09
7.	Bantal	3,17
8.	Bakal Gedang	19,32
9.	Pinang	11,42
10.	Seblat	405,94
11.	Teramang	738,27
12.	Retak	276,14
13.	Muar	770,06
14.	Buluh	123,12
15.	Rami	233,81
TOTAL		5325,37

Tabel 2.2 DAS Pada WS Teramang Muar

Seperti yang telah diperlihatkan pada Tabel 2.2 di atas, DAS yang terluas adalah DAS Dikit dengan luas 1.088,68 Km² dan DAS yang terkecil adalah DAS Bantal dengan luas 3,17 Km². Peta DAS di WS Teramang Muar diperlihatkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.3 Peta DAS Wilayah Sungai Teramang Muar

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Muatan lainnya yang harus diakomodasi dalam rencana tata ruang wilayah adalah Rencana Pola Ruang, yaitu rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya. Terkait dengan uraian di atas, rencana kawasan fungsi lindung di WS Teramang Muar adalah Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) di Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Sumatera Barat.

Salah satu rambu yang perlu diperhatikan dari kedua undang-undang di atas yaitu penegasan mengenai harus tersedianya minimal 30% lahan yang diperuntukkan sebagai fungsi hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian terhadap pola ruang eksisting yang sudah berlangsung saat ini menunjukkan bahwa ruang yang termasuk ke dalam WS Teramang Muar seluas 5.325,37 Km², dimanfaatkan untuk sekitar 14 penggunaan. Pola ruang eksisting yang potensial dapat berfungsi lindung yaitu hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, belukar rawa, dan tubuh air yang bisa berupa danau, sungai, dan badan air lainnya. Sedangkan pola ruang yang dapat diidentifikasi sebagai fungsi budidaya dan/atau potensial sebagai kawasan budi daya adalah permukiman, perkebunan, kebun campuran, sawah, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, semak/belukar, tanah terbuka, dan tegalan.

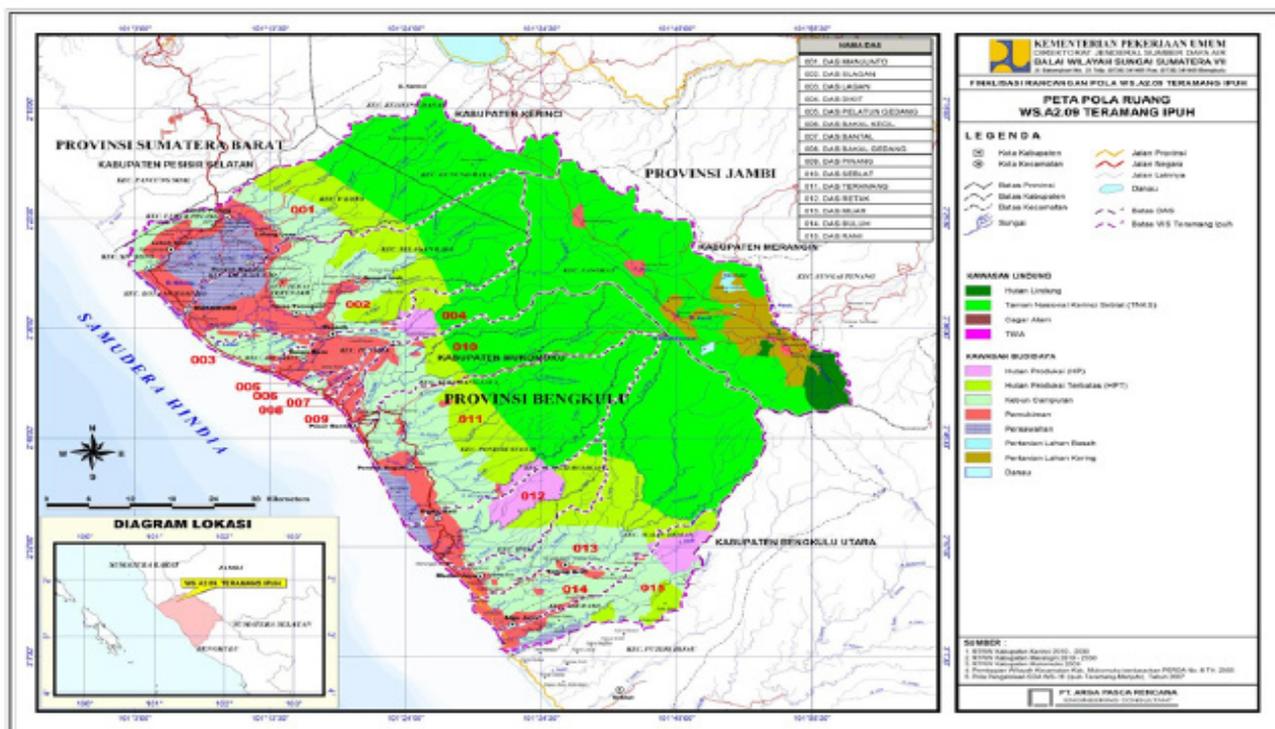
Kawasan strategis (nasional) di WS Terawang Muar adalah Kawasan Lingkungan Hidup TNKS. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana pola ruang di WS Terawang Muar dapat disajikan pada gambar di bawah ini.

LUAS RENCANA POLA RUANG

NAMA DAS	Kawasan Lindung						Kawasan Budidaya						JUMLAH LUAS (KM ²)	
	Taman Nasional						Hutan Produksi		Kawasan Pertanian Lahan Basah		Pertanian Lahan Kering			
	Pasar Altern	TBA	Kawasan Sakral (TNKS)	Hutan Lindung	Pasar	Perikanan	Tanah	Mutan Produksi Terbatas (MPT)	Mutan Produksi (MP)	Kawasan Campuran	Bekas	Kering		Danu
001. DAS MANJUNTO	1,26	-	400,78	-	-	402,13	110,18	-	121,25	103,25	-	103,56	448,23	850,39
002. DAS SLAGAN	0,29	-	220,20	-	-	220,90	126,07	3,25	198,17	47,30	-	129,57	500,26	720,86
003. DAS LAGAN	0,06	-	-	-	-	0,96	-	-	48,39	-	-	14,29	62,68	62,74
004. DAS DIKT	-	-	728,24	60,49	3,70	792,44	17,20	23,37	20,31	6,84	136,04	92,18	296,24	1.088,68
005. DAS PELATUN GEDANG	-	-	-	-	-	-	-	-	4,78	-	-	1,67	6,43	6,43
006. DAS BAKAL KECIL	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33	-	-	10,73	15,10	15,10
007. DAS BANTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17	3,17	3,17
008. DAS BAKAL GEDANG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19	-	-	18,13	19,32	19,32
009. DAS PINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66	-	-	10,78	11,43	11,43
010. DAS SEBLAT	-	-	281,25	-	-	281,25	32,81	0,81	71,55	-	-	19,42	124,58	405,83
011. DAS TERAWANG	-	1,23	309,06	-	-	310,29	128,21	13,97	202,59	30,12	-	53,07	427,97	758,28
012. DAS RETAK	-	1,30	7,75	-	-	9,12	77,81	57,57	81,58	8,83	-	40,84	287,02	278,14
013. DAS MUAR	-	-	480,44	-	-	480,44	110,53	1,70	151,55	0,91	-	23,42	285,03	770,68
014. DAS BULUH	-	-	-	-	-	-	-	-	88,50	-	-	34,66	123,17	123,17
015. DAS RAMI	0,21	-	1,24	-	-	1,46	51,56	38,40	106,72	13,91	-	22,67	232,36	203,81
J U M L A H	1,82	2,61	2.428,93	60,49	3,70	2.497,57	634,49	139,07	1.112,57	209,38	136,04	376,16	2.827,71	5.329,37
	0,88%	0,10%	97,25%	2,42%	0,15%	100,06%	23,15%	4,92%	39,33%	7,80%	4,81%	20,38%	100,00%	-
	0,04%	0,05%	45,61%	1,14%	0,07%	46,80%	12,29%	2,61%	20,89%	3,93%	2,33%	10,82%	53,10%	100,00%

Sumber : RTRW Kab. Kerinci Tahun 2010 - Tahun 2030, RTRW Kab. Merangin Tahun 2010 - Tahun 2030, RTRW Kab. Mukomuko Tahun 2010 - Tahun 2030, Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS-18, Tahun 2010

Tabel 2.3 Rencana Pola Ruang di WS Terawang Muar



Gambar 2.4 Rencana Pola Ruang di WS Terawang Muar

3. Kependudukan

Dari segi kependudukan jumlah penduduk di wilayah administrasi kecamatan yang tersebar di kelima Kabupaten pada Tahun 2008 - Tahun 2009 berjumlah 11.099 jiwa terpadat berada di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan tingkat kepadatan 144,14 jiwa per km² atau 14 jiwa per ha termasuk kategori kepadatan jarang dan terendah berada di Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan tingkat kepadatan 9 jiwa per km² atau 0,09 jiwa per ha termasuk kategori kepadatan sangat jarang. Secara rinci penyebaran penduduk dan perkembangan jumlah penduduk tiap kabupaten di WS Teramang Muar disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

No.	Provinsi/Kabupaten/ Kecamatan	Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Penduduk (jnsd)	Luas Wilayah Administrasi (km ²)	Kepadatan Penduduk (jnsd/km ²)	Jumlah Rumah Tangga	Rata- Rata
8	<i>PROVINSI BENGKULU</i>					
	Kabupaten					
	Mukomuko					
	Kec. Air Manjunt	8825	127.29	69.32	2402	3.69
	Kec. Air Rami	9794	964.6	10.16	2919	3
	Kec. Air Dikit	5896	91	64.79	1395	4
	Kec. V Koto	5884	34.82	34.82	1702	3.46
	Kec. Teras Terunjam	6795	144.36	47.07	1837	4
	Kec. Teramang Jaya	9385	295.22	32	2690	5
	Kec. Sungai Rumbai	6249	163	40.84	1947	3
	Kec. Lubuk Pinang	12007	92.71	129.51	326	3.84
	Kec. Malin Deman	5243	292.99	17.89	1389	4
	Kec. Ipuh	16056	198.30	80	4246	3.78
	Kec. Kota Mukomuko	12775	227	56.28	3592	3.56
Kec. Penarik	17675	395.09	44.74	4800	3	
	Kec. Pondok Suguh	8802	312.06	28	2395	3.68
	Kec. Salangan Raya	8509	339	25.1	2085	4
	Kec. XIV Koto	11099	77	144.14	2683	4.14
	Sub Jumlah a	144994				
b.	Kabupaten Bengkulu					
	Utara					
	Kec. Puteri Hijau	40796	1113.42	36.64	9820	4.1
	Sub Jumlah b	40796				
2	<i>PROVINSI SUMATERA</i>					
	<i>BARAT</i>					
	Kabupaten Pasir					
	Selatan					
	Kec. Pancung Soal	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah c	0				
3	<i>PROVINSI JAMBI</i>					
	d.					
	Kabupaten Merangin					
	Kec. Sungai Tenang	8174	874	9	2009	4
	Kec. Jangkat	7965	697	11	1919	4
	Sub Jumlah d	16139				
e.	Kabupaten Kerinci					
	Kec. Gunung Raya	15391	743.85	21	4624	3
	Kec. Keliling Danau	22465	385.99	58	6184	4
	Sub Jumlah e	37856				
	Jumlah Total	239825				

Sumber : Badan Statistik Pusat (data Kecamatan di Kabupaten Terkait), Tahun 2010

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Wilayah Administrasi Kecamatan di WS Teramang Muar Tahun 2009

No.	Provinsi/Kabupaten	Perkembangan Penduduk Kabupaten Tahun						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Provinsi Bengkulu							
1	Kab. Mukomuko	128132	130401	133527	135181	138590	142027	145530
2	Kab. Bengkulu Utara	319069*	323055*	328751*	332741	339873	250435*	253052
	Provinsi Sumatera Barat							
3	Kab. Pesisir Selatan	0	0	0	0	0	0	0
	Provinsi Jambi							
4	Kab. Merangin	271735	275534	278425	289295	292461	298351	292013
5	Kab. Kerinci	302809	305243	308795	311354	313534	235419	-

* Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan mulai Tahun 2003 s.d 2005

* Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah (UU No 2/2008)

Sumber : BPS Kabupaten Terkait Tahun 2003 s.d 2010

Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten

Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di kelima kabupaten selama periode Tahun 2003 – 2009 relatif rendah, sebagaimana tersaji pada Tabel 5. di Kabupaten Mukomuko sebesar 1.84%, Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 2.70%, Kabupaten Merangin sebesar 1.05% dan Kabupaten Kerinci sebesar 0.73%. Kabupaten Bengkulu Utara selain pertumbuhan secara alami juga adanya pemekaran sebanyak empat kali berturut-turut dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 dan Tahun 2008 sedemikian tersaji pertumbuhan dengan nilai negatif. Perkiraan jumlah penduduk DAS WS Teramang Muar pada Tahun 2010 disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

No.	Provinsi/Kabupaten	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tahun							
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-Rata
	Provinsi Bengkulu								
1	Kabupaten Mukomuko	-	1.77	2.4	1.24	2.52	2.48	2.47	1.84
2	Kabupaten Bengkulu Utara	-	1.25	1.76	1.21	2.14	26.3 2	1.05	-2.70
	Provinsi Sumatera Barat								
3	Kabupaten Pesisir Selatan	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Provinsi Jambi								
4	Kabupaten Merangin	-	1.4	1.05	3.9	1.09	2.02	2.13	1.05
5	Kabupaten Kerinci	0.81	0.80	1.16	0.83	0.73	0.76	-	0.73

Sumber : BPS Kabupaten Terkait Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2010

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Periode Tahun 2003 – 2009

NAMA DAS	LUAS (km ²)	JUMLAH PENDUDUK (juta)
001 MANJUNTO	850.39	87568
002 SLAGAN	720.88	29240
003 LAGAN	62.65	3808
004 DIKIT	1088.68	20159
005 PELATUN GEDANG	6.44	403
006 BAKAL KECIL	15.09	754
007 BANTAL	3.17	101
008 BAKAL GEDANG	19.32	722
009 PINANG	11.42	363
010 SEBLAT	405.94	13823
011 TERAMANG	738.26	24282
012 RETAK	276.14	16499
013 MUAR	770.06	19658
014 BULUH	123.12	4470
015 RAMI	233.81	4193
JUMLAH	5325.37	226043

Tabel 2.7 Perkiraan Jumlah Penduduk DAS WS Teramang Muar

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga konstan biasanya digunakan untuk melihat pertumbuhan regional secara riil, tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga. Perkembangan nilai PRDB Atas Dasar Harga Berlaku pada periode Tahun 2006 sampai dengan 2008 di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

No	Kabupaten	2006	2007	2008	Rata-Rata Pertumbuhan	Persentase PDRB Tahun 2008	
						thd PDRB 5 Kab.	thd PDRB Nasiona l
1	Mukomuko	5.762.940	6.268.490	6.680.607	7,67%	32,14%	0,13%
2	Bengkulu Utara	4.977.807	5.402.458	5.606.484	6,15%	26,98%	0,11%
3	Pesisir Selatan	2.654.320	3.082.919	3.581.153	16,15%	17,23%	0,07%
4	Merangin	1.634.194	1.910.085	2.262.562	17,67%	10,89%	0,05%
5	Kerinci	0	2.377.387	2.652.522	11,57%	12,76%	0,05%
Total 5 Kab.		15.029.261	19.041.339	20.783.328	17,92%	100,00%	0,42%
Total Indonesia		3.339.480.000	3.957.400.000	4.954.000.000	21,84%		

* dihitung berdasarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : BPS Provinsi Terkait, Tahun 2009

Tabel 2.8 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Periode Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 (juta rupiah)

Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 pada Periode Tahun 2006 sampai dengan 2008 diperlihatkan sebagai berikut:

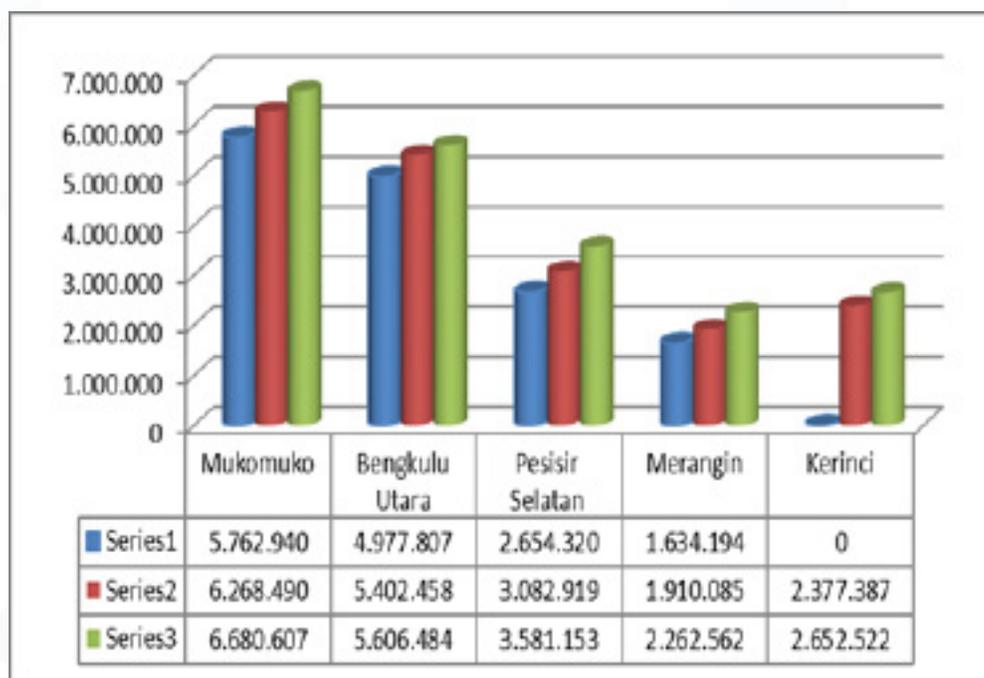
No.	Kabupaten	2006	2007	2008	Rata-Rata Pertumbuhan	Persentase PDRB Tahun 2008	
						thd 5 Kab.	thd PDRB Nasional
1	Mukomuko	3.253.218	3.314.799	3.347.238	1,44%	38,38%	0,16%
2	Bengkulu Utara	1.644.088	1.836.149	1.404.060	-5,93%*	16,10%	0,07%
3	Pesisir Selatan	1.710.670	1.801.336	1.899.033	5,36%	21,77%	0,09%
4	Merangin	892.219	966.063	1.012.319	6,62%	11,61%	0,05%
5	Kerinci	DTT	1.000.752	1.059.597	5,88%	12,15%	0,05%
Total 5 Kab.		7.500.094	8.908.100	8.722.240	8,54%	100,00%	0,42%
Total Indonesia		1.847.290.000	1.963.970.000	2.082.100.000	6,17%		

*Adanya Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah

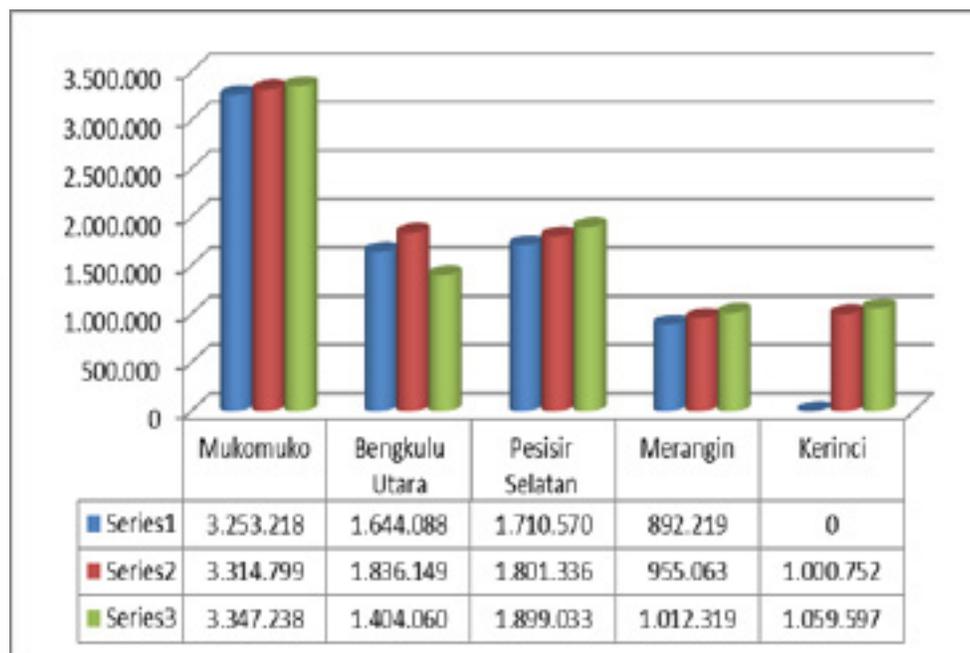
DTT : Data Tidak Tersedia

Sumber : BPS Provinsi Terkait, Tahun 2009

Tabel 2.9 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 pada Periode Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 (juta rupiah)



Gambar 2.5 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Periode Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008



Gambar 2.6 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 pada Periode Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008

5. Pendapatan Per Kapita di WS Teramang Muar

Berdasarkan data yang ada pendapatan penduduk per kapita di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci disajikan berikut ini.

No.	Kabupaten	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Mukomuko	5.762.940,00	6.268.490,00	6.680.607,00	7.125.975,00
2	Bengkulu Utara	4.857.246,00	5.320.412,24	5.495.137,50	5.913.201,53
3	Pesisir Selatan	5.712.413,11	6.428.569,51	7.368.434,31	8.261.667,92
4	Merangin	5.314.170,00	6.115.511,00	7.115.065,00	8.487.896,00
5	Kerinci	8.020.971,42	7.884.311,63	9.063.925,83	11.227.900,00
Total 5 Kabupaten		29.667.740,53	32.017.294,38	35.723.169,64	41.016.640,45
Total Indonesia			15.325.139,00	18.256.330,00	19.580.212,00

Sumber : BPS Provinsi Termit, Tahun 2010

Tabel 2.10 Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

No.	Kabupaten	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Mukomuko	3.235.218,00	3.314.799,00	3.347.238,00	3.428.572,00
2	Bengkulu Utara	2.836.324,00	2.932.254,11	2.808.616,13	2.950.682,86
3	Pesisir Selatan	3.905.554,69	4.010.182,23	4.167.615,19	4.328.214,08
4	Merangin	2.977.544,00	3.126.699,00	3.244.897,00	3.431.531,00
5	Kerinci	4.179.531,72	3.619.029,62	3.808.567,89	4.485.220,00
Total 5 Kabupaten		17.134.172,41	17.002.963,96	17.376.934,21	18.624.219,94

Sumber : BPS Provinsi Terkait, Tahun 2010

Tabel 2.11 Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan

6. Kondisi Topografi dan Geologi

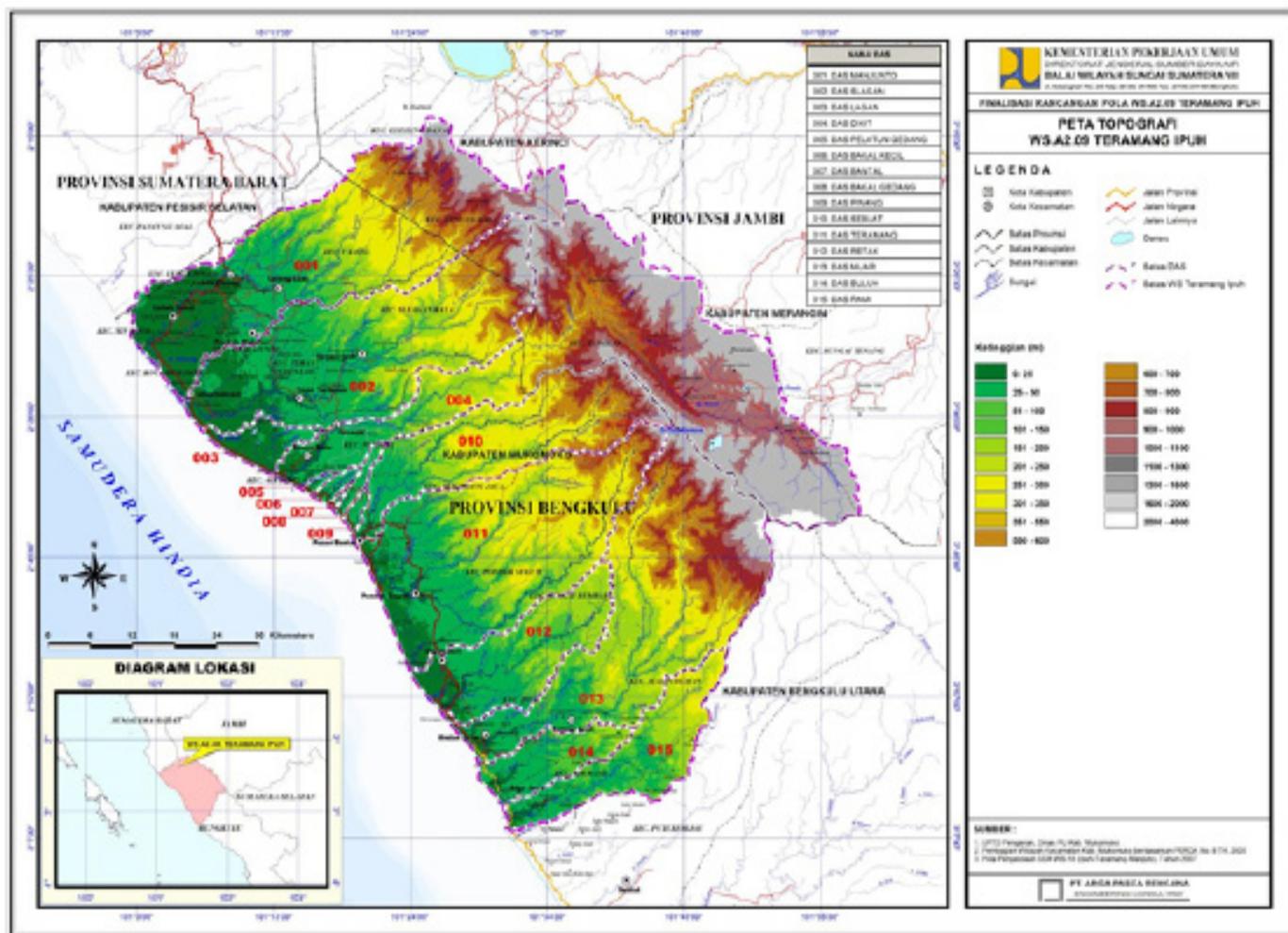
Keadaan topografi di WS Teramang Muar disajikan pada tabel berikut ini.

No.	DAS		Ketinggian (m dpl)	Kemiringan (%)				
	Nama	Luas (Km ²)		0 - 8	8 - 15	15 - 25	25 - 40	> 40
1.	Manjuntio	850,39	0 - 2.529	41,1	17,3	17,8	14,7	9,1
2.	Siagan	720,88	0 - 1.936	45,3	17,7	14,6	13,3	9,1
3.	Lagan	62,65	0 - 68	96,9	2,1	0,1	0,0	1,0
4.	Dikit	1088,68	0 - 2.892	16,7	18,0	23,9	25,0	16,5
5.	Pelatun Gedang	6,44	0 - 52	91,6	6,8	0,9	0,0	0,6
6.	Bakal Kecil	15,09	0 - 78	85,9	13,0	0,8	0,1	0,3
7.	Bantal	3,17	0 - 59	85,5	12,6	0,9	0,0	0,9
8.	Bakal Gedang	19,32	0 - 120	73,9	25,5	0,6	0,0	0,0
9.	Pinang	11,42	0 - 70	81,6	16,7	0,4	0,0	1,3
10.	Seblat	405,94	0 - 1.845	20,4	18,5	22,2	23,5	15,4
11.	Teramang	738,27	0 - 1.801	39,1	24,6	19,5	11,4	5,4
12.	Retak	276,14	0 - 507	61,4	26,4	9,9	2,1	0,2
13.	Muar	770,06	0 - 2.213	19,2	20,0	22,9	21,7	16,1
14.	Buluh	123,12	0 - 206	65,8	27,5	6,1	0,1	0,4
15.	Rami	233,81	0 - 508	51,9	32,6	12,2	2,3	1,1

Sumber : Peta Rupa Bumi Bakosurtanal Skala 1 : 50.000

Tabel 2.12 Topografi WS Teramang Muar

Berdasarkan Tabel 2.12, DAS yang memiliki ketinggian paling tinggi adalah DAS Dikit yang memang memiliki hulu di sekitar pegunungan bukit barisan. Peta Topografi WS Teramang Muar disajikan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.7 Peta Topografi WS Teramang Muar

Kondisi Geologi bagian tengah dari WS Teramang Muar ditempati oleh beberapa gunung api muda. Gunung-gunung tersebut membentuk jajaran gunungapi strato sebagai bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan dengan arah umum Barat Laut - Tenggara. Di bagian Barat dan Timur dibatasi oleh perbukitan bergelombang, setempat dengan timbunan tajam terdapat di bagian Utara dan Selatan. Dataran sempit terdapat setempat-setempat di daerah pantai pada bagian Barat Daya, sebagian berupa rawa-rawa yang berair pada waktu pasang.

Jajaran gunung api strato dibentuk oleh batuan berumur kuartar yang terdiri dari rempah-rempah lepas gunung api berukuran abu atau bom dan batuan padu seperti lava, breksi, dan tufa. Daerah perbukitan bergelombang dengan timbunan-timbunan tajam membentuk Pegunungan Bukit Barisan yang cukup tinggi, berlereng terjal dengan lembah-lembah yang sempit secara keseluruhan menampilkan permukaan kasar dengan pola aliran umumnya sejajar atau hampir sejajar dan dibentuk oleh batuan padu berupa batu sabak, batuan terobosan bersifat ultra basic sampai granitik, batuan vulkanik tua, dan berbagai batuan sedimen berumur jura sampai tersier.

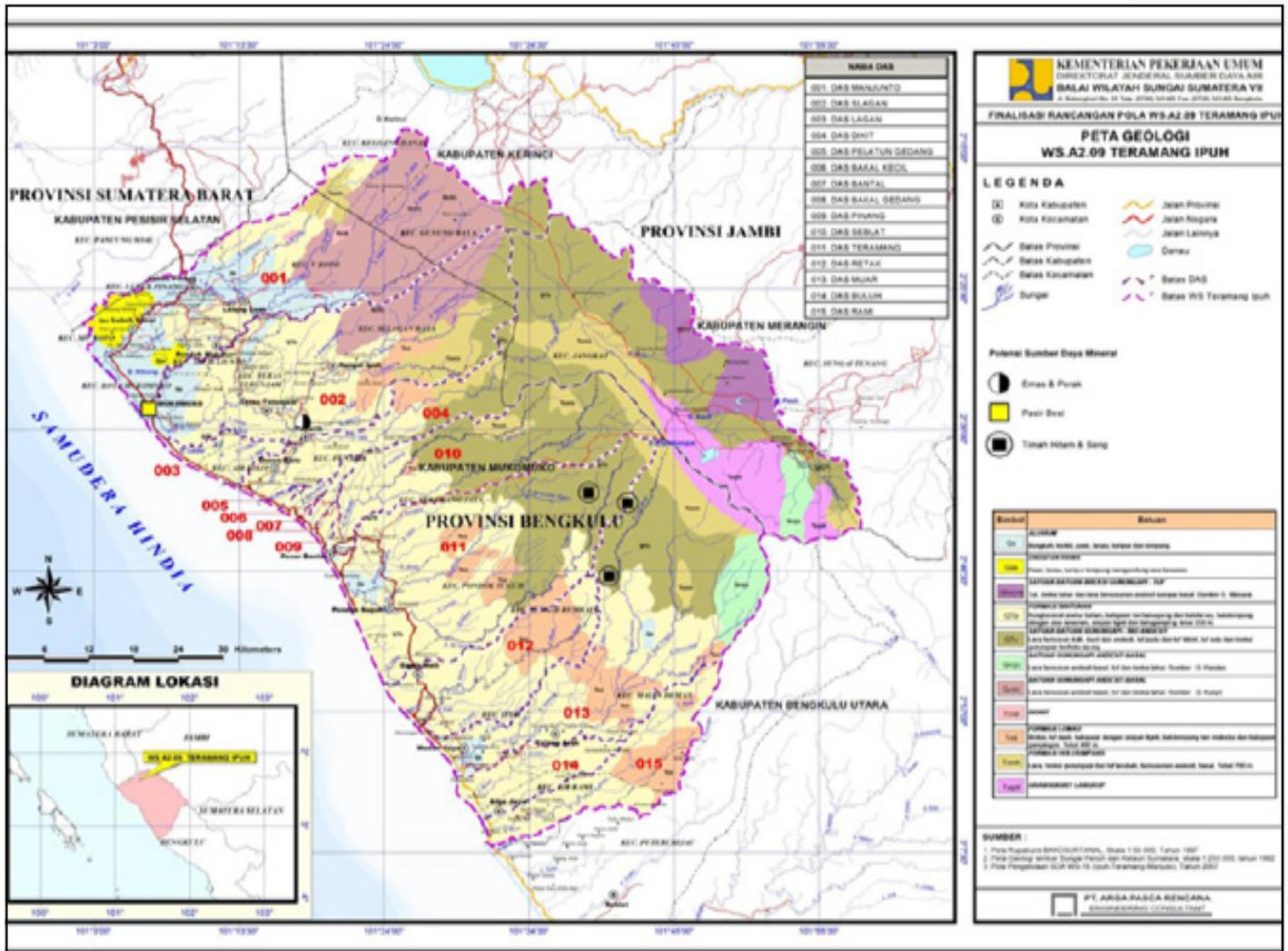
Sedangkan daerah perbukitan bergelombang lemah dibentuk oleh batuan vulkanik muda dan batuan sedimen kurang padu, terutama pada bagian timur dari pegunungan Bukit Barisan. Kelompok batuan-batuan tersebut telah mengalami perlipatan dan penyesaran dengan kedudukan perlapisan batuan miring atau miring lemah. Sesar Sumatera dengan arah umum Barat Laut - Tenggara memotong batuan berumur oligosen sampai kuartar. Di beberapa tempat terlihat bahwa sesar Sumatera merupakan kontak antara batuan vulkanik kuartar dengan batuan padu yang berumur lebih tua. Dataran sempit yang dijumpai setempat di bagian Barat Daya dibentuk oleh material lepas berukuran lempung sampai kerikil dengan ketebalan ± 5 meter. Daerah tubuh gunung api strato dan daerah perbukitan bergelombang dengan timbunan tajam umumnya ditempati oleh hutan-hutan lebat.

Sejarah struktur geologi Kabupaten Mukomuko tidak lepas dari pola struktur pulau Sumatera keseluruhan yang di kuasai oleh peristiwa tektonika Jura sampai Resen. Unsur-unsur utama dalam batuan adalah lipatan, sesar, dan kekar. Lipatan-lipatan hanya dapat diamati didalam satuan-satuan Tersier sapai Resen, dan sifat perlipatannya lebih kurang berarah barat laut tenggara, sejajar dengan arah struktur Sumatera (de Coster, 1974). Pensesaran hampir terdapat di semua batuan yang berumur Pra- Holosen, dan umumnya arah sesar yang sama dapat dilihat dalam kedua batuan berumur Pra-Tertier dan batuan yang lebih muda. Dua kelompok utama kekar dapat dikenali adalah kekar rabakan dan kekar regangan. Kekar rabakan banyak terdapat di sekitar daerah sesar Seblat dan sesar Dikit, sedangkan sesar regangan umumnya terdapat di antara pecahan-pecahan di dalam batuan Breksi Formasi Kumun. Beberapa di antara kekar- kekar yang disebut terakhir telah diisi oleh mineral sekunder seperti kalsit dan kwarsa.

Pada jaman tersier daerah Bengkulu telah mengalami dua kali pengangkatan :

- 1). Terjadi pada jaman Miosen Tengah, yang melipat batuan- batuan yang berumur Miosen Bawah antara lain Formasi- Formasi Andesit Tua, Formasi Baturaja, Formasi Telisa, Formasi Gumai disertai oleh kegiatan gunungapi.
- 2). Terjadi pada jaman akhir Miosen yang mempengaruhi sedimen-sedimen tersier bawah dan Miosen Atas sehingga mengalami perlipatan dengan sumbu-sumbu sejajar dengan arah Pulau Sumatera. Pengangkatan ini disusul dan disertai oleh terobosan-terobosan dari batuan Batolit bersusunan asam dan intermediet serta sejumlah gang-gang bersusunan Dasitis, menimbulkan daerah-daerah mineralisasi penting. Jalur ini oleh Tobler (1910-1917) disebut sebagai "Hoch Barisan" atau oleh Westerveld (1953) dinamakan "Sunda Orogen".

Pada plistosen ditandai dengan adanya gerak-gerak mendatar yang menghasilkan apa yang disebut oleh Van Bemmelen (1949) sebagai "Semangko Fault Zone" atau oleh Westerveld (1953) sebagai "Great Sumatera Fault System". Menurut pengamatan, gerakan-gerakan ini sampai sekarang masih berlangsung dimana hal ini terlihat dengan masih berlangsungnya gejala-gejala kegempaan dan kegiatan gunung berapi bersusunan andesit di sepanjang jalur ini. Peta Geologi WS Terawang Muar disajikan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.8 Peta Geologi WS Terawang Muar

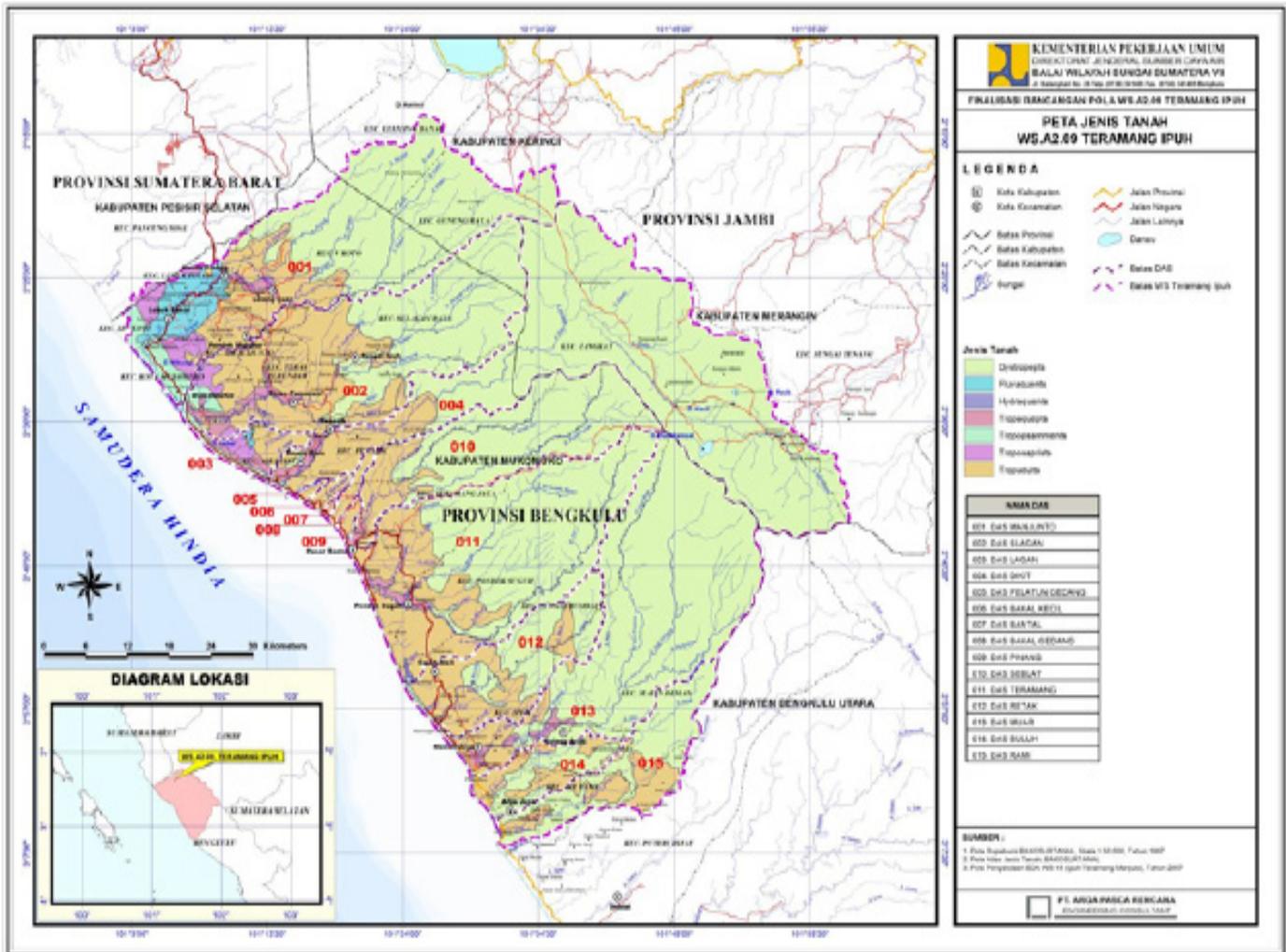
7. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di WS Terawang Muar berdasarkan USDA Keys Taxonomi (1988) pada umumnya didominasi oleh jenis Dystropepts dan Tropodult. Secara lebih rinci mengenai kondisi jenis tanah beserta luasnya (dalam Km²) per DAS yang terdapat dalam WS Terawang Muar sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.13 dan Peta Jenis Tanah WS Terawang Muar disajikan pada Gambar berikut ini.

NAMA DAS	JENIS TANAH
001. DAS MANJUNTO	Dystropepts
001. DAS MANJUNTO	Tropodults
001. DAS MANJUNTO	Fluvaquents
001. DAS MANJUNTO	Troposaprists
001. DAS MANJUNTO	Tropaquepts
001. DAS MANJUNTO	Tropopsamment
002. DAS SLAGAN	Dystropepts
002. DAS SLAGAN	Tropodults
002. DAS SLAGAN	Troposaprists
002. DAS SLAGAN	Tropaquepts
002. DAS SLAGAN	Tropopsamment
003. DAS LAGAN	Tropodults
003. DAS LAGAN	Fluvaquents
003. DAS LAGAN	Tropopsamment
003. DAS LAGAN	Tropaquepts
003. DAS LAGAN	Troposaprists
004. DAS DIKIT	Dystropepts
004. DAS DIKIT	Tropodults
004. DAS DIKIT	Tropaquepts
004. DAS DIKIT	Tropopsamment
005. DAS PELATUN GEDANG	Tropodults
006. DAS PELATUN GEDANG	Tropopsamment

NAMA DAS	JENIS TANAH
006. DAS BAKAL KECIL	Tropudults
006. DAS BAKAL KECIL	Tropopsamments
007. DAS BANTAL	Tropudults
007. DAS BANTAL	Tropopsamments
007. DAS BANTAL	Dystropepts
008. DAS BAKAL GEDANG	Tropudults
008. DAS BAKAL GEDANG	Tropopsamments
008. DAS BAKAL GEDANG	Dystropepts
009. DAS PINANG	Tropudults
009. DAS PINANG	Dystropepts
009. DAS PINANG	Tropaquepts
010. DAS SEBLAT	Dystropepts
010. DAS SEBLAT	Tropudults
010. DAS SEBLAT	Tropaquepts
011. DAS TERAMANO	Dystropepts
011. DAS TERAMANG	Tropudults
011. DAS TERAMANG	Tropaquepts
011. DAS TERAMANG	Hydraquents
012. DAS RETAK	Dystropepts
012. DAS RETAK	Tropudults
012. DAS RETAK	Hydraquents
012. DAS RETAK	Tropopsamments
013. DAS MUAR	Dystropepts
013. DAS MUAR	Tropudults
013. DAS MUAR	Tropaquepts
013. DAS MUAR	Tropopsamments
014. DAS BULUH	Dystropepts
014. DAS BULUH	Tropudults
015. DAS RAMI	Dystropepts
015. DAS RAMI	Tropudults

Tabel 2.13 Jenis Tanah Per DAS yang terdapat di WS Teramang Muar



Gambar 2.9 Peta Jenis Tanah WS Teramang Muar

8. Kemiringan Lereng

Kelas kemiringan lereng memberi gambaran salah satu perilaku hidrologi wilayah yang bersangkutan, karena kelas kemiringan lereng dan topografi merupakan faktor alami yang rentan terjadinya gangguan perilaku hidrologi apabila pola drainase wilayahnya sangat tidak memadai. WS Teramang Muar mempunyai kemiringan lereng kelas I sampai dengan II, dan sisanya (minoritas) merupakan kelas lereng III sampai dengan V (Bergelombang sampai dengan Sangat Curam). Luas kemiringan masing-masing kelas lereng diperlihatkan pada Tabel 2.14 dan Peta Kemiringan Lereng diperlihatkan pada Gambar berikut ini.

NAMA DAS	KEMIRINGAN LERENG	KETERANGAN LERENG	LUAS (Km ²)
001. DAS MANJUNTO	1). 0 - 8 %	Datar	357,12
001. DAS MANJUNTO	2). 8 - 15 %	Landai	144,63
001. DAS MANJUNTO	3). 15 - 25 %	Agak Curam	151,60
001. DAS MANJUNTO	4). 25 - 40 %	Curam	124,03
001. DAS MANJUNTO	5). > 40 %	Sangat Curam	72,85
002. DAS SLAGAN	1). 0 - 8 %	Datar	333,89
002. DAS SLAGAN	2). 8 - 15 %	Landai	123,45
002. DAS SLAGAN	3). 15 - 25 %	Agak Curam	104,55
002. DAS SLAGAN	4). 25 - 40 %	Curam	95,37
002. DAS SLAGAN	5). > 40 %	Sangat Curam	63,63
003. DAS LAGAN	1). 0 - 8 %	Datar	61,66
003. DAS LAGAN	2). 8 - 15 %	Landai	0,84
003. DAS LAGAN	3). 15 - 25 %	Agak Curam	0,01
004. DAS DIKIT	1). 0 - 8 %	Datar	188,51
004. DAS DIKIT	2). 8 - 15 %	Landai	195,35
004. DAS DIKIT	3). 15 - 25 %	Agak Curam	262,4
004. DAS DIKIT	4). 25 - 40 %	Curam	271,18
004. DAS DIKIT	5). > 40 %	Sangat Curam	170,95
005. DAS PELATUN GEDANG	1). 0 - 8 %	Datar	6,08
005. DAS PELATUN GEDANG	2). 8 - 15 %	Landai	0,32
005. DAS PELATUN GEDANG	3). 15 - 25 %	Agak Curam	0,05
006. DAS BAKAL KECIL	1). 0 - 8 %	Datar	13,28
006. DAS BAKAL KECIL	2). 8 - 15 %	Landai	1,71
006. DAS BAKAL KECIL	3). 15 - 25 %	Agak Curam	0,09
006. DAS BAKAL KECIL	4). 25 - 40 %	Curam	0
007. DAS BANTAL	1). 0 - 8 %	Datar	2,8
007. DAS BANTAL	2). 8 - 15 %	Landai	0,34
007. DAS BANTAL	3). 15 - 25 %	Agak Curam	0,03
008. DAS BAKAL GEDANG	1). 0 - 8 %	Datar	15,02
008. DAS BAKAL GEDANG	2). 8 - 15 %	Landai	4,25
008. DAS BAKAL GEDANG	3). 15 - 25 %	Agak Curam	0,08
009. DAS PINANG	1). 0 - 8 %	Datar	9,77
009. DAS PINANG	2). 8 - 15 %	Landai	1,63
009. DAS PINANG	3). 15 - 25 %	Agak Curam	0,03

010. DAS SEBLAT	1). 0 - 8 %	Datar	86,07
010. DAS SEBLAT	2). 8 - 15 %	Landai	72,68
010. DAS SEBLAT	3). 15 - 25 %	Agak Curam	91,11
010. DAS SEBLAT	4). 25 - 40 %	Curam	95,69
010. DAS SEBLAT	5). > 40 %	Sangat Curam	60,65
011. DAS TERAMANG	1). 0 - 8 %	Datar	298,07
011. DAS TERAMANG	2). 8 - 15 %	Landai	178,96
011. DAS TERAMANG	3). 15 - 25 %	Agak Curam	142,75
011. DAS TERAMANG	4). 25 - 40 %	Curam	82,15
011. DAS TERAMANG	5). > 40 %	Sangat Curam	36,24
012. DAS RETAK	1). 0 - 8 %	Datar	175,07
012. DAS RETAK	2). 8 - 15 %	Landai	69,65
012. DAS RETAK	3). 15 - 25 %	Agak Curam	25,96
012. DAS RETAK	4). 25 - 40 %	Curam	5,16
012. DAS RETAK	5). > 40 %	Sangat Curam	0,41
013. DAS MUAR	1). 0 - 8 %	Datar	154,09
013. DAS MUAR	2). 8 - 15 %	Landai	152,93
013. DAS MUAR	3). 15 - 25 %	Agak Curam	176,45
013. DAS MUAR	4). 25 - 40 %	Curam	167,81
013. DAS MUAR	5). > 40 %	Sangat Curam	118,66
014. DAS BULUH	1). 0 - 8 %	Datar	84,95
014. DAS BULUH	2). 8 - 15 %	Landai	31,43
014. DAS BULUH	3). 15 - 25 %	Agak Curam	6,55
014. DAS BULUH	4). 25 - 40 %	Curam	0,1
015. DAS RAMI	1). 0 - 8 %	Datar	127,89
015. DAS RAMI	2). 8 - 15 %	Landai	73,8
015. DAS RAMI	3). 15 - 25 %	Agak Curam	26,76
015. DAS RAMI	4). 25 - 40 %	Curam	4,89
015. DAS RAMI	5). > 40 %	Sangat Curam	0,18

Tabel 2.14 Luas Kemiringan masing-masing kelas lereng di WS Teramang Muar

9. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di WS Terawang Muar didominasi oleh Kawasan Fungsi Lindung sebesar 3.466,73 Km² (65,10%) dan sisanya berupa Kawasan Fungsi Budidaya sebesar 1.858,65 Km² (34,90%). Tata guna lahan eksisting Tahun 2007 per DAS di WS Terawang Muar diuraikan pada Tabel 2.15 Sedangkan peta tata guna lahan eksisting Tahun 2007 diperlihatkan pada Gambar 13. sebagai berikut

NAMA DAS	KAWASAN FUNGSI LINDUNG					KAWASAN FUNGSI BUDIDAYA									Total Kawasan Fungsi Budidaya
	Sungai	Hutan Alam	Hutan Lahan Kering	Danau / Maduk / Situ	Total Kawasan Fungsi Lindung	Pematihan	Perkebunan	Kebun Campuran	Sawah	Tambak/Empanng	Tegalan / Ladang	Semak / Belukar	Tanah Terbuka		
001 DAS IMPUNJUNTO	11,48	485,55	-	-	497,04	34,90	48,63	23,45	31,88	-	170,16	42,03	2,38	353,14	850,18
002 DAS SLAGAN	7,42	271,93	31,22	0,24	310,81	21,83	12,41	13,75	7,70	-	319,42	34,83	0,61	410,66	720,87
003 DAS LAGAN	-	-	21,09	0,65	21,74	0,61	27,51	1,58	-	-	5,84	5,08	0,28	41,00	62,74
004 DAS DINT	6,23	839,38	19,56	3,78	859,94	6,39	9,48	129,25	10,48	-	55,91	22,17	4,03	228,72	1.088,66
005 DAS PELATUN BEDANG	-	-	-	-	-	1,34	-	0,62	-	-	1,54	2,93	-	6,43	6,43
006 DAS BAKAL KEOL	-	-	0,39	-	0,39	2,75	-	3,48	-	-	4,58	3,89	-	14,71	15,11
007 DAS BANTAL	-	-	0,03	-	0,03	2,20	-	-	-	-	0,93	0,61	-	3,14	3,17
008 DAS BAKAL BEDANG	-	-	4,38	-	4,38	1,03	-	7,44	-	-	5,64	0,83	-	14,94	19,32
009 DAS PNANG	-	-	2,88	-	2,88	3,26	-	-	-	-	4,63	0,66	-	8,55	11,43
010 DAS SEBLAT	5,53	288,45	12,20	-	286,19	5,98	-	9,89	-	-	68,14	23,38	1,25	98,76	485,95
011 DAS TERAWANG	7,83	375,17	189,33	-	481,53	27,17	-	31,07	0,88	0,88	140,45	30,38	16,84	248,77	738,38
012 DAS RETAK	8,94	114,58	84,05	-	189,17	23,34	-	-	11,24	4,28	51,17	0,97	4,96	95,96	276,13
013 DAS MLAR	8,32	885,03	39,15	-	843,48	32,83	-	19,48	2,57	-	68,43	15,68	4,76	128,58	778,85
014 DAS BULLH	-	-	28,39	-	28,39	13,02	9,88	38,95	0,38	-	41,63	-	3,65	94,78	123,17
015 DAS RAMI	2,85	72,81	45,10	-	119,76	18,68	8,29	47,90	-	-	38,35	11,93	0,98	114,13	233,88
LUAS PENGGUNAAN LAHAN WS. AZAH TERAWANG IPUH (Km ²)	48,88	3.852,71	388,35	4,67	3.466,73	192,74	95,98	314,17	63,85	5,14	952,32	194,72	38,73	1.858,65	5.325,37
	1,41%	84,86%	16,38%	0,13%	100,00%	18,37%	5,16%	16,98%	3,44%	0,28%	58,24%	10,48%	2,14%	100,00%	-
	0,92%	57,32%	4,77%	0,09%	85,10%	3,82%	1,80%	5,98%	1,20%	0,10%	47,88%	3,68%	0,75%	34,90%	100,00%

Sumber : Subdit Perencanaan WS, Direktorat EPSDA, Ditjen. SDA, Kementerian PU, Tahun 2009

Tabel 2.15 Tata guna Lahan Eksisting Tahun 2007 Per DAS di WS Terawang Muar

10. Klimatologi

WS Teramang Muar, berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan ferguson, termasuk kedalam tipe iklim B, yaitu jumlah bulan basah dalam setahun lebih banyak dari bulan kering. Bulan basah memiliki curah hujan lebih besar dari 100 mm, sedangkan bulan kering memiliki curah hujan kurang dari 60 mm. Musim hujan umumnya jatuh pada bulan Oktober sampai dengan bulan Mei.

Suhu udara rata-rata harian berkisar antara 270C – 310C. Sedangkan kelembaban udara relatif berkisar antara 80% -87%. Gambaran kondisi iklim daerah studi dapat dilihat dari hasil pencatatan stasiun klimatologi yang ada di daerah studi adalah sebagai berikut :

- Suhu udara rata-rata : 270C – 310C
- Kelembaban udara rata-rata : 80% - 87%.
- Kecepatan angin rata-rata : 30 – 50 km/hari
- Sinar Matahari : 3% - 65 %
- Curah hujan : 2.810 mm/tahun

Stasiun Klimatologi yang terdapat di WS Teramang Muar adalah Stasiun Pondok Panjang yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tingkat I Bengkulu Tahun 1982. Sementara stasiun lain sebagai pembanding adalah Stasiun Air Seblat yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Bengkulu Tahun 1978.

Stasiun Pondok Panjang terletak di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada posisi 02026'07" LS - 101011'43.9" BT dengan elevasi di atas muka laut + 23 m, Sedangkan Stasiun Air Seblat terletak di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara pada posisi 03014'33.9" LS - 101037'35,8" BT dengan elevasi di atas muka laut + 16 m.

11. Curah hujan

Ketersediaan data curah hujan di WS Teramang Muar disajikan pada Tabel berikut ini.

NO.	STASIUM	TAHUN																													
		79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
1	Lalang Luas	[Data missing]																													
2	Pondok Panjang	[Data missing]																													
3	ujung Padang	[Data missing]																													
4	Jatnjing	[Data missing]																													
5	Pondok Kapi	[Data missing]																													
6	Penarik	[Data missing]																													
7	Medan Jaya	[Data missing]																													
8	Dusun Pulau	[Data missing]																													

Tabel 2.16. Ketersediaan Data Curah Hujan

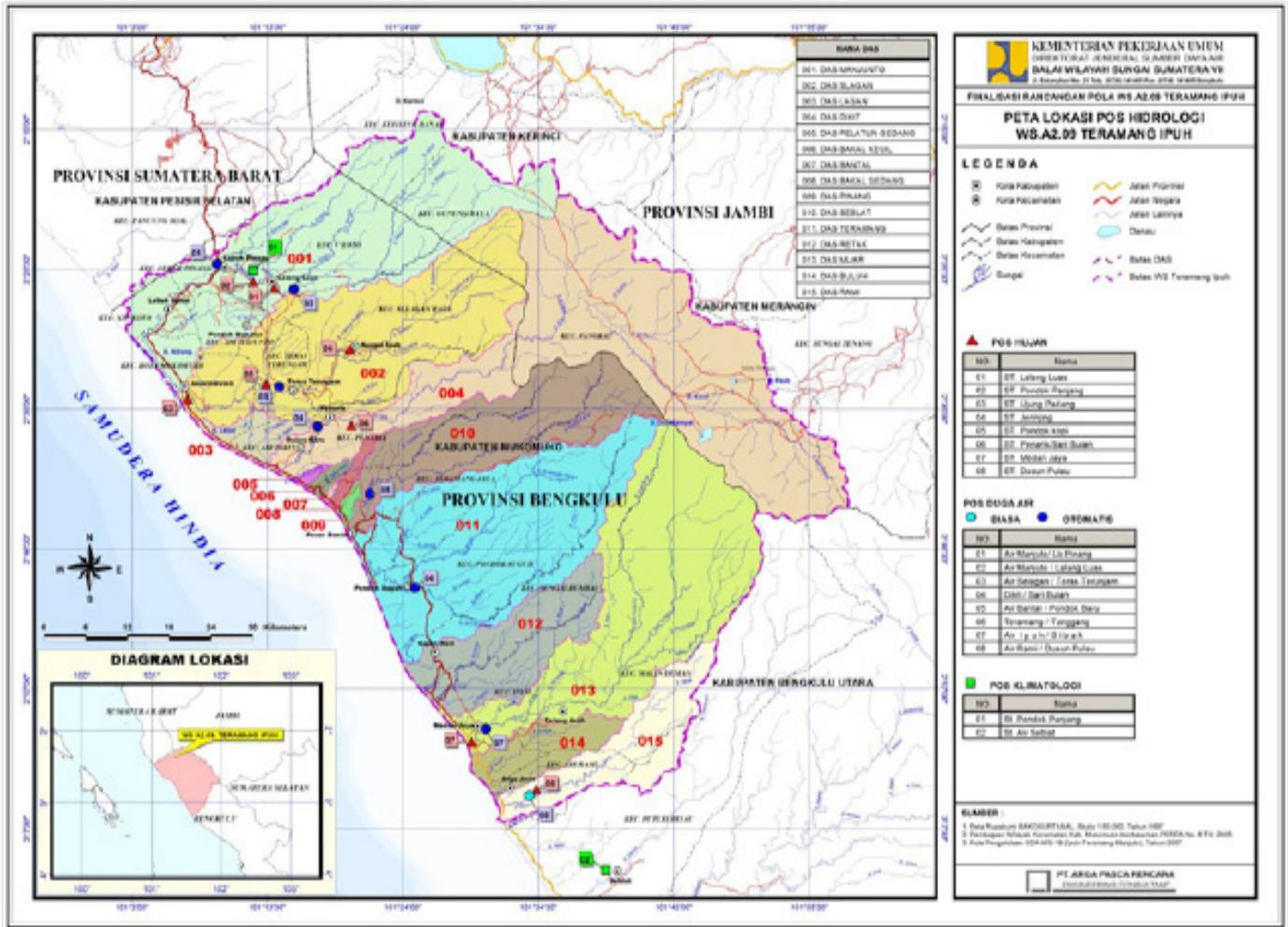
12. Debit

Di dalam WS Teramang Muar terdapat beberapa pos pengamatan debit sungai. Jumlah pengamatan data debit harian di setiap stasiun debit di WS Teramang Muar memiliki kurang dari 10 tahun data dan memiliki data debit harian yang tidak kontinyu. Ketersediaan data debit di WS Teramang Muar disajikan pada Tabel 2.17.

Peta lokasi pos hidrologi diperlihatkan pada Gambar berikut ini.

NO.	STASIUN	TAHUN															
		95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	Air Majunto-Lubuk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Majunto-Lalang Luas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Air Selagan-Teras	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Dikit-Sari Bulan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Air Bantal-Pondok Baru	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Teramang-Tunggang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Ipuh-Sibak Muko-Muko	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Air Rami-Ds. Pulau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tabel 2.17 Ketersediaan Data Debit



Gambar 2.12 Peta Lokasi Pos Hidrologi WS Teramang Muar

13. Hidrogeologi

Di daerah WS Teramang Muar yang telah diuraikan sebelumnya terdiri atas beberapa variasi batuan penyusun yang berbeda, sehingga akan membentuk sistem litologi akuifer (lapisan pengandung air tanah) yang berbeda pula. Berdasarkan karakteristik tersebut, sistem litologi akuifer, keterdapatan air tanah, dan produktivitas akuifer di daerah WS Teramang Muar dapat diketahui.

Bagian puncak jajaran gunung api strato merupakan daerah tangkapan hujan, dimana aliran permukaan lebih dominan, sehingga digolongkan sebagai daerah air tanah langka. Secara alami air tanah yang mulai terbentuk di bagian puncak tersebut serta bagian tubuh gunung, akan mengalir menyebar ke arah kaki gunung, sehingga produktivitas akuifer di daerah gunung api strato secara berangsur akan semakin meninggi ke arah kaki gunung. Daerah sekitar Mukomuko Utara dan Selatan merupakan daerah prospektif kandungan air tanahnya, mengingat daerah tersebut merupakan daerah resapan sehingga air tanah akan terkumpul di daerah tersebut, disamping itu sesar Sumatera yang bertindak sebagai penyalur air tanah memberikan sumbangan bagi terkumpulnya sumber air tanah di daerah resapan tersebut.

Menurut Azwar dkk (1984) berdasarkan pendugaan geolistrik di sekitar Mukomuko kemungkinan adanya akuifer tertekan berupa batu pasir. Konglomeratan pada kedalaman 20 - 50 meter dengan tebal 15 - 30 meter, akuifer tersebut dialasi oleh batu lempung di bagian bawahnya dan tufa sebagai lapisan penutup. Akuifer dangkal di daerah dataran umumnya kurang produktif melihat pada litologi batuan akuifernya yang bersifat lempungan dan tidak menerus, serta pelamparan vertikalnya yang tipis. Purdo Hadiwidjojo dan Tjahjadi (1981), menyatakan bahwa akuifer terpenting di Kabupaten Bengkulu Utara adalah batu pasir dengan kedalaman akuifer bervariasi, debit diperkirakan kurang dari 2 lt/det.

1) Sistem akuifer

a) Berdasarkan sistem litologi dan jenis kekasarannya sistem akuifer di WS Teramang Muar dapat dibagi menjadi:

- Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (Intergranular);
- Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan rekahan (Intergranular dan rekahan);
- Sistem akuifer dengan aliran melalui rekahan (Fracture).

b) Berdasarkan sistem produktivitas akuifernya, maka sistem akuifer dapat diketahui sebagai berikut:

- Sistem akuifer produktif dengan penyebaran luas debit > 5 lt/det;
- Sistem akuifer sedang dengan penyebaran luas debit < 5 lt/det;
- Sistem akuifer setempat dengan produktivitas sedang luas debit < 1 lt/det;

c) Berdasarkan sistem keterkaitan antara morfologi dan keberadaan air tanah dapat dibagi menjadi :

- Mandala air tanah dataran, dimana hampir 70% daerah WS Teramang Muar di tempati oleh mandala air tanah dataran ini.
- Mandala air tanah perbukitan, dimana menempati 30% dari seluruh daerah WS Teramang Muar. Tepatnya sepanjang pegunungan bukit barisan membentang dengan arah barat laut tenggara.

2) Air Tanah

Air tanah adalah air yang terdapat dibawah tanah mengalir secara gravitasi mengikuti bentuk topografi. Air tanah disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) daerah zona yaitu zona tidak jenuh (zona aeration) dan zona jenuh (zona of saturation). Air tanah zona tidak jenuh adalah air tanah yang sebagian dipengaruhi oleh air permukaan dan lainnya dipengaruhi oleh air tanah dalam. Air tanah ini biasanya dipakai oleh penduduk setempat untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan keluarga dalam bentuk sumur gali.

3) Zona air bawah tanah

Berdasarkan data pengamatan lapangan dan peta hidrologi Indonesia, maka secara umum kondisi air tanah di daerah Kabupaten Mukomuko terdapat pada akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir dapat dibedakan menjadi yaitu:

- Zona-I

Merupakan zona akuifer dengan aliran celahan dan antar ruang butir dengan tingkat produktivitas sedang dan penyebaran cukup luas, merupakan akuifer dengan keterusan beragam dan kisaran kedalaman muka air tanah umumnya dalam dan debit sumur umumnya kurang dari 5 (lima) lt/det. Penyebaran zona ini dibagian utara dan timur daerah pemetaan yaitu sekitar Desa Sari Bulan, Tenggara Desa Dusun Baru, dan Desa Betia Budi. Kedalaman muka air tanah pada elevasi antara 20 - 100 meter diatas muka air laut, sedangkan kedalaman sumur gali penduduk antara 8 - 15 meter.

Litologi batuan pada zona ini merupakan material lepas, aluvial lepas batu pasir halus, lempungan, batu lempung tufaan dan endapan rawa. Pemanfaatan lahan pada zona ini merupakan kawasan pemukiman, perkebunan sawit, dan semak belukar.

- Zona-II

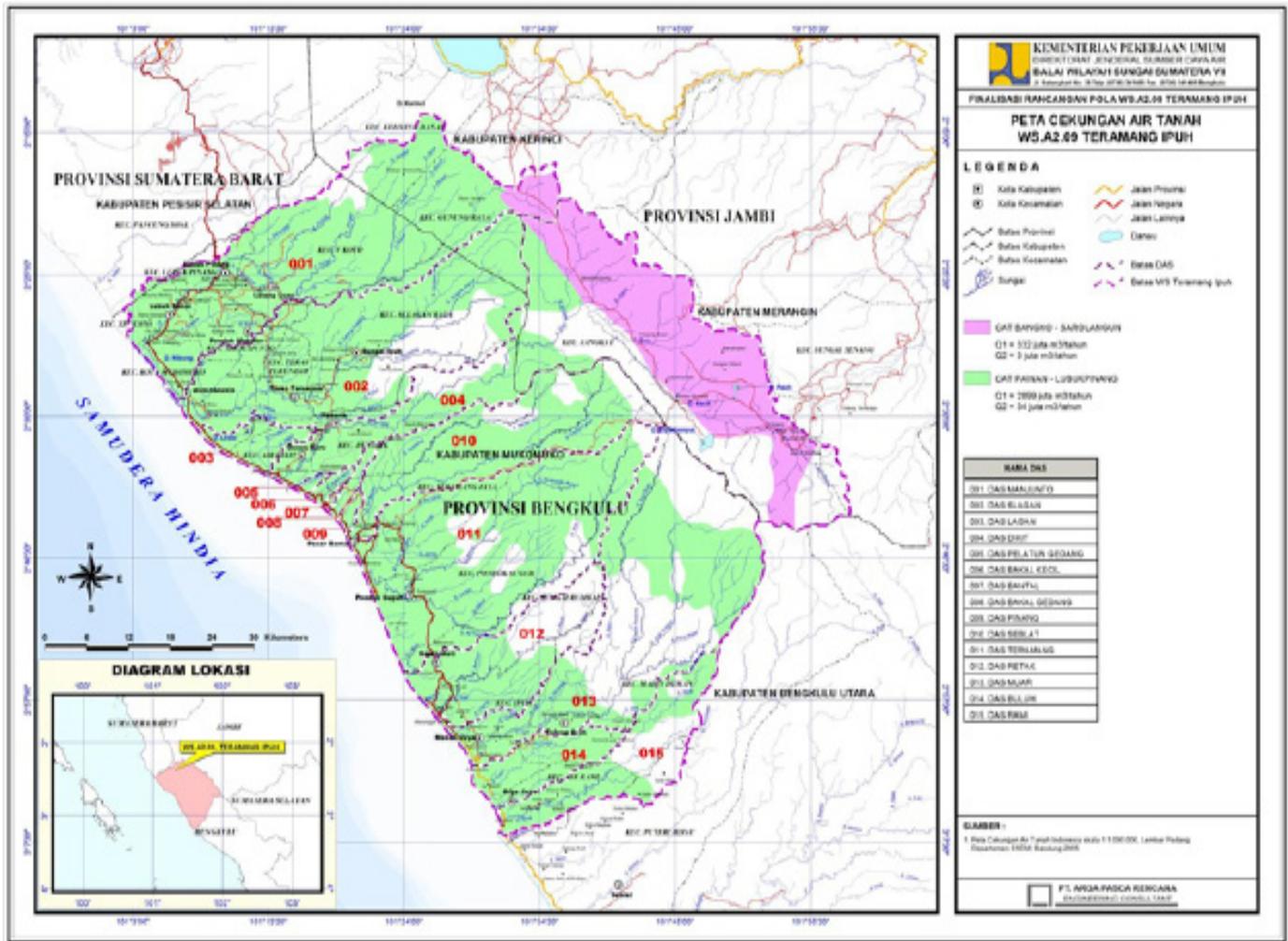
Merupakan zona akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti merupakan akuifer dengan keterusan yang sangat rendah. Kedalaman muka air tanah umumnya dangkal terutama pada zona pelapukan, debit air umumnya kecil dengan debit rata-rata kurang dari lima (< 5 lt/det). Penyebaran zona ini dibagian barat daerah pemetaan yaitu; Desa Air Dikit, Desa Dusun Baru, Desa Pondok Lunang dan Desa Tanah Rekah, sumur gali penduduk antara 3 - 6 meter.

Litologi batuan pada zona ini merupakan pelapukan batuan gunung api, pasir halus - kasar Tufaan, kompak, batuan lempung tufaan, napal (gamping). Pemanfaatan zona ini sebagai perkebunan kelapa sawit dan pemukiman penduduk. Peta hidrogeologi diperlihatkan pada Gambar 15. dan peta cekungan air tanah diperlihatkan pada Gambar 16. Perkiraan perhitungan potensi air tanah didasari oleh besarnya curah hujan, koefisien resapan pada batuan, dan hujan tahunan yang diperlihatkan pada tabel berikut ini.

No.	Nama DAS	Volume Resapan (m ³ /Tahun)
1	MANJUNTO	27.977.000
2	SLAGAN	20.734.000
3	LAGAN	191.000
4	DIRIT	19.064.000
5	PELATUN GEDANG	171.000
6	BAKAL KECIL	400.000
7	BANTAL	84.000
8	BAKAL GEDANG	512.000
9	PINANG	303.000
10	SEELAT	1.185.000
11	TERAMANG	15.491.000
12	RETAK	5.585.000
13	MUAR	14.735.000
14	BULUH	3.071.000
15	RAMI	5.063.000
	TOTAL	115.563.000

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011

Tabel 2.18 Volume Resapan/Imbuhan WS Teramang Muar



Gambar 2.14 Peta Cekungan Air Tanah WS Teramang Muar

14. Erosi

Kondisi hutan di WS Teramang Muar terus mengalami kerusakan dari waktu ke waktu. Faktor penyebab utama adalah kegiatan eksploitasi kayu di hutan alam. Faktor lainnya yang ikut berperan adalah kegiatan perladangan di kawasan hutan. Kerusakan hutan tersebut telah menimbulkan beberapa dampak negatif seperti menurunnya potensi sumberdaya hutan, rusaknya ekosistem hutan, mengeringnya sumber-sumber air yang tercermin dari mengeringnya sungai-sungai di musim kemarau dan meluapnya aliran sungai di musim hujan serta semakin bertambahnya lahan kritis.

Dalam kurun waktu Tahun 2000 – 2005 laju deforestasi yang terjadi sudah mencapai angka sebesar 1,08 juta Ha/tahun, dilain pihak laju rehabilitasi hanya sebesar 500.000 Ha/tahun. Di sini terlihat bahwa kegiatan rehabilitasi hutan yang telah dilakukan selama ini sangat tidak sebanding dengan laju deforestasi yang terjadi. Di sisi lain bisa kita lihat juga bahwa tingkat keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan, selama ini tingkat keberhasilan tanaman maksimal hanya 20 %.

Berdasarkan uraian diatas dapat diprediksi bahwa kondisi hutan di WS Teramang Muar akan mengalami kerusakan di waktu- waktu mendatang. Hal ini berarti akan meningkatkan nilai faktor penutupan tumbuhan (C) yang selanjutnya akan meningkatkan besarnya erosi. Penghitungan peningkatan jumlah erosi akibat kerusakan hutan ini dilakukan dengan pendekatan pustaka melalui kajian hasil penelitian yang relevan. Tingkat Erosi di WS Teramang Muar Tahun 2011 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Kode DAS	Nama DAS	Luas DAS (Ha)	Erosi (ton/ha/th)	Tingkat Bahaya Erosi
1.	Manjunto	85.039	0,187	Sangat Ringan
2.	Slagen	72.088	150,343	Sedang
3.	Lagan	6.265	362,368	Sangat Berat
4.	Dikit	108.868	2,053	Sangat Ringan
5.	Pelatun Gedang	644	291,968	Sangat Berat
6.	Bakal Kecil	1.509	291,968	Sangat Berat
7.	Bantal	317	291,968	Sangat Berat
8.	Bakal Gedang	1.932	408,755	Sangat Berat
9.	Pinang	1.142	291,968	Sangat Berat
10.	Seblat	40.594	2,053	Sangat Ringan
11.	Teramang	73.826	0,164	Sangat Ringan
12.	Retak	27.614	0,126	Sangat Ringan
13.	Muar	77.006	0,632	Sangat Ringan
14.	Euluh	12.312	82,188	Sedang
15.	Rami	23.381	82,188	Sedang

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011

Tabel 2.19 Tingkat Erosi di WS Teramang Muar Tahun 2011

15. Sedimentasi

Tingkat sedimentasi di suatu DAS umumnya berbanding lurus dengan tingkat erosi di daerah tersebut. Tingkat sedimentasi di WS Teramang Muar disajikan pada Tabel berikut ini.

Kode DAS	Nama DAS	Tingkat Sedimentasi (ton/ha/th)
1.	Manjuntio	0,016
2.	Slagan	12,779
3.	Lagan	54,355
4.	Dikit	0,175
5.	Pelaton Gedang	70,072
6.	Bakal Kecil	78,831
7.	Bantal	70,072
8.	Bakal Gedang	98,101
9.	Pinang	70,072
10.	Seblat	0,175
11.	Teramang	0,014
12.	Retak	0,014
13.	Muar	0,054
14.	Buluh	10,684
15.	Rami	9,041

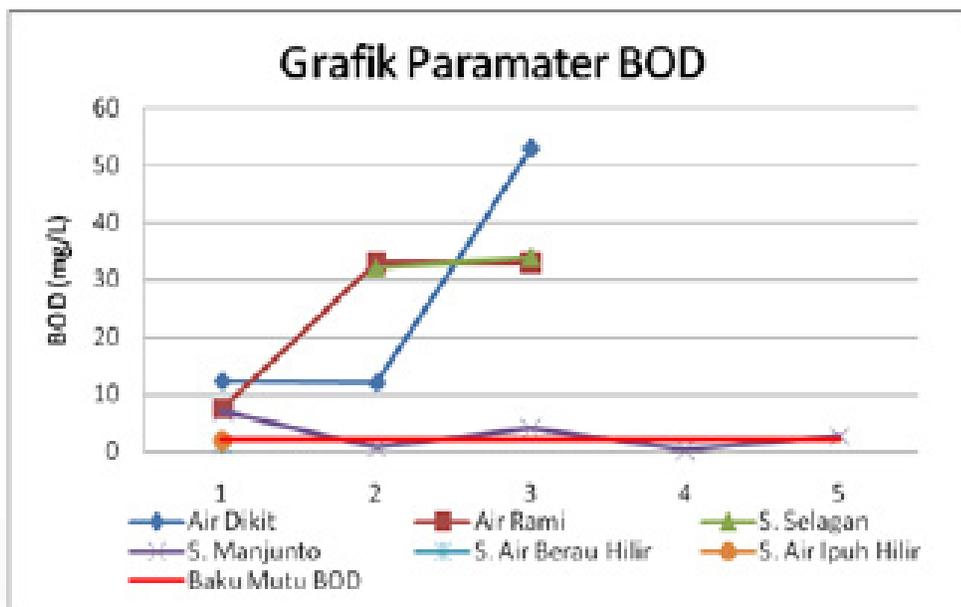
Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011

Tabel 2.20 Tingkat sedimentasi WS Teramang Muar Tahun 2011

16. Kualitas Air

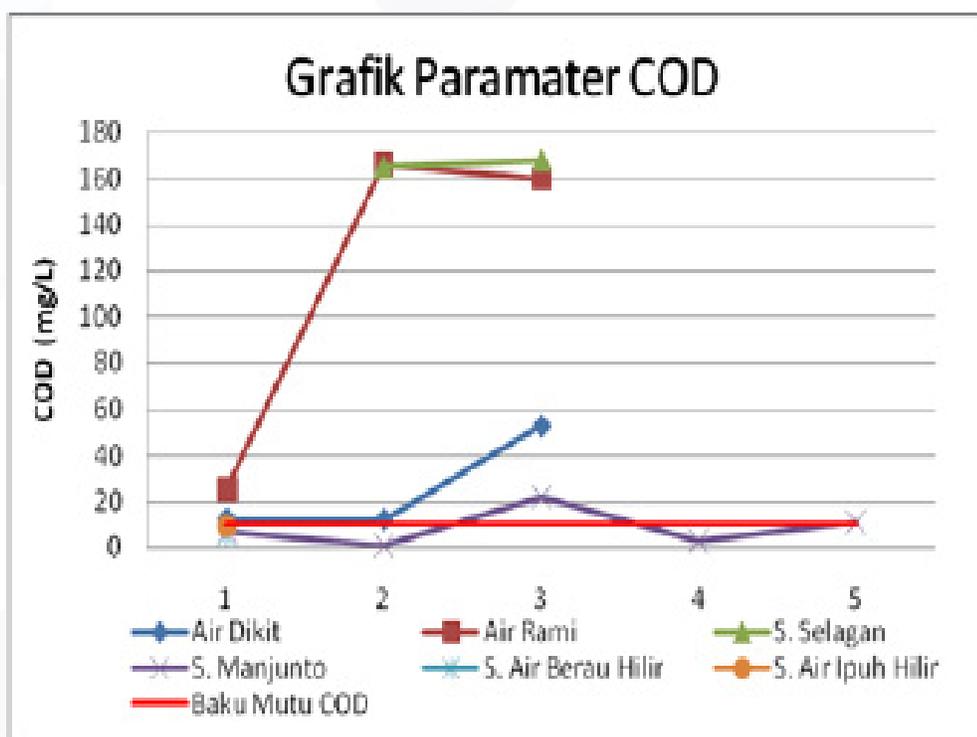
Dalam melakukan analisa kualitas air, akan dilakukan analisa terhadap parameter kunci yaitu parameter kualitas air yang dianggap mewakili kondisi kualitas air secara keseluruhan dan bisa menunjukkan apakah kondisi kualitas air tersebut sudah mengalami pencemaran atau belum.

Berikut ini analisa untuk masing-masing parameter di sungai yang ada di WS Teramang Muar berdasarkan data kualitas air yang ada. Diperlihatkan juga grafik parameter Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan Dissolved Oxygen (DO) pada gambar-gambar di bawah ini.



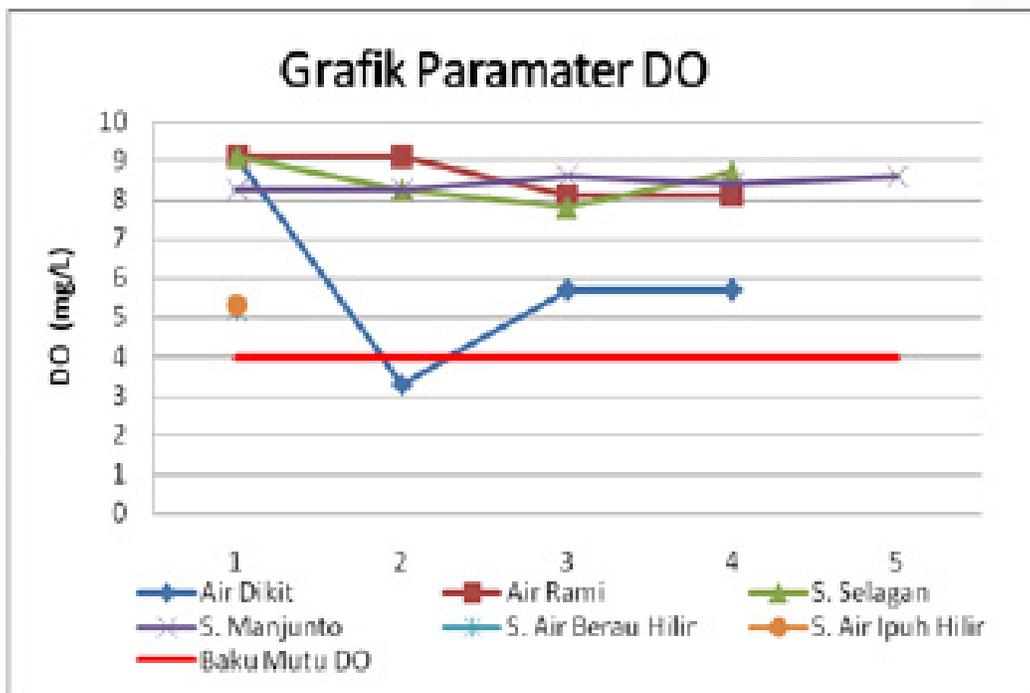
Gambar 2.15 Grafik Parameter BOD Sungai di WS Teramang Muar

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa hampir semua nilai BOD diatas Baku Mutu yang ditetapkan (2 mg/L). Hal tersebut menunjukkan bahwa air sungai sudah mengalami pencemaran yang berasal dari limbah domestik maupun non domestik.



Gambar 2.16 Grafik Parameter COD Sungai di WS Teramang Muar

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa hampir semua nilai COD diatas Baku Mutu yang ditetapkan (10 mg/L). Hal tersebut menunjukkan bahwa air sungai sudah mengalami pencemaran. Pencemaran tersebut bisa dari limbah domestik maupun non domestik.



Gambar 2.17 Grafik Parameter DO Sungai di WS Terawang Muar

17. Data Kebutuhan Air

- Irigasi

Kebutuhan air irigasi dihitung berdasarkan pedoman Kriteria Perencanaan Irigasi (KP-01), yaitu berdasarkan curah hujan efektif, evapotranspirasi, perkolasi, pola dan jadwal tanam (diasumsikan padi-padi-palawija). Kebutuhan air irigasi di WS Terawang Muar diuraikan pada Tabel 2.21

No.	DAS	Luas Areal (ha)		Kebutuhan air (m ² /s)	
		Fungsional	Potensial	Fungsional	Potensial
1	MANJUNTO	4.022	7.703	3,569	6,835
2	SLAGAN	1.905	2.510	1,690	2,227
3	LAGAN				-
4	DIKIT	79	167	0,070	0,148
5	PELATUN GEDANG	-	-		
6	BAKAL KECIL			-	-
7	BANTAL	15	20	0,013	0,018
8	BAKAL GEDANG				-
9	PINANG				-
10	SEBLAT				-
11	TERAMANG	370	782	0,328	0,694
12	RETAK				-
13	MUAR	460	640	0,408	0,568
14	BULUH	80	150	0,071	0,133
15	RAMI	50	150	0,044	0,133
	TOTAL	6.981	12.122	6,195	10,756

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011

Tabel 2.21 Kebutuhan Air Irigasi di WS Teramang Muar

- Air Rumah Tangga Perkotaan dan Industri (RKI)
Kebutuhan air RKI di WS Teramang Muar pada saat ini disuplai dari air PDAM, mata air, air tanah, dan sumber-sumber air lainnya. Tingkat pelayanan PDAM di WS masih terbilang sangat rendah, dan diharapkan tingkat pelayanan PDAM tersebut dapat terus meningkat seiring dengan bertambahnya bangunan-bangunan prasarana Sumber Daya Air di WS.

Perhitungan kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri, dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks kebutuhan air sesuai dengan Pedoman Perencanaan Sumber Daya Air WS (Ditjen Sumber Daya Air, 2004).

Kebutuhan Air Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri (RKI) di WS Teramang Muar tercantum pada Tabel 2.22

No.	Nama DAS	Jml Penduduk (Jiwa) Tahun 2011	Air Rumah Tangga Perkotaan		Air Industri		Kebutuhan Air Rumah Tangga Perkotaan & Industri (RKI)	
			Kriteria	Kebutuhan	Kriteria	Kebutuhan	(L/Hari)	(L/detik)
			L/O/Hari	L/Hari	L/O/Hari	L/Hari		
1	MANJUTO	90.441	230	20.801.430	30	2.713.230	23.514.660	272,16
2	SLAGAN	30.237	230	6.954.510	30	907.110	7.861.620	90,99
3	LAGAN	3.941	230	906.430	30	118.230	1.024.660	11,86
4	DIKIT	21.023	230	4.835.290	30	630.690	5.465.980	63,26
5	PELATUN GEDANG	418	230	96.140	30	12.540	108.680	1,26
6	BAKAL KECIL	782	230	179.860	30	23.460	203.320	2,35
7	BANTAL	105	230	24.150	30	3.150	27.300	0,32
8	BAKAL GEDANG	748	230	172.040	30	22.440	194.480	2,25
9	PINANG	376	230	86.480	30	11.280	97.760	1,13
10	SEBLAT	14.304	230	3.289.920	30	429.120	3.719.040	43,04
11	TERAMANG	25.127	230	5.779.210	30	753.810	6.533.020	75,61
12	RETAK	17.073	230	3.926.790	30	512.190	4.438.980	51,38
13	MUAR	20.341	230	4.678.430	30	610.230	5.288.660	61,21
14	BULUH	4.626	230	1.063.980	30	138.780	1.202.760	13,92
15	RAMI	4.322	230	994.060	30	129.660	1.123.720	13,01
Jumlah		233.864	-	53.788.720	-	7.015.920	60.804.640	703,76

Tabel 2.22 Kebutuhan Air Untuk Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri

- **Peternakan**
Kebutuhan air untuk peternakan di WS Teramang Muar pada Tahun 2011 disajikan pada Tabel 2.23 dan Tabel 2.24

No.	Nama DAS	Kebutuhan Air (L/Ekor/Hari)	Kebutuhan Air Tahun 2011				
			Ternak (Ekor)		Kebutuhan Air (L/Hari)		Total
			Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	
1	MANJUNTO	40	17169	8329	686760	138160	819920
2	SLAGAN		15814	2909	632560	116360	748920
3	LAGAN		2703	448	108120	17820	126040
4	DIKIT		3518	1919	140720	78760	219480
5	PELATUN GEDANG		714	207	28560	8280	36840
6	BAKAL KECIL		1809	207	78060	8280	86340
7	BANTAL		1188	207	47400	8280	55680
8	BAKAL GEDANG		1724	207	68060	8280	77240

No.	Nama DAS	Kebutuhan Air (L/Ekor/Hari)	Kebutuhan Air Tahun 2011				
			Ternak (Ekor)		Kebutuhan Air (L/Hari)		Total
			Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	
9	PINANG		1185	207	47400	8280	55680
10	SEBLAT		2884	223	115360	8920	124280
11	TERAMANG		2345	223	93800	8920	102720
12	RETAK		2681	223	107240	8920	116160
13	MUAR		2681	8431	107240	337240	444480
14	BULUH		3214	8431	128560	337240	465800
15	RAMI		10825	8421	433000	336840	769840
Jumlah			70541	35592	2821640	1423680	4245320

Tabel 2.23 Kebutuhan Air Untuk Peternakan (Sapi dan Kerbau)

No.	Nama DAS	Kebutuhan Air (L/Ekor/Hari)	Kebutuhan Air Tahun 2011						
			Ternak (Ekor)			Kebutuhan Air (L/Hari)			Total
			Ayam Buras	Itik	Ayam	Ayam Buras	Itik	Ayam	
1	MANJUNTO		181704	15128	44558	79022	9077	26785	114834
2	ELAGAN		281409	19514	14156	138845	9368	8494	156707
3	LADAN		22402	65	500	18441	39	300	18780
4	DOKIT		88403	10892	40188	33043	6333	24113	83691
5	PELATUN GEDANG		44784	2735	300	26870	1641	300	28811
6	BAKAL KECIL		38407	2802	500	23044	1681	300	25025
7	BANTAL		18015	67	0	9609	40	0	9649
8	BAKAL GEDANG	0,8	35318	2737	0	21191	1842	0	23833
9	PINANG		18015	67	0	9609	40	0	9649
10	SEBLAT		67178	2788	0	84304	1670	0	85974
11	TERAMANG		87870	113	0	22722	68	0	22790
12	RETAK		18036	32	56	10823	19	35	10877
13	MUAR		18036	32	56	10823	19	35	10877
14	BULUH		37338	5	58	16403	5	35	16442
15	RAMI		31242	4	0	18745	2	0	18745
Jumlah			814158	63079	100576	488495	31847	60346	580688

Sumber : Hasil Analisa, Tahun 2011

Tabel 2.24 Kebutuhan Air Untuk Peternakan (Ayam dan Itik)

- Perikanan

Kebutuhan air untuk perikanan di WS Teramang Muar pada Tahun 2011 disajikan pada Tabel 2.25.

No.	Nama DAS	Kebutuhan Air (m ³ /Ha/Hari)	Kebutuhan Air Tahun 2011		
			Perikanan (Ha)	Kebutuhan Air (m ³ /hari)	Kebutuhan Air (L/hari)
1	MANJUNTO	8.000	285,77	2.286.160	2.286.160.000
2	SLAGAN		89,91	719,360	719.360.000
3	LAGAN		14,63	117,040	117.040.000
4	DIKIT		60,46	483,680	483.680.000
5	PELATUN GEDANG		1,64	13,120	13.120.000
6	BAICAL KECIL		2,48	19,840	19.840.000
7	BANTAL		0,23	1,840	1.840.000
8	BAICAL GEDANG		1,71	13,680	13.680.000
9	PINANG		0,84	6,720	6.720.000
10	SEBLAT		40,15	321,200	321.200.000
11	TERAMANG		107,96	863,680	863.680.000
12	RETAK		65,34	522,720	522.720.000
13	MUAR		41,23	489,840	489.840.000
14	BULUH		14,04	112,320	112.320.000
15	RAMI		13,32	122,560	122.560.000
	Jumlah		761,72	6.093,760	6.093.760.000

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011

Tabel 2.25 Kebutuhan Air Untuk Perikanan di WS Teramang Muar

No.	Nama DAS	Kebutuhan Air (L/dt/Ha)	Kebutuhan Air Tahun 2011		
			Kelapa Sawit (Ha)	Kebutuhan Air (L/dt)	Kebutuhan Air (L/hari)
1	MANJUNTO	0,9	57,924	62,132	4.504.170,240
2	SLAGAN		70,894	63,626	5.497.165,440
3	LAGAN		34,315	36,664	2.698.354,400
4	DIKIT		19,311	17,280	1.501.623,264
5	PELATUN GEDANG		15,141	13,626	1.177.325,264
6	BAICAL KECIL		26,695	24,017	2.075.025,600
7	BANTAL		5,150	4,636	400.464,000
8	BAICAL GEDANG		18,690	16,821	1.453.334,400
9	PINANG		23,393	21,054	1.819.039,680
10	SEBLAT		39,909	35,916	3.108.323,840
11	TERAMANG		44,612	40,151	3.469.029,120
12	RETAK		13,568	12,211	1.055.047,680
13	MUAR		13,568	12,211	1.055.047,680
14	BULUH		5,139	4,626	399.608,640
15	RAMI		29,050	24,145	2.258.928,000
	Jumlah		417,149	375,434	32.437.167,360

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011

Tabel 2.26 Kebutuhan Air Untuk Perkebunan di WS Teramang Muar

- Alur Pemeliharaan Sungai

Perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95% , yaitu aliran air (m³/detik) yang selalu tersedia dalam 95% waktu pengamatan, atau hanya paling banyak 5% kemungkinannya aliran tersebut tidak tercapai. Dalam hal debit andalan 95% tidak tercapai, pengelola sumber daya air harus mengendalikan pemakaian air di hulu.

Dengan demikian besarnya kebutuhan air untuk pemeliharaan sungai dihitung berdasarkan debit andalan Q95% dari data ketersediaan air yang ada. Pada Tabel 2.27 diperlihatkan kebutuhan aliran pemeliharaan sungai di WS Teramang Muar.

No.	Nama DAS	Q95%	
		m ³ /s	Juta m ³ /tahun
1	MANJUNTO	8,94	281,96
2	SLAGAN	1,85	58,44
3	LAGAN	0,33	10,44
4	DIKIT	4,26	134,46
5	PELATUN GEDANG	0,07	2,14
6	BAKAL KECIL	0,06	1,86
7	EANTAL	0,03	1,05
8	BAKAL GEDANG	0,08	2,39
9	PINANG	0,04	1,41
10	SEBLAT	4,27	134,59
11	TERAMANG	7,76	244,78
12	RETAK	2,90	91,56
13	MUAR	8,10	255,32
14	BULUH	1,10	34,82
15	RAMI	2,10	66,13
TOTAL		41,90	1.321,35

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011

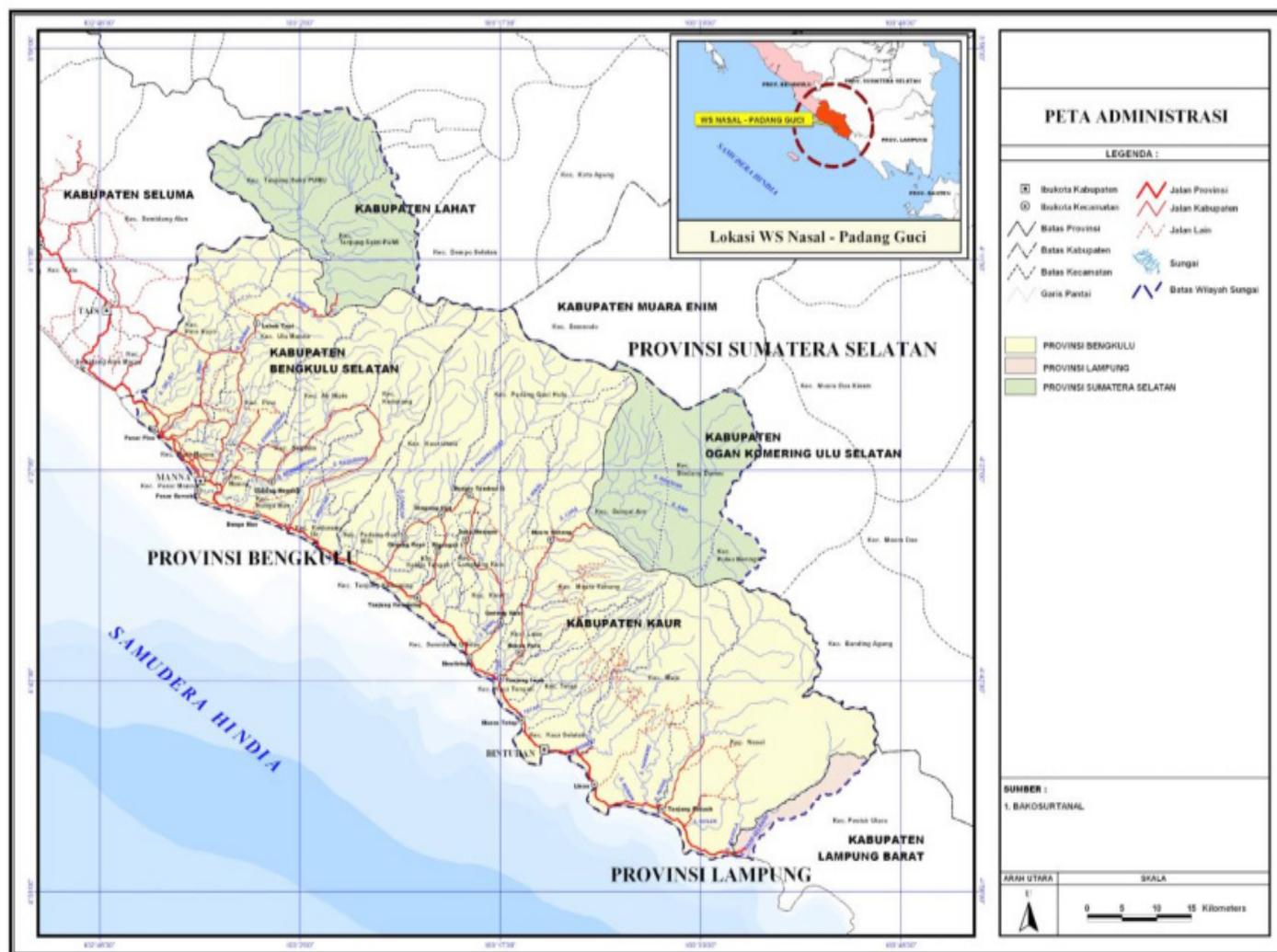
Tabel 2.27 Kebutuhan Air Untuk Aliran Pemeliharaan Sungai

b. Wilayah Sungai Nasal-Padang Guci (WS Nasal-Padang Guci)

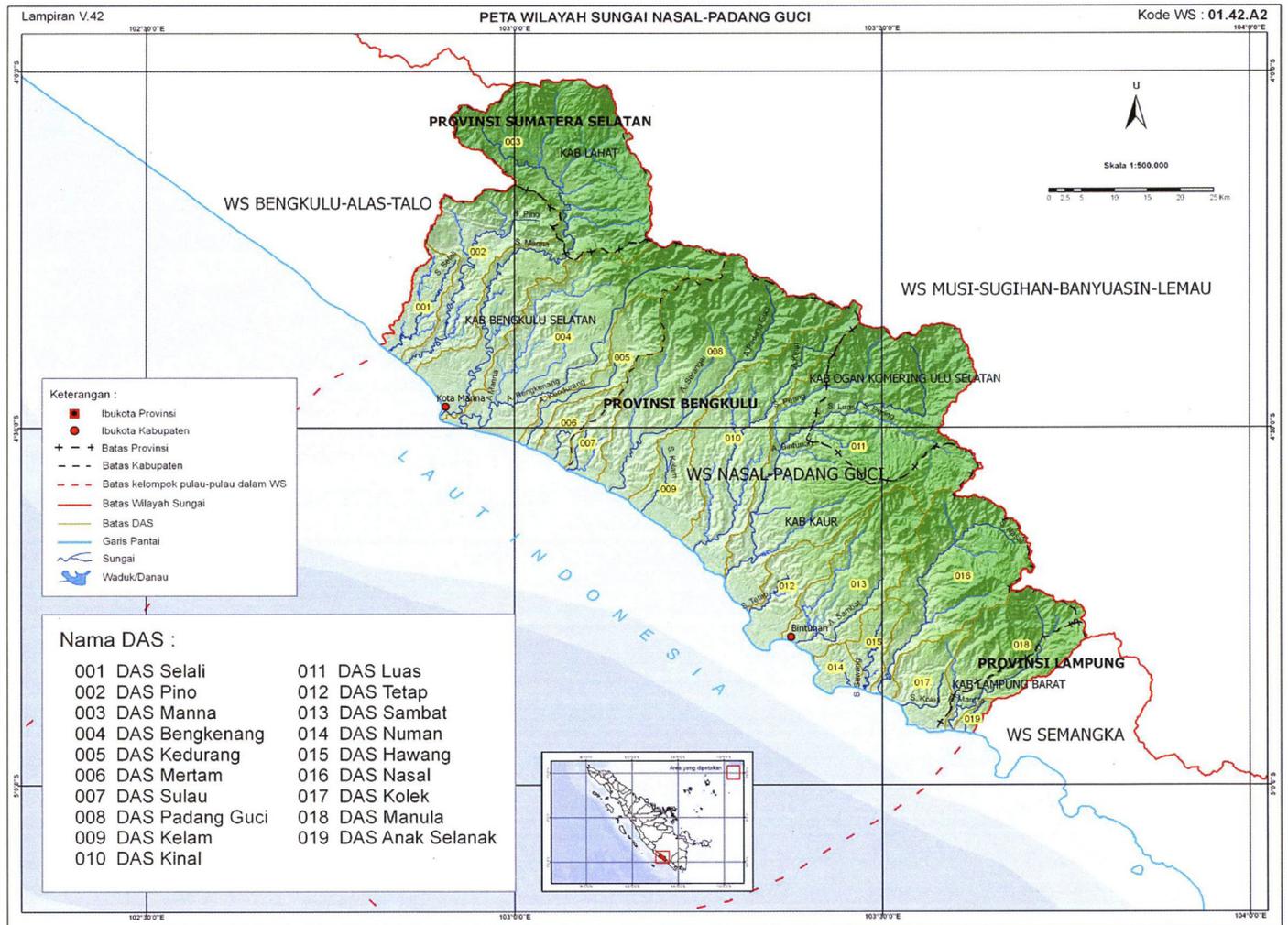
1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Secara geografis WS Nasal-Padang Guci terdiri atas beberapa wilayah administrasi yaitu 1. Provinsi Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur), 2. Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Barat) dan 3. Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Lahat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) pada posisi 102o48'52,7" BT - 103o47'35,3" BT dan 4o00'11,3" LS - 4o56'00,8" LS. Batas WS Nasal - Padang Guci sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Seluma (Provinsi Bengkulu), sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Peta lokasi administrasi WS Nasal-Padang Guci diperlihatkan pada Gambar 2.18

WS Nasal-Padang Guci mempunyai luas ± 4.811,62 Km2, dan terdiri dari 19 DAS yaitu DAS Selali, DAS Pino, DAS Manna, DAS Bengkenang, DAS Kedurang, DAS Mertam, DAS Sulau, DAS Padang Guci, DAS Kellam, DAS Kinal, DAS Luas, DAS Tetap, DAS Sambat, DAS Numan, DAS Hawang, DAS Nasal, DAS Kolek, DAS Manula, DAS Anak Selanak. Peta DAS WS ditampilkan pada peta Gambar 21 dan wilayah administrasi tersebut diatas diuraikan pada Tabel 2.28.



Gambar 2.18 Peta Administrasi WS Nasal-Padang Guci



Gambar 2.19 Peta DAS WS Nasal-Padang Guci

Provinsi /Kabupaten	No.	Kecamatan (Kec.)	Luas Wilayah Administrasi (Km ²)
<i>Provinsi Bengkulu</i>			
Kab. Bengkulu Selatan	1	Kec. Manna	53.17
	2	Kec. Bunga Mas	56.08
	3	Kec. Kota Manna	32.16
	4	Kec. Pasar Manna	5.84
	5	Kec. Kedurang	234.55
	6	Kec. Kedurang Ilir	58.2
	7	Kec. Segimin	61.52
	8	Kec. Air Nipis	203.28
	9	Kec. Pina	61.88
	10	Kec. Ulu Manna	236.92
	11	Kec. Pina Raya	223.5
Kab. Kaur	1	Kec. Nasal	519.92
	2	Kec. Maja	361.04
	3	Kec. Kaur Selatan	92.75
	4	Kec. Tetap	87.92
	5	Kec. Kaur Tengah	26.40
	6	Kec. Kinal	154.03
	7	Kec. Semidang Cunday	64.91
	8	Kec. Muara Bahung	256.00
	9	Kec. Luas	124.88
	10	Kec. Tanjung Kemuning	72.91
	11	Kec. Lumphang Kule	32.00
	12	Kec. Kaur Utara	49.80
	13	Kec. Padang Guci Hulu	370.64
	14	Kec. Padang Guci Hilir	115.96
	15	Kec. Kalam Tengah	35.84
<i>Provinsi Sumatera Selatan</i>			
Kab. Lahat	1	Kec. Tanjung Sakti Pumi	271.00
	2	Kec. Tanjung Sakti	229.59
		Pumu	
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	Kec. Pulau Beringin	47.65
	2	Kec. Sindang Dansu	21.00
	3	Kec. Sungai Are	29.65
<i>Provinsi Lampung</i>			
Kab. Lampung Barat	1	Kec. Pektar Utara	307.18

Sumber : BPS Kabupaten Terkait Tahun 2009

Tabel 2.28 Wilayah Administrasi di WS Nasal-Padang Guci

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pola ruang WS Nasal-Padang Guci didasarkan pada konsep RTRW Provinsi Bengkulu. Prinsip dasar dari pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam WS Nasal-Padang Guci adalah pengembangan ruang yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sekaligus menjaga keberlanjutannya. Penetapan kawasan lindung terutama dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan, dimana masyarakat pada dasarnya tidak memanfaatkan langsung bagian wilayah kawasan lindung tersebut. Sementara penetapan kawasan budidaya terutama dimaksudkan untuk pemanfaatan langsung oleh masyarakat guna meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya. Kendati demikian, dari pengalaman dan kebutuhan pengembangan selama ini, ada kemungkinan atau peluang untuk pemanfaatan langsung secara terbatas terhadap beberapa bentuk kawasan lindung. Sebaliknya, pada beberapa bentuk kawasan budidaya dituntut adanya pemanfaatan yang sekaligus tetap menjaga fungsi-fungsi konservasi atau fungsi perlindungan.

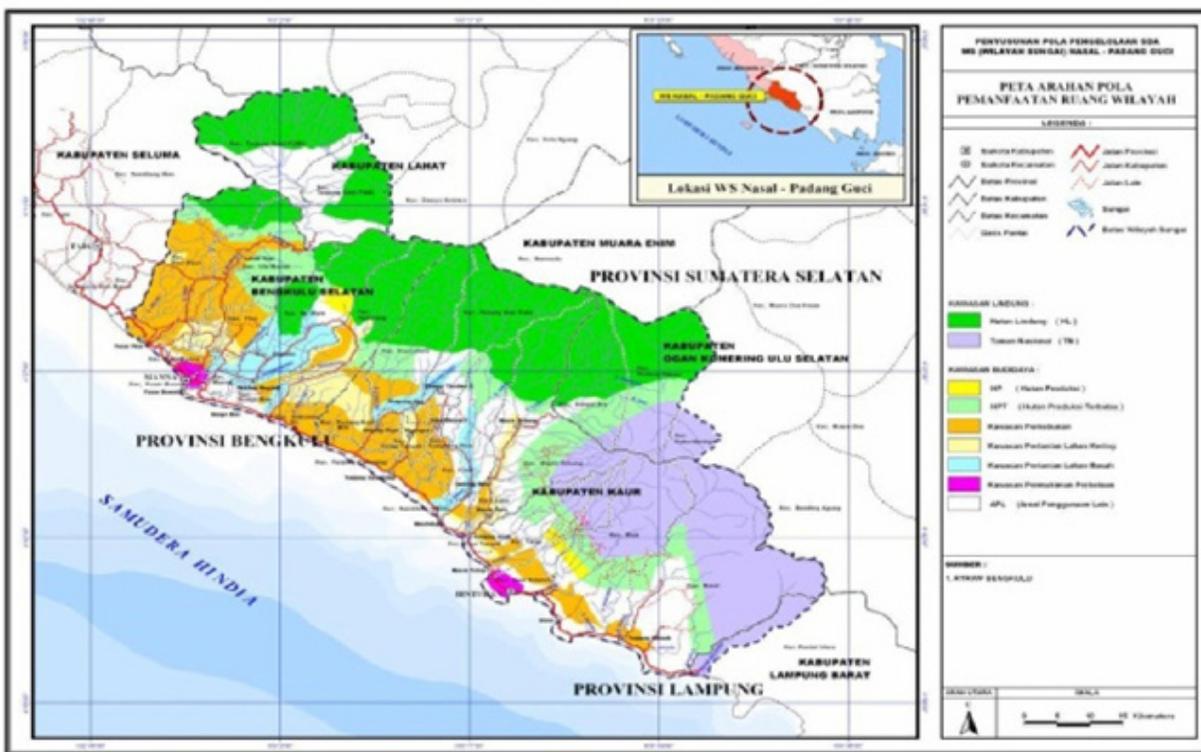
Dalam arahan pengelolaan kawasan lindung di WS Nasal-Padang Guci akan diuraikan :

- ☒ Fungsi utama perlingkungannya dan fungsi perlindungan tambahan atau ikutan yang merupakan ko-eksistensi ruang dengan kawasan lindung tersebut;
- ☒ Pengembangan pemanfaatan langsung yang dimungkinkan secara terbatas dalam kawasan lindung tersebut.

Arahan pengelolaan kawasan budidaya di WS Nasal-Padang Guci dapat dikelompokkan menurut :

- ☒ Kawasan hutan produksi, yang terdiri atas hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi khusus Pusat Latihan Gajah (PLG);
- ☒ Kawasan budidaya pertanian, yang terdiri atas kawasan perkebunan, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan pertanian lahan basah;
- ☒ Kawasan permukiman.

Arahan pola ruang WS Nasal – Padang Guci ditunjukkan pada peta yang tercantum pada Gambar 2.20



Gambar 2.20 Peta Arahan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

WS Nasal - Padang Guci, dalam RTRWN disusun Struktur Ruang Kota Manna dengan klasifikasi (I/C/1) dan Lahat dengan Klasifikasi (II/B). Dalam aturan struktur ruang yang diamanatkan oleh RTRWN, Kota Manna (ibukota Bengkulu Selatan) merupakan kota yang disiapkan dalam tahapan pengembangan untuk disiapkan revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional sebagai wilayah pengembangan dan peningkatan fungsi. Sedangkan Kota Lahat disiapkan sebagai kota pendorong pengembangan kota-kota sentra produksi. Rencana pengembangan untuk kota-kota di WS Nasal - Padang Guci menjadikan acuan kegiatan yang akan berkembang dan mempengaruhi Pola pengelolaan sumber daya air pada WS Nasal - Padang Guci.

Tata Ruang WS Nasal - Padang Guci

Bila melihat struktur ruang, WS Nasal - Padang Guci berada di Wilayah Pengembangan Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan, Wilayah Pengembangan Bintuhan di Kabupaten Kaur, sebagian Kabupaten Lahat, sebagian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Lampung Barat. Ditinjau dari Wilayah Eksternal Provinsi Bengkulu bahwa WS Nasal - Padang Guci memiliki Simpul Pusat di Kota Manna (Kabupaten Bengkulu Selatan), Bintuhan (Kabupaten Kaur), Lahat (Kabupaten Lahat), Muara Dua (Kabupaten OKU Selatan), dan Liwa (Kabupaten Lampung Barat).

1. Wilayah Pengembangan (WP) Manna

WP Manna dengan pusatnya simpul Manna, mencakup wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol pada WP ini adalah : pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman perkebunan dan perdagangan dan jasa antar wilayah. Kegiatan perekonomian yang potensial di masa datang antara lain : peternakan, perikanan laut, perikanan darat, pariwisata dan rekreasi, pertambangan, industri (pengolahan produk pertanian).

2. Wilayah Pengembangan (WP) Bintuhan

WP Bintuhan dengan pusat simpul Bintuhan, mencakup wilayah Kabupaten Kaur, yang merupakan daerah otonom yang relatif baru. Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol pada WP ini adalah pertanian perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Kegiatan perekonomian yang potensial dimasa datang antara lain: perikanan laut, peternakan, pariwisata dan rekreasi, perdagangan dan jasa intra dan antar wilayah, dan pertambangan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Bengkulu, wilayah yang masuk dalam Sistem WS Nasal - Padang Guci sesuai dengan penetapannya, Kota Manna ditetapkan sebagai PKW kemudian Kota Bintuhan ditetapkan sebagai fungsi PKL. Dihubungkan dengan penetapan Wilayah Pengembangan (WP) di depan, maka pusat-pusat WP tersebut ditetapkan fungsinya dalam sistem pusat perkotaan.

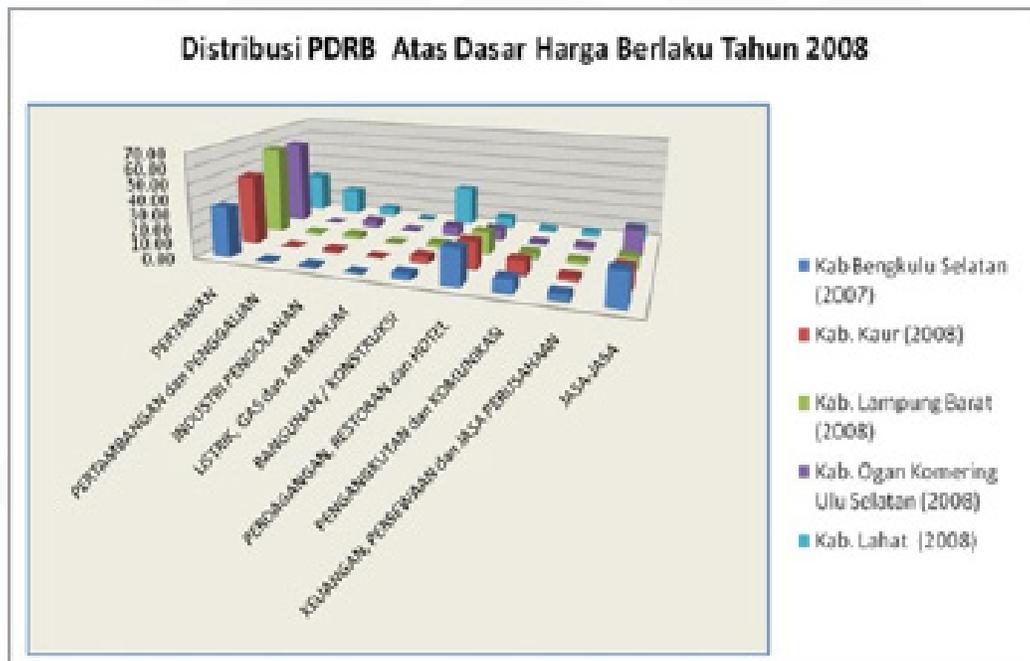
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah salah satu unsur dari data bidang ekonomi yang mempunyai peran yang sangat penting sebagai barometer keberhasilan pembangunan suatu daerah. Persentase Distribusi PDRB Sektor Atas Dasar Harga (ADH) Harga Berlaku pada Tahun 2008 seperti diuraikan pada Tabel 2.29 dan Gambar 2.21 Persentase Distribusi Sektor ADH Harga Konstan 2000 pada Tahun 2008 seperti diuraikan pada Tabel 2.30 dan Gambar 2.22

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADH Berlaku (%)				
		Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Kaur	Kab. Lampung Barat	Kab. OKU Selatan	Kab. Lahat
1	Pertanian	33.86	47.24	60.44	58.73	27.13
2	Pertambangan Dan Penggalian	0.28	0.41	1.58	0.08	17.73
3	Industri Pengolahan	1.33	1.53	3.03	4.56	5.86
4	Listrik, Gas Dan Air Minum	0.19	0.23	0.42	0.59	0.13
5	Bangunan / Konstruksi	4.16	4.89	3.19	6.45	27.13
6	Perdagangan, Restoran Dan Hotel	24.31	18.80	15.29	7.79	7.57
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	9.01	10.03	4.04	1.76	1.90
8	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	4.47	3.07	2.81	2.45	2.98
9	Jasa-Jasa	22.39	13.80	9.21	17.59	9.57
	Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : EPS Kabupaten Terikait , Tahun 2009

Tabel 2.29 Prosentase Distribusi PDRB Sektor ADH Berlaku pada Tahun 2008

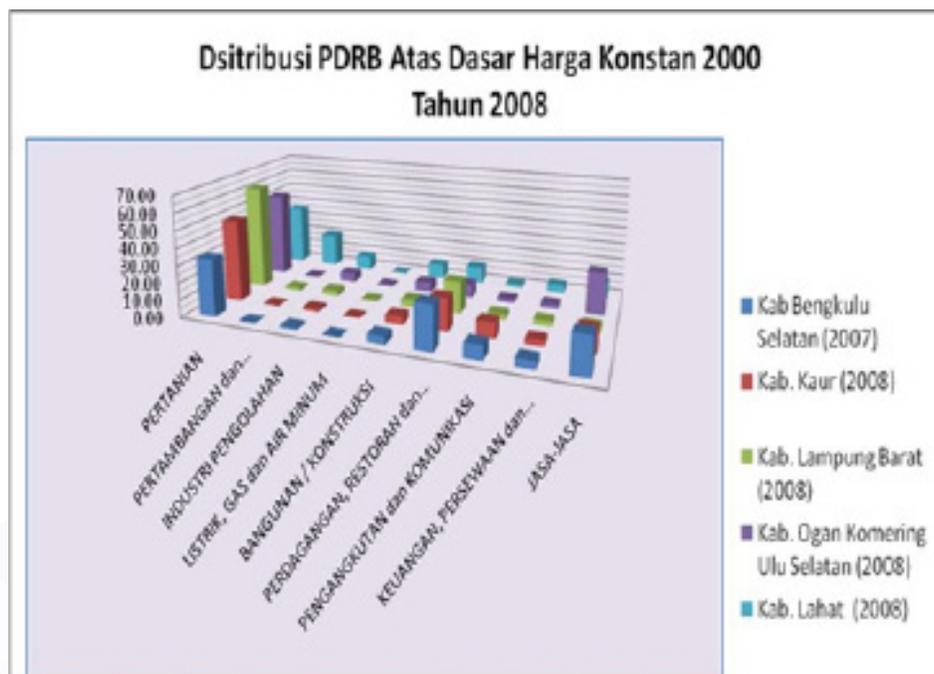


Gambar 2.21 Distribusi PDRB ADH Berlaku Tahun 2008

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRE ADH Konstan 2000 Tahun 2008 (%)				
		Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Kaur	Kab. Lampung Barat	Kab. OKU Selatan	Kab. Lahat
1	Pertanian	33.48	48.24	62.08	51.28	36.31
2	Pertambangan Dan Penggalian	0.27	0.41	1.59	0.07	20.18
3	Industri Pengolahan	1.37	1.58	3.10	5.28	8.13
4	Listrik, Gas Dan Air Minum	0.16	0.20	0.42	0.58	0.12
5	Bangunan / Konstruksi	4.63	4.81	4.08	5.77	8.63
6	Perdagangan, Restoran Dan Hotel	25.54	19.06	18.81	7.65	10.03
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	8.29	9.27	3.21	1.97	1.90
8	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	4.54	3.13	3.07	2.53	4.65
9	Jasa-Jasa	21.73	13.30	3.65	24.87	10.06
	J u m l a h	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : EPS Kabupaten Terkeat Tahun, 2009

Tabel 2.30 Prosentase Distribusi Sektor ADH Konstan 2000 pada Tahun 2008



Gambar 2.22 Distribusi PDRB ADH Konstan 2000 Tahun 2008

Pada distribusi PRDB atas dasar harga berlaku terlihat bahwa pada tahun 2008 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sumbangan terbesar pada pendapatan regional diberikan oleh Sektor Pertanian, yaitu sebesar 58,73%, demikian pula di Kabupaten Lampung Barat sebesar 60,44%, Kabupaten Kaur sebesar 47,24% dan Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 33,85%, sementara di Kabupaten Lahat 27,13%, hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduknya berusaha di Sektor Pertanian. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lampung Barat, sumbangan terbesar kedua diberikan oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yaitu masing-masing sebesar 24,31%, 18,80% dan 15,29%, sementara di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sumbangan terbesar kedua diberikan oleh Sektor Jasa yaitu sebesar 17,59%. Di Kabupaten Lahat, Sektor Konstruksi memberikan sumbangan terbesar kedua yaitu sebesar 27,13%.

4. Kependudukan

Dari segi kependudukan, jumlah penduduk di wilayah administrasi kecamatan di kelima kabupaten pada tahun 2008 berjumlah sekitar ± 941.344 jiwa. Paling padat berada di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tingkat kepadatan 2.489 jiwa per km² atau 25 jiwa per ha termasuk kategori tingkat kepadatan jarang dan yang terendah di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 9 jiwa/km² (jarang).

No.	Provinsi (Prov.)/ Kabupaten (Kab.)/ Kecamatan (Kec.)	Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan Tahun 2008				
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah Administrasi (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah KK	Rata- rata per KK
<i>I.</i>	<i>Prov. Bengkulu</i>					
a.	Kab. Bengkulu Selatan					
1	Kec. Manna	12677	33.17	382	2836	4
2	Kec. Bunga Mas	5840	35.08	166	1296	5
3	Kec. Kota Manna	23878	32.16	742	5371	4
4	Kec. Pasar Manna	17455	5.84	2989	3898	4
5	Kec. Kedurang	10999	234.55	47	2505	4
6	Kec. Kedurang Ilir	6926	58.2	119	1573	4
7	Kec. Segimin	15543	61.52	253	3094	5
8	Kec. Air Nipis	9833	203.28	48	2191	4
9	Kec. Pina	11460	61.88	185	2474	5
10	Kec. Ulu Manna	7059	236.92	30	1527	5
11	Kec. Pina Raya	18413	223.5	82	4406	4
	SUB JUMLAH a	140083	1186.1		31171	
b.	Kab. Kaur					
1	Kec. Nasal	16611	519.92	32	3323	5
2	Kec. Maje	14103	361.04	39	2821	5
3	Kec. Kaur Selatan	12069	92.75	130	2414	5
4	Kec. Tetap	5101	87.92	58	1021	5
5	Kec. Kaur Tengah	4585	26.40	174	917	5
6	Kec. Kinal	5027	154.03	33	1006	5
7	Kec. Semidang Cempay	9069	64.91	140	1814	5
8	Kec. Muara Sahung	4.312	256,00	17	863	5
9	Kec. Luas	5.295	124,88	42	1.059	5
10	Kec. Tanjung Kemuning	11.250	72,91	154	2.250	5
11	Kec. Lungkang Kule	5.884	32,00	184	1.177	5
12	Kec. Kaur Utara	7.192	49,80	144	1.439	5
13	Kec. Padang Guci Hulu	3.363	370,64	9	873	5
14	Kec. Padang Guci Hilir	4.931	115,96	43	987	5
15	Kec. Kelsam Tengah	6.376	35,84	178	1.276	5
	SUB JUMLAH b	115.168	2.365,00		23.040	

Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di kelima kabupaten selama periode 2000 - 2008 relatif rendah, di Kabupaten Lahat sebesar 0,63%, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 1,22%, Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 1,44%, Kabupaten Kaur sebesar 2,60% dan Kabupaten Lampung Barat sebesar 1,69%.

No.	Provinsi (Prov.)/ Kabupaten (Kab.)/ Kecamatan (Kec.)	Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan Tahun 2008				
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah Administrasi (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah KK	Rata- rata per KK
II.	Prov. Sumatera Selatan					
c.	Kab. Lahat					
1	Kec. Tanjung Sakti Pumi	14.312	271.00	53	3.378	4
2	Kec. Tanjung Sakti Puma	14.643	229.59	64	3.361	4
	SUB JUMLAH c	28.955	500.59		6.739	
d.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan					
1	Kec. Pulau Beringin	23.502	47.65	493	6.143	4
2	Kec. Sindang Danau	9.939	21.00	473	2.539	4
3	Kec. Sungai Ara	9.620	29.65	324	2.578	4
	SUB JUMLAH d	43.061	98.30		11.260	
III.	Prov. Lampung					
e.	Kab. Lampung Barat					
1	Kec. Pesisir Utara	9.117	307.18	30	2.042	4
	SUB JUMLAH e	9.117	307.18		2.042	
	JUMLAH TOTAL	336.384	4.457.17	0	74.252	

- Asumsi anggota keluarga dalam 1 KK berjumlah 5 jiwa
- Sumber : BPS, Kabupaten terkait tahun 2009

Tabel 2.31 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di WS Nasal Padang Guci

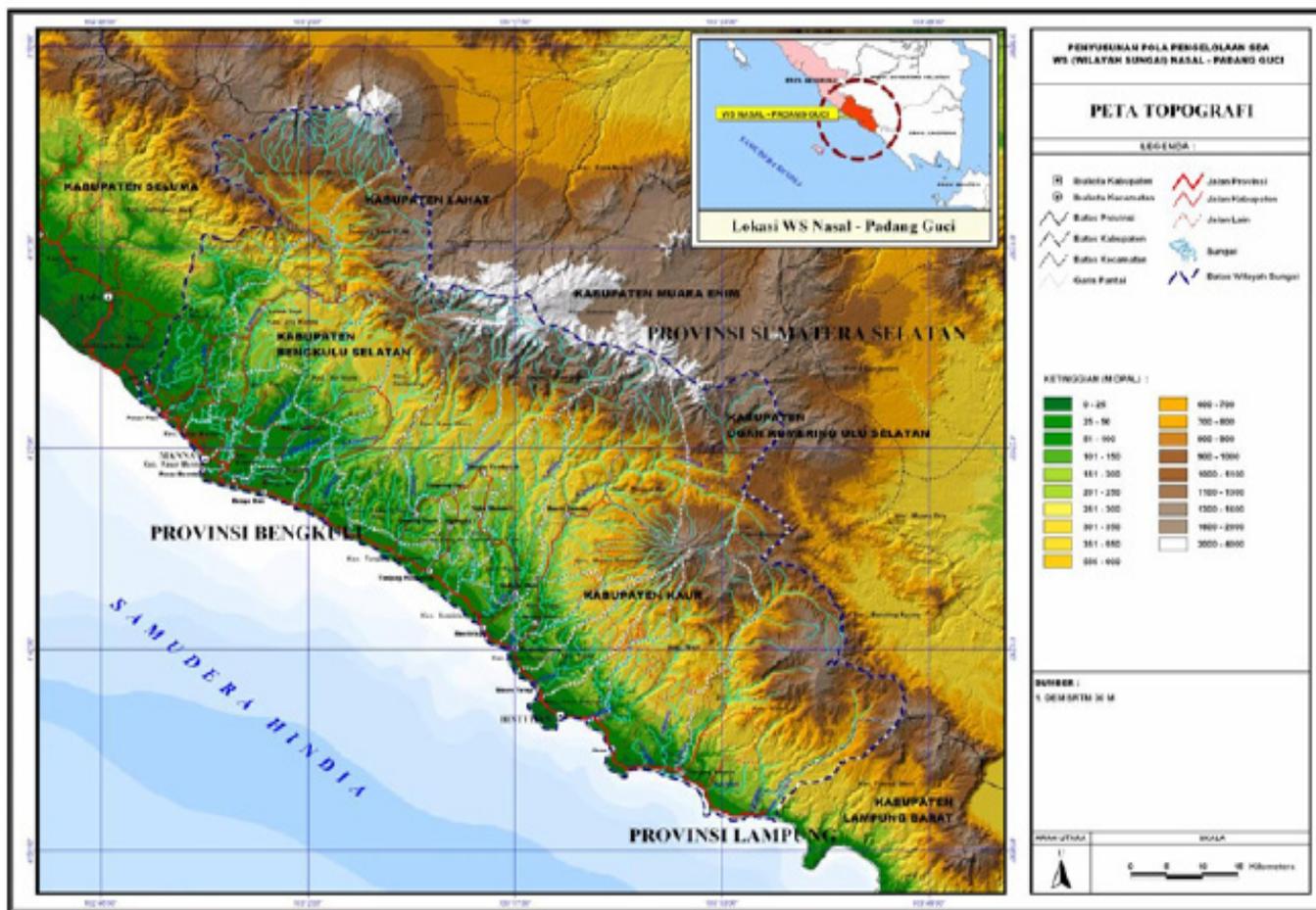
Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini selain pertumbuhan secara alami, juga adanya penambahan penduduk yang ditimbulkan oleh adanya program transmigrasi. Terjadinya pengurangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah kecamatan/kabupaten pada kurun waktu tertentu lebih disebabkan adanya perpindahan penduduk atau sejumlah penduduk yang keluar dari wilayah tersebut karena menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri antara lain ke Malaysia.

Pada Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk dibawah ini, di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur dalam kurun waktu tahun 2000 - 2008 berfluktuasi, Di Kabupaten Bengkulu Selatan, fluktuasinya mencapai titik terendah pada Tahun 2005-2006, LPP sebesar - 0,58%, terjadinya angka negatif ini kemungkinan disebabkan adanya sejumlah penduduk yang keluar/pindah dari wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan ke wilayah lain. Sedangkan fluktuasi terendah di Kabupaten Kaur pada tahun 2004 - 2005, dengan LPP sebesar 0,20%. Jumlah transmigran yang masuk ke Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 2007 tercatat 25 KK atau sebanyak 83 jiwa, dan pada tahun 2008 sebanyak 110 KK atau 395 jiwa, daerah asal para transmigran tersebut dari Provinsi Jawa Tengah. Jumlah transmigran yang masuk ke Kabupaten Lahat pada tahun 2007 sebanyak 100 KK yang berasal dari Pulau Jawa, dan pada tahun 2008 sebanyak 100 KK yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

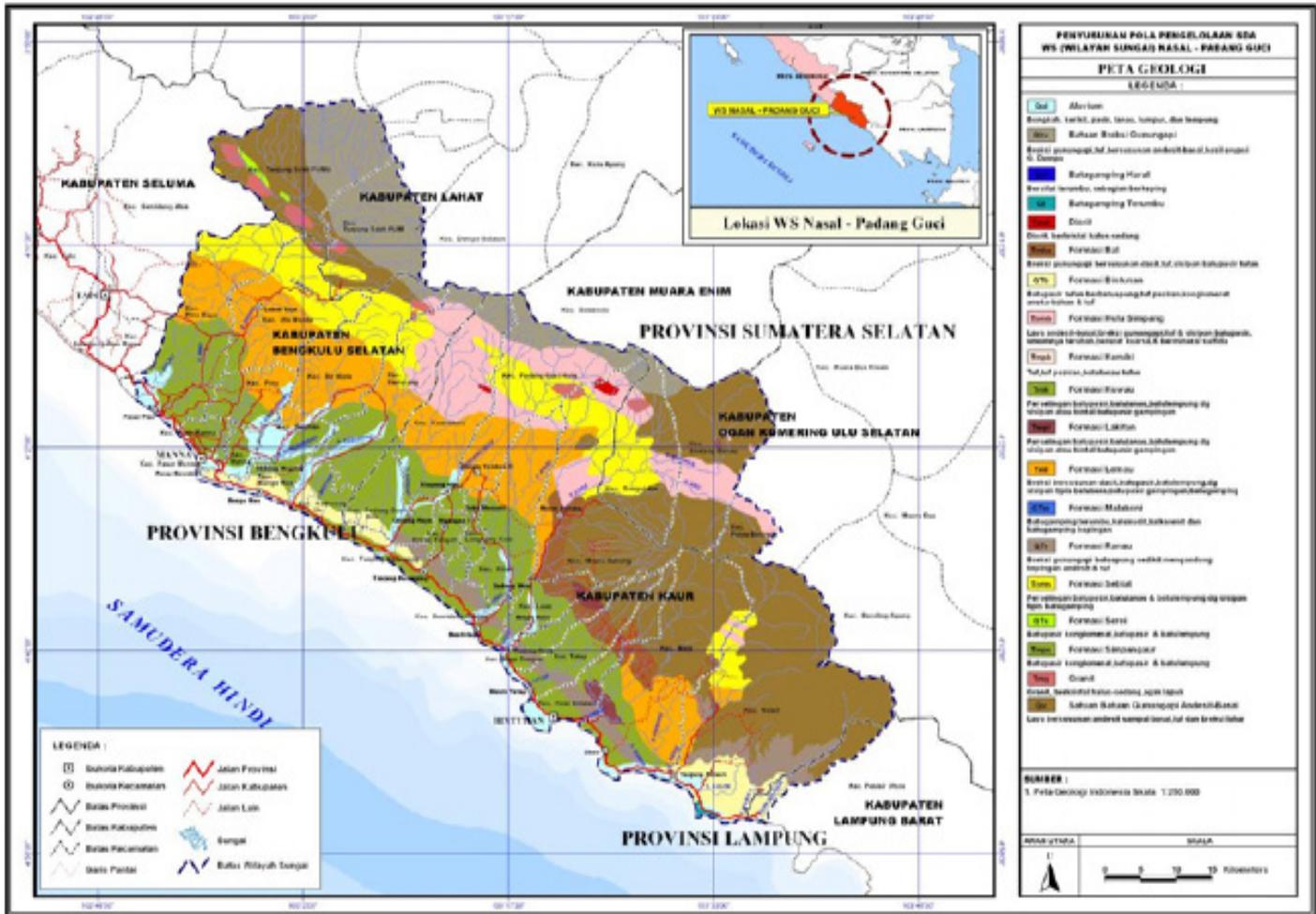
5. Kondisi Topografi dan Geologi

WS Nasal-Padang Guci memiliki topografi datar, bergelombang dan berbukit (curam). Topografi yang datar terletak di bagian Barat yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat hingga perbatasan Provinsi Lampung. Topografi bergelombang posisinya berada di sebelah Timur dari jalur pertama, merupakan lereng Pegunungan bukit Barisan. Dan topografi berbukit (curam) berada pada jalur kedua sampai ke puncak pegunungan Bukit Barisan. Jalur Pertama, daerah dengan ketinggian 100 meter dpl, terdapat disepanjang pantai dengan klasifikasi low land dengan luas mencapai 708.435 ha (35,80%). Jalur Kedua, daerah dengan ketinggian 1000 meter dpl, terletak disebelah timur jalur pertama yang merupakan lereng pegunungan Bukit Range, daerah ini dibagi dua kelompok yaitu : daerah dengan ketinggian 100 – 500 meter dpl dengan luas mencapai 625.323 ha (31,60%), dan daerah dengan ketinggian 500 – 1000 meter dpl, luasnya mencapai 405.688 (20,50%). Jalur Ketiga, daerah dengan ketinggian 1000 – 2000 meter dpl, terletak disebelah timur jalur kedua sampai ke puncak Bukit Barisan. Peta topografi WS Nasal-Padang Guci diperlihatkan pada Gambar 2.23.

Sedangkan kondisi geologi Pulau Sumatera dapat dibagi menjadi empat mandala tektonika yaitu lajur akresi atau lajur mentawai, busur muka atau lajur bengkulu, busur magma atau lajur barisan dan busur belakang atau lajur jambi – palembang. Dalam hal ini, WS Nasal - Padang Guci terletak di dalam lajur akresi, busur muka dan busur magma. Geologi Sungai Nasal - Padang Guci ini mencakup batuan beku Kenozoikum serta runtunan batuan gunungapi dan sedimen Tersier sampai Kuarter yang menutupinya. Peta Geologi WS Nasal - Padang Guci diperlihatkan pada Gambar 2.24



Gambar 2.23 Peta Topografi WS Nasal - Padang Guci



Gambar 2.24 Peta Geologi WS Nasal - Padang Guci

6. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di WS Nasal-Padang Guci berdasarkan “USDA Keys Taxonomi (1988)” didominasi oleh jenis Dystropepts seluas 262.741,6 ha (66,17%) dan Humitropept seluas 63.304,7 ha (15,94%). Jenis tanah di WS Nasal – Padang Guci, diuraikan seperti tersebut pada Tabel 2.32 di bawah.

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	%
1	Dystropept	262.741,6	66,17
2	Eutropepts	991,2	0,25
3	Humitropep	63.304,7	15,94
4	Hydrandept	4.546,5	1,15
5	Hydraquent	192,3	0,05
6	Paledults	10.173,9	2,56
7	Tropaquept	13.908,9	3,50
8	Tropofluve	3.143,0	0,79
9	Tropopsamm	2.263,4	0,57
10	Troporthen	2.353,3	0,59
11	Tropudults	33.444,8	8,42
	TOTAL	397.063,5	100,00

Sumber : Peta Land Sistem Indonesia

Tabel 2.32 Jenis Tanah di WS Nasal - Padang Guci

7. Penggunaan Lahan

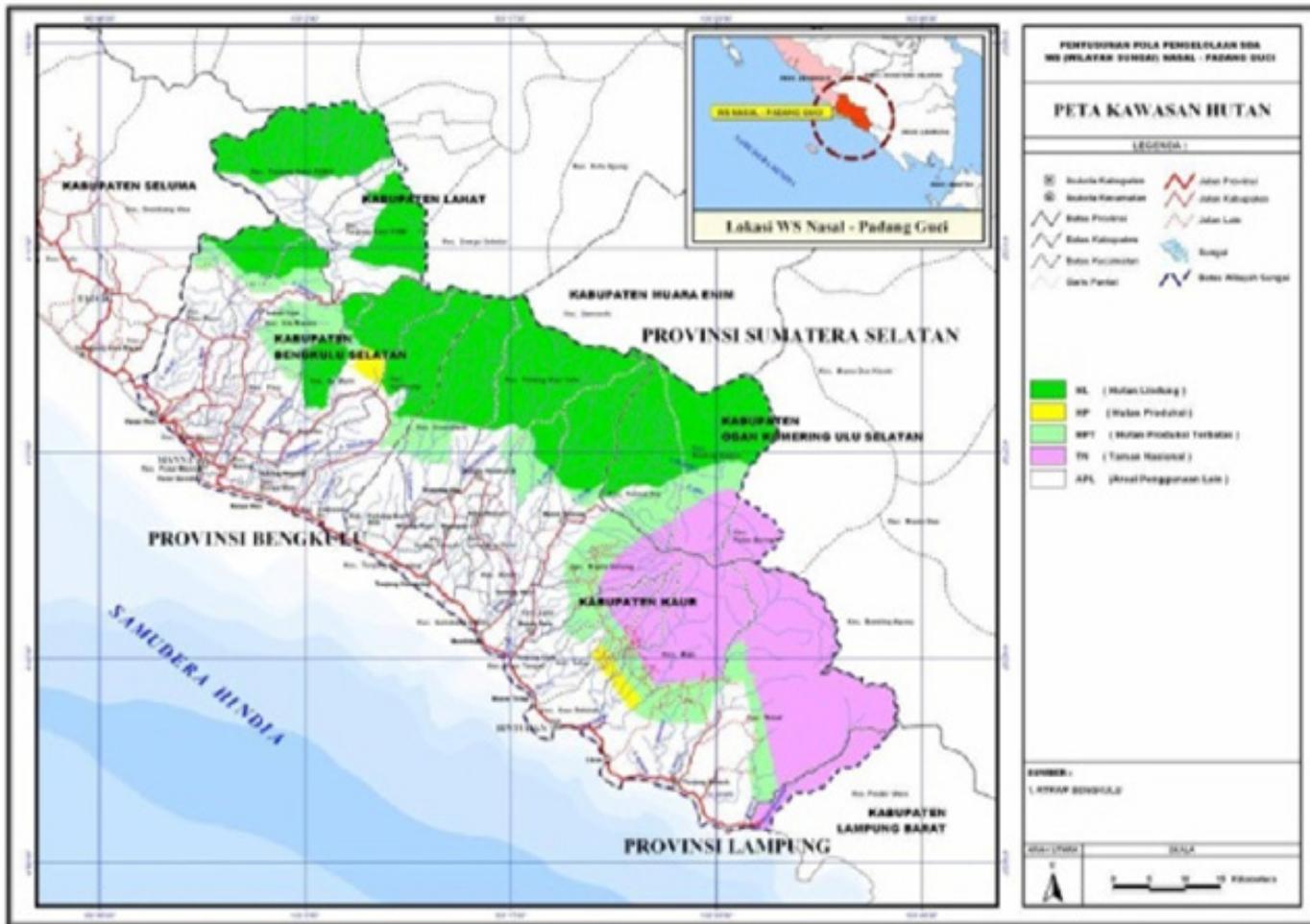
Penggunaan lahan di WS Nasal–Padang Guci terdiri dari Kawasan Hutan Lahan Kering Primer sebesar 27,75%, Hutan Lahan Kering Sekunder sebesar 17,34%, Pertanian Lahan Kering sebesar 4,55% dan Pertanian Lahan Kering Campur sebesar 34,25%. Penggunaan lahan pada WS Nasal – Padang Guci, disajikan pada Tabel 2.33 dan Gambar 2.25

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)	%
1	Belukar Rawa	3,37	0,07
2	Hutan Lahan Kering Primer	1335,21	27,75
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	834,43	17,34
4	Pemukiman	7,49	0,16
5	Perkebunan	31,36	0,65
6	Pertanian Lahan Kering	219,10	4,55
7	Pertanian Lahan Kering Campur	1647,96	34,25
8	Rawa	0,82	0,02
9	Savana	0,23	0,00
10	Sawah	65,15	1,35
11	Semak/Belukar	619,26	12,87
12	Tanah Terbuka	22,76	0,47
13	Tubuh Air	24,49	0,51
	TOTAL	4811,62	100,00

Sumber : Peta Rupa Bumi, Bahasurancal

Tabel 2.33 Penggunaan Lahan pada WS Nasal - Padang Guci

Kawasan areal penggunaan Lain (APL) yang ada di WS Nasal-Padang Guci seluas 195.028,8 ha. Lahan kritis di kawasan APL seluas 91.616,5 Ha atau setara dengan 46,98 % dari luas seluruh kawasan APL di WS Nasal - Padang Guci. Permasalahannya adalah bahwa kawasan APL yang ada di WS Nasal-Padang Guci sebagian besar berada di kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut UU Pokok Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peta Kawasan Hutan di WS Nasal – Padang Guci seperti tergambar pada Gambar 2.26



Gambar 2.26 Peta Kawasan Hutan di WS Nasal–Padang Guci

9. Meteorologi dan Hidrologi

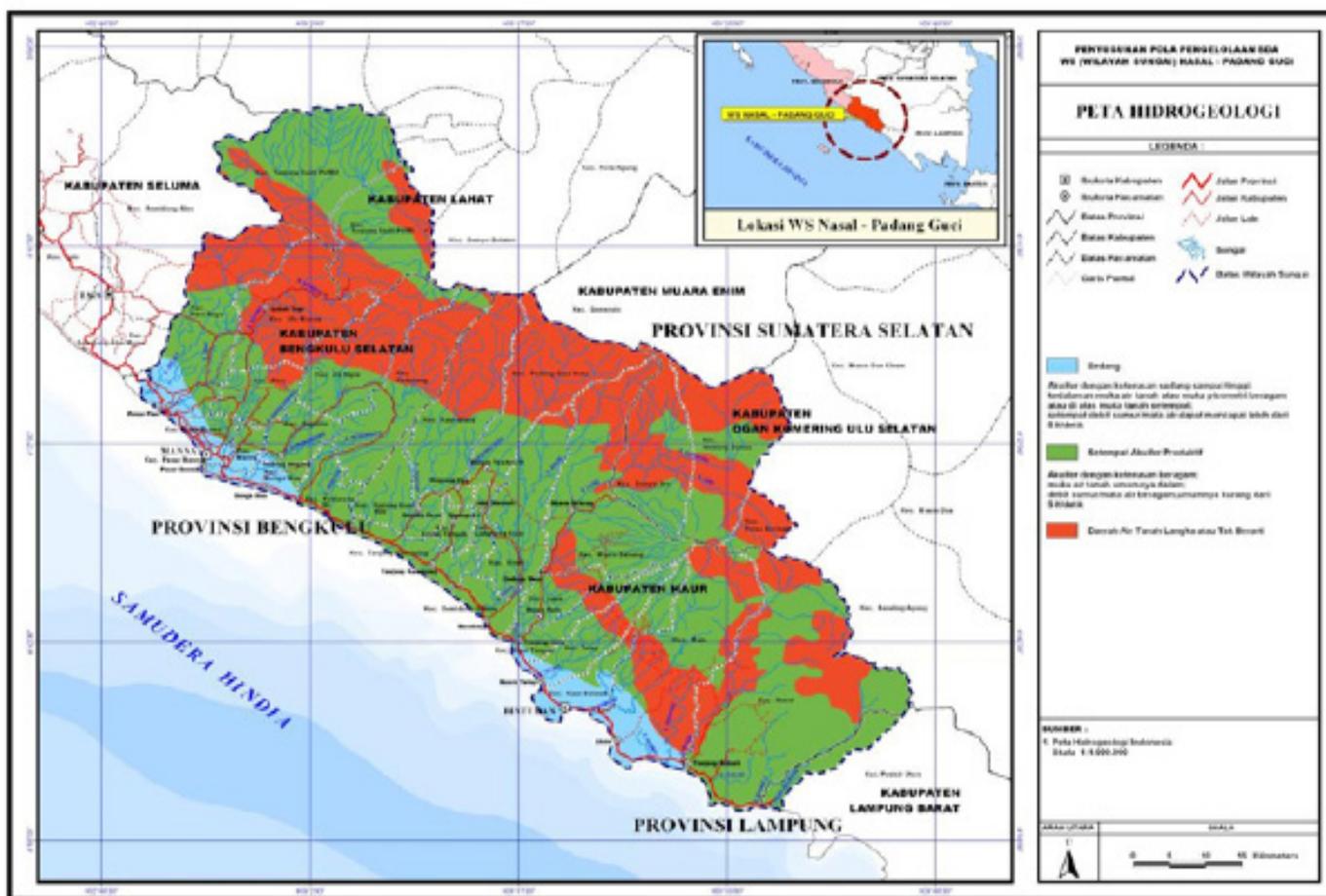
Data curah hujan rata-rata tahunan di WS Nasal – Padang Guci yang diambil dari 18 stasiun curah hujan yang tersebar di WS sebesar 1.752 mm/tahun.

10. Air Permukaan

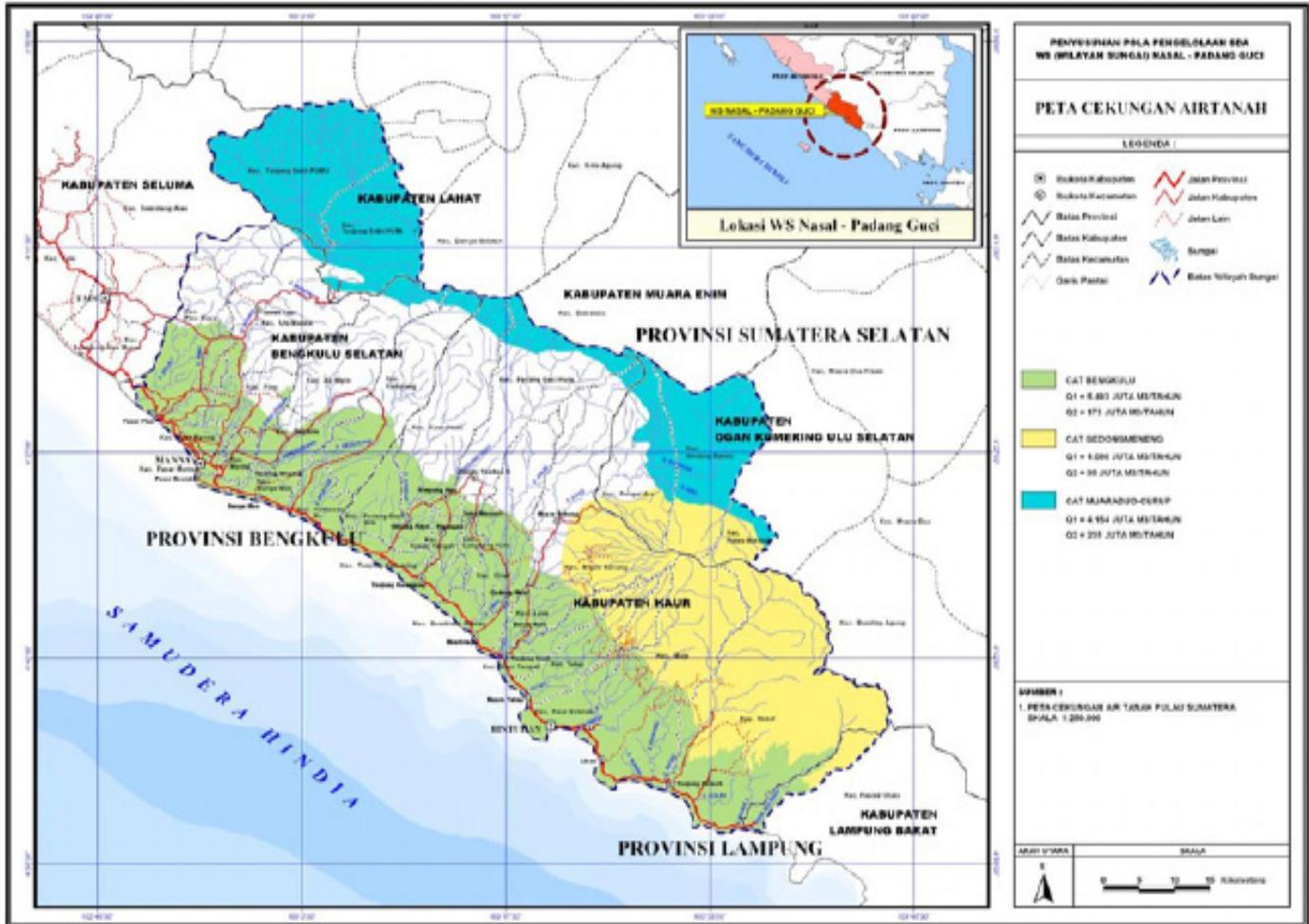
Air sungai yang cukup besar di WS Nasal – Padang Guci adalah Sungai Manna, Sungai Bengkenang, Sungai Pino, Sungai Sarak dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai-sungai tersebut berhulu di Pegunungan Bukit Barisan yang terletak di bagian utara di luar WS Nasal – Padang Guci dengan alur sungai relatif berarah utara – selatan, dan bermuara di Samudera Hindia. Pada umumnya sungai-sungai tersebut selalu berair sepanjang tahun, meskipun pada musim kemarau agak berkurang jumlah airnya. Sungai-sungai tersebut sangat bermanfaat bagi keperluan sehari-hari penduduk di sekitarnya, bahkan PDAM Kota Manna memanfaatkan sungai Manna untuk memenuhi kebutuhan air minum. Dibagian muara sungai, air sungai sudah dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga mengakibatkan air sungai menjadi terasa payau atau bahkan asin terutama pada musim kemarau. Air danau, yang merupakan satu-satunya terdapat di WS Nasal – Padang Guci adalah Danau Batulambang yang terletak di bagian timur Kota Manna. Air danau tersebut dimanfaatkan sebagai bendung untuk irigasi daerah pertanian dibagian hilirnya. Keberadaan air danau tersebut berhubungan langsung dengan beberapa rawa yang terdapat di sekitarnya.

11. Hidrogeologi

Pembahasan mengenai kondisi hidrogeologi di WS Nasal – Padang Guci adalah mengenai keadaan airnya, baik air yang berada di permukaan seperti air sungai, air rawa, dan air danau maupun air yang berada di dalam tanah (air tanah). Cadangan volume air tanah yang dapat dimanfaatkan di WS Nasal – Padang Guci sebesar 65.768.767,25 m³.



Gambar 2.27 Peta Hidrogeologi WS Nasal-Padang Guci



Gambar 2.28 Peta Cekungan Air Tanah WS Nasal-Padang Guci

12. Kualitas Air Tanah

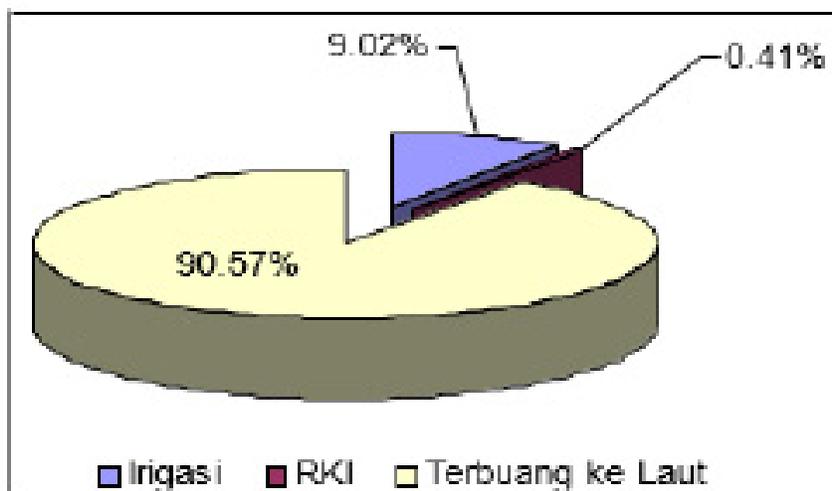
Di WS Nasal – Padang Guci terdapat keragaman komposisi air tanah baik secara lokal maupun regional dapat disebabkan oleh :

- Kontaminasi air permukaan
- Komposisi mineralogi tertentu dari lapisan akuifer
- Terjadi pencampuran dengan air tanah yang lebih dalam
- Pertukaran kation dalam sedimen lempungan

Berdasarkan hasil analisa kualitas airtanah (Supartoyo, 1996) maka dengan adanya konsentrasi-konsentrasi senyawa utama dan sifat-sifat kimia/fisiknya, kondisi air tanah di daerah penelitian cukup baik untuk air minum, industri dan irigasi.

13. Neraca Air Eksisting (2010)

Ketersediaan air di WS Nasal–Padang Guci adalah 8.682,2 juta m³/tahun. Ketersediaan air tersebut yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan irigasi 9,02% (782,9 juta m³/tahun). Air untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI) 0,41% (35,8 juta m³/tahun). Dari ketersediaan air tersebut masih 90,57% (7.863,5 juta m³/tahun) yang belum dimanfaatkan dan terbuang ke laut. Neraca air eksisting WS Nasal Padang Guci disajikan pada Gambar 2.29.



Sumber : Hasil Analisis, 2010

Gambar 31. Ketersediaan Air di WS Nasal - Padang Guci

14. Data Kebutuhan Air

Seiringan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian masyarakat, maka kebutuhan air untuk berbagai sektor juga terus meningkat. Dari keseluruhan kebutuhan air tersebut, kebutuhan air untuk irigasi merupakan kebutuhan air terbesar.

Kebutuhan air untuk berbagai sektor, baik RKI maupun irigasi untuk pertanian dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Data Kebutuhan RKI

Kebutuhan air RKI di WS Nasal-Padang Guci pada saat ini disuplai dari air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), mata air, air tanah, dan sumber-sumber air lainnya. Tingkat pelayanan PDAM di WS masih terbilang sangat rendah, dan diharapkan tingkat pelayanan PDAM tersebut dapat terus meningkat seiring dengan bertambahnya bangunan-bangunan prasarana sumber daya air di WS.

Perhitungan kebutuhan air rumah-tangga, perkotaan dan industri, dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks kebutuhan air sesuai dengan Pedoman Perencanaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2004).

Rekapitulasi Kebutuhan Air Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri di WS Nasal-Padang Guci tercantum pada Tabel 2.34

No.	DAS	Kebutuhan Air RKI (l/det)
1.	Anak Selanak	0,77
2.	Bengkenang	126,36
3.	Kedurang	19,41
4.	Kelam	46,68
5.	Kinai	45,13
6.	Kolek	7,84
7.	Luas	145,15
8.	Manna	222,60
9.	Manula	18,38
10.	Mertam	12,24
11.	Nasal	27,07
12.	Numan	3,99
13.	Padang Guci	42,57
14.	Pino	40,06
15.	Sambat	40,28
16.	Hawang	6,05
17.	Seladi	15,26
18.	Sulau	11,62
19.	Tetap	22,33
Jumlah		853,78

Sumber : Hasil analisa, 2010

Tabel 2.34 Rekapitulasi Kebutuhan Air RKI di WS Nasal–Padang Guci Tahun 2010

Kabupaten	Kebutuhan Air RKI (l/det)
Bengkulu Selatan	428
Kaur	350
Lahat	75
Okan Hulu Selatan	112
Lampung Barat	4
Jumlah	970

Sumber : Hasil Analisa. 2010

Tabel 2.35 Kebutuhan Air RKI (l/dt) di WS Nasal–Padang Guci

b. Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi di WS Nasal–Padang Guci diuraikan pada Tabel 2.36

Bulan	Kebutuhan Air Irigasi (l/dt/ha)
Januari	1.12
Februari	0.99
Maret	0.96
April	1.02
Mai	1.05
Juni	0.80
Juli	0.51
Agustus	0.36
September	0.24
Oktober	1.12
November	1.49
Desember	0.97

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Tabel 2.36 Kebutuhan Air Irigasi di WS Nasal – Padang Guci

Daerah irigasi di WS Nasal–Padang Guci tersebar di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Daerah irigasi tersebut diuraikan pada Tabel 2.37 dan Tabel 2.38.

No.	Daerah Irigasi	Luas Areal (ha)	
		Potensial	Fungsional
1.	Tanjung Kemuning	420	410
2.	Kelam Tengah	725	638
3.	Padang Guci Hilir	550	480
4.	Padang Guci Hulu	845	713

No.	Daerah Irigasi	Luas Areal (ha)	
		Potensial	Fungsional
5.	Kaur Utara	572	505
6.	Lungkang Kule	205	102
7.	Kinal	1.052	857
8.	Semidang Gumal	395	340
9.	Kaur Tengah	400	360
10.	Luas	670	595
11.	Muara Sahung	209	175
12.	Muara Tetap	110	110
13.	Kaur Selatan	481	379
14.	Maje	223	208
15.	Nasal	257	257
Jumlah		7.114	6.129

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

Tabel 2.37 Daerah Irigasi di Kabupaten Kaur

No.	Kecamatan	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi (Ha)		
			Potensial Rencana	Area Belum Sawah	Area Sudah Sawah
1	Manna	7	335	60	313
2	Kota Manna	11	437	20	417
3	Kedurang	15	2.249	145	2.061
4	Bunga Mas	4	220	85	135
5	Paser Manna	0	0	0	0
6	Kedurang Hilir	2	80	0	80
7	Seginim	6	480	0	480
8	Air Nipis	22	6.289	1.435	4.853
9	Pino	15	1.009	214	795
10	Pino Raya	23	1.180	72	1.096
11	Ulu Manna	9	1.529	1.164	365
Total		114	19.808	3.196	10.596

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

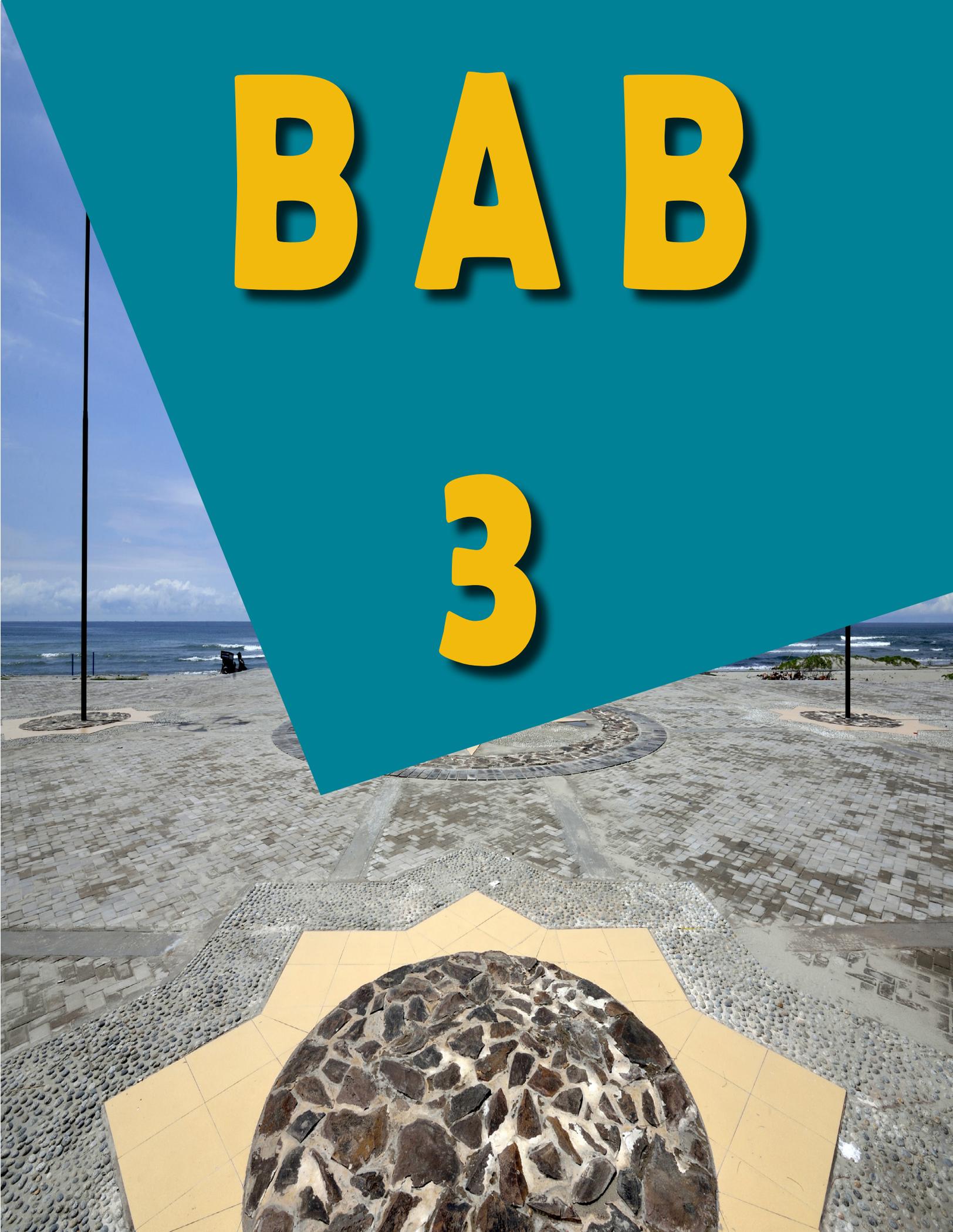
Tabel 2.38 Daerah Irigasi di Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan kondisi luas lahan yang ada, kebutuhan air irigasi dimasa yang akan datang masih memerlukan tambahan dengan kemungkinan adanya perubahan luas lahan yang terairi irigasi. Kondisi tersebut disebabkan adanya terus meningkatnya luas lahan irigasi non teknis yang diharapkan beralih fungsi menjadi lahan sawah irigasi teknis.



B A B

3



BWS Sumatera VII termasuk dalam RBO yang adalah organisasi PSDA wilayah sungai. RBO performance benchmarking adalah pengukuran kinerja RBO yang sistematis untuk mewujudkan perbaikan secara terus menerus (continuing process) melalui perbandingan dengan nilai dan standar (internal maupun eksternal) yang relevan dapat tercapai, valid, handal dan mudah digunakan berdasarkan critical success factor. Untuk melaksanakan pengukuran tersebut dilakukan melalui dua tahapan yaitu Self Assessment dan Peer Review. SA adalah kegiatan pengukuran kinerja RBO yang dilakukan oleh pimpinan dan staf RBO sendiri dengan membandingkan terhadap norma, standar dan/atau kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan menjamin adanya perbaikan berlanjut terhadap kinerja RBO. Peer review adalah kegiatan kaji ulang yang dilakukan oleh mitra sejawat (peer) untuk mengukur tingkat obyektivitas dari hasil penilaian Tim SA atas kinerja RBO.

Penilaian Pengukuran kinerja RBO tersebut dilakukan secara seimbang (Balance Scorecard) menggunakan tools/alat ukur berdasarkan 5 (lima) elemen pokok, 15 indikator dan parameter bernilai 0–4 yang dikeluarkan oleh NARBO yang merupakan jaringan komunikasi diantara RBO di kawasan asia. Berikut ini adalah 15 indikator tersebut :

Bidang Kinerja Kritis	Indikator
A. Misi	1. Status Badan Pengelola SDA 2. Tata Kelola SDA
B. Pemilik Kepentingan	3. Keterlibatan Pemakai Air 4. Umpan Balik Pemakai Air 5. Kondisi Lingkungan 6. Konservasi SDA
C. Pembelajaran dan Pengembangan	7. Pengembangan Sumber Daya Manusia 8. Pengembangan Teknik 9. Pengembangan Badan Pengelola SDA
D. Tata Kelola Usaha Internal	10. Perencanaan Tata Kelola Badan Pengelola SDA 11. Pengelolaan SDA, Alokasi Air, Perijinan, Kekeringan 12. Pengendalian Daya Rusak Air 13. Pengelolaan Data
E. Keuangan	14. Pemulihan Biaya 15. Efisiensi Keuangan

Tabel 3.1 Indikator RBO Performance Benchmarking

SA BWS Sumatera VII Performance Benchmarking adalah suatu tahapan pertama dalam performance benchmarking, dimana kita melakukan penilaian kinerja terhadap BWS Sumatera VII dengan tujuan sebagai berikut :

- Untuk mengetahui apakah BWS Sumatera VII memenuhi syarat dalam mencapai tujuannya sebagai organisasi.
- Menyadari bahwa alat ini akan membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan intervensi yang lebih jauh pada bidang tertentu.
- Mengidentifikasi kekuatan BWS Sumatera VII, sebagai unit pelaksana teknik untuk peningkatan kinerja dan investasi di bidang SDA.

Untuk tahap kedua adalah Proses Peer Review yaitu suatu proses evaluasi dari laporan SA BWS Sumatera VII Performance Benchmarking yang dilakukan oleh tim peer review. Kegiatan peer review dimaksudkan untuk mengidentifikasi:

- Konsistensi dan interpretasi dalam pemberian nilai masing-masing indikator.
- Tindakan dalam membangun suatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan bersama yang dapat diakui oleh teman sejawat dalam mencapai suatu hasil yang positif.
- Suatu proses yang ditujukan pada suatu organisasi secara cermat oleh teman sejawat.
- Melakukan pendampingan terhadap BWS Sumatera VII untuk memotret kondisi yang ada, menyusun program 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian misi keterpaduan PSDA.

Laporan Peer Review dapat memberikan masukan yang laporannya berisi :

1. Analisa dari Laporan SA yaitu penilaian validitas tingkat Benchmark RBO, berdasarkan pada bukti yang ditampilkan oleh Tim SA.
2. Menganalisa kelemahan, kekuatan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dari kinerja BWS Sumatera VII.

Alur Peningkatan Kinerja RBO

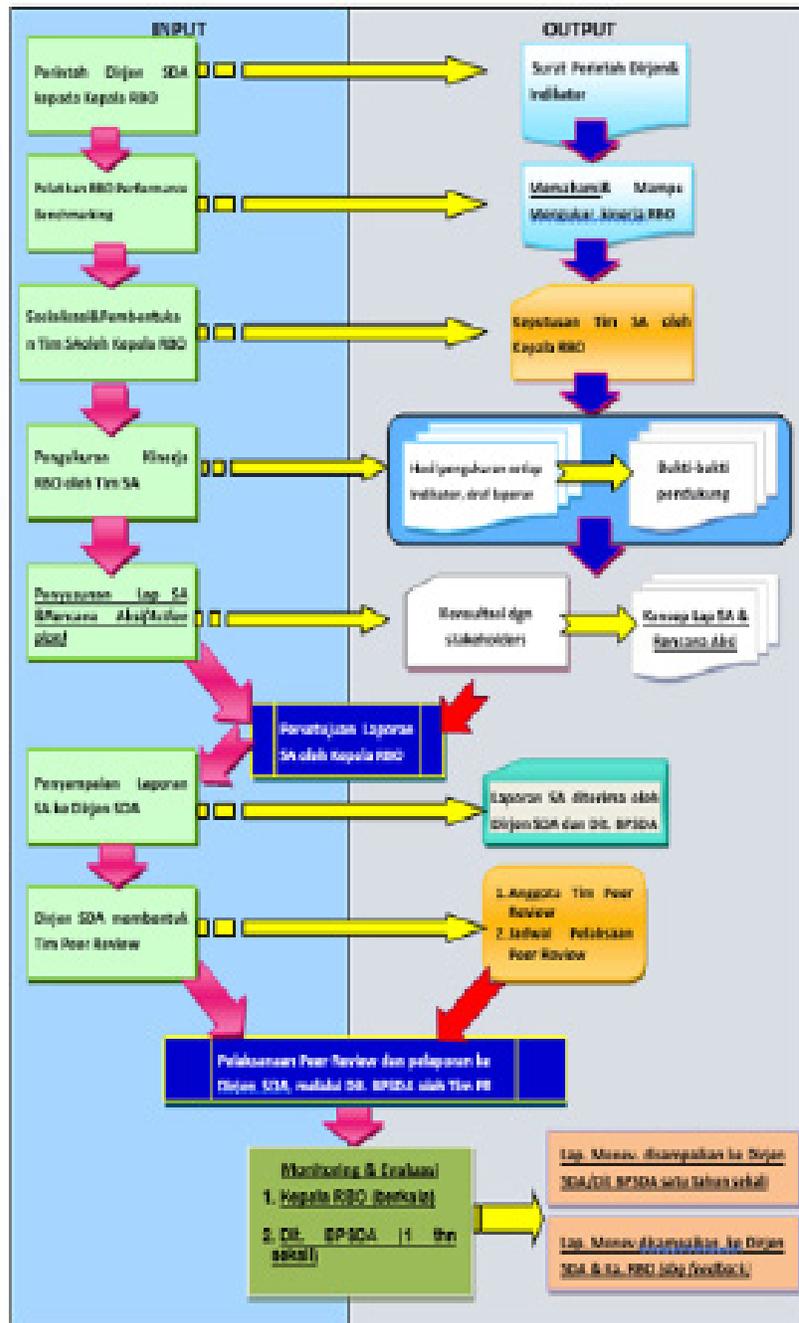
1. Self Assessment

adalah melakukan pengukuran kinerja RBO (Balai Wilayah Sungai Sumatera VII) dilakukan oleh pimpinan dan staf RBO (Balai Wilayah Sungai Sumatera VII) sendiri dengan membandingkan terhadap norma, standar, pedoman dan/atau kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan menjamin adanya perbaikan berlanjut kinerja RBO.

1). Prosedur yang dilakukan meliputi:

- a. Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah melaksanakan RBO Performance Benchmarking dengan membentuk Tim Self Assessment
- b. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Self Assessment, meliputi
 1. Melakukan serangkaian pertemuan dan selanjutnya melaksanakan pembagian tugas kepada semua anggota tim.
 2. Pengumpulan bukti-bukti pendukung yang dilaksanakan oleh seluruh anggota, yang selanjutnya bukti-bukti pendukung itu dimasukkan dalam kotak untuk masing-masing indikator (15 kotak indikator).
 3. Menyusun konsep laporan Self Assessment untuk RBO Performance Benchmarking yang selanjutnya dipaparkan kepada Kepala / Pimpinan RBO untuk mendapat persetujuan.

- c. Setelah Kepala Balai menyetujui hasil penilaian kinerja, selanjutnya Tim SA mengirimkan hasil penilaian tersebut kepada Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, cq. Kasubdit Kelembagaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.



Gambar 3.1 Alur Peningkatan Kerja RBO

- 2). Analisis terhadap Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
 Hasil rangkuman penilaian oleh TIM SA tahun 2015, 2016, 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Indikator	SD SCORE			Max Score
		2015	2016	2020	
I	MISI				
IV1	Status Badan Pengelola Sumber Daya Air		3,5	3,5	4,0
IV2	Tata Kelola sumber Daya Air		3,0	3,5	4,0
II	PEMILIK KEPENTINGAN				
IV1	Keterlibatan Pengguna		3,5	3,5	4,0
IV2	Umpan Balik Pengguna		3,0	3,5	4,0
IV3	kondisi lingkungan		2,5	3,5	4,0
IV4	Konservasi Sumber Daya Air		3,5	3,5	4,0
III	PEMUDA JARAN DAN PENGEMBANGAN				
IV1	Pengembangan sumber daya manusia		3,5	3,5	4,0
IV2	Pengembangan Teknik		2,5	3,5	4,0
IV3	Pengembangan Badan Pengelolaan Sumber Daya Air		3,0	3,5	4,0
IV	TATA KELOLA USAHA INTERNAL				
IV1	Perencanaan tata kelola di dalam badan Pengelola Sumber daya Air		3,5	3,5	4,0
IV2	Pendayagunaan SDA, Alokasi Air, Rekomtek/ Perijinan dan Kekerlingan		3,0	3,5	4,0
IV3	Pengendalian Daya Rusak Air		2,0	3,5	4,0
IV4	Pengelolaan Data		2,5	3,5	4,0
V	KEUANGAN				
IV1	efisiensi keuangan		3,0	3,5	4,0
IV2	Pemulihan Biaya		2,0	3,5	4,0
	TOTAL SCORE		44,0	52,5	60,0

Tabel 3.2 Hasil rangkuman penilaian oleh TIM SA tahun 2015, 2016, 2020

Hasil analisis dan dasar penilaian SA RBO Performance Benchmarking BWS Sumatera VII Tahun Anggaran 2016 berdasarkan hasil rapat Tim RBO-PB yang dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 13-14 Desember 2016 di Kantor BWS Sumatera VII Bengkulu, maka disepakati nilai Performance Benchmarking tahun 2016 dan rencana aksi hingga 5 (lima) tahun ke depan yang diuraikan tersebut dibawah ini:

I. MISI

I/1. Status Badan Pengelola Sumber Daya Air

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 3,5

Rating 2016 : 3,5

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,5 : Badan Pengelola SDA melalui wadah koordinasi telah menampung pendapat dari para pemilik kepentingan dalam keputusan-keputusan yang diambil.

Walaupun demikian keputusan yang dicapai masih dibuat berdasarkan desakan para pengelola SDA dan belum mencerminkan demokrasi sepenuhnya.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,5), bukti meliputi sebagai berikut

1. Sudah terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Terawang Muar - Nasal Padang Guci, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 400 tahun 2010.
2. Sudah terbentuk sekretariat TKPSDA WS Terawang Muar, Surat Keputusan Ketua Harian TKPSDA Terawang Muar pada tahun 2010.
3. Kegiatan-kegiatan TKPSDA Terawang Muar telah difasilitasi oleh sekretariat.
4. Penetapan Pola Terawang Muar dan Nasal Padang Guci tahun 2012.
5. Rekomendasi Penetapan Alokasi Air WS Terawang Muar - Nasal Padang Guci.
6. Merekomendasikan Review Pola Pengelolaan SDA yang telah ditetapkan tahun 2012.
7. Balai Wilayah Sungai Sumatera VII melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan (stakeholders) serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah sungai terpadu / Integrated Water Resources Management (IWRM) pada Wilayah Sungai Terawang Muar - Nasal Padang Guci.
 - a. Pada tahap persiapan program
 - Terdapat masukan/usulan dari masyarakat maupun stakeholders.
 - Disetujui oleh Musrenbangda Provinsi.
 - Disetujui oleh Musrenbang Nasional.
 - Program BWS Sumatera VII dibahas dan disepakati bersama antara BWS Sumatera VII dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi Bengkulu pada saat acara Konsultasi Regional (Konreg) Dirjen SDA Kementerian PUPR.

- b. Pada tahap perencanaan
 - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders.
 - Melakukan pertemuan dan diskusi dalam setiap usulan kegiatan yang dilakukan oleh tim teknis BWS Sumatera VII dengan melibatkan stakeholders dan pemerintah daerah yang terkait serta menindaklanjuti masukan-masukan yang ada.
 - Melaksanakan rapat TKPSDA empat (4) kali dalam setahun guna membahas pola WS Terawang Muar dan WS Nasal Padang–Guci dan rencana pengelolaan bersama dengan anggota Tim TKPSDA yang berasal dari berbagai perwakilan stakeholders.
 - Diskusi publik.
 - Menentukan skala prioritas di dalam kegiatan perencanaan.
- c. Pada tahap konstruksi
 - Melakukan sosialisasi sebelum melaksanakan kegiatan konstruksi kepada masyarakat, stakeholders dan pemerintah daerah setempat.
 - Menerima rekomendasi-rekomendasi atau masukan dari masyarakat, stakeholders serta pemerintah daerah setempat dan menindaklanjutinya pada tahapan pelaksanaan konstruksi.
 - Surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada PEMDA setempat.
 - Penerapan jaminan mutu (quality assurance) telah dilaksanakan.
- d. Pada tahap OP
 - Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap OP bangunan sarana prasarana SDA.
 - Melibatkan stakeholders di dalam kegiatan OP sebagai tenaga kontrak maupun sukarela.
 - Melibatkan P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan OP jaringan irigasi di wilayah mereka.

I/2. Tatakelola sumber daya air

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 3,0

Rating 2016 : 3,0

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,0 : Terdapat beberapa tambahan kewenangan telah dimiliki oleh badan pengelola SDA selain alokasi air, misalnya dalam pengaturan manfaat lahan dan dapat melakukan kegiatan pembangunan prasarana SDA seperti melakukan pembebasan tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Hasil analisa rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), adalah peraturan/perundang-undangan yang secara implisit mengatur tentang tata kelola sumber daya air dan lahan secara nasional maupun regional (wilayah sungai) yang berlaku secara terpadu, sebagai berikut:

1. UU RI No.11 tahun 1974 tentang pengairan.
2. UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 37/PRT/M/2015 tentang izin penggunaan air dan atau sumber air.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.09/PRT/M/2015 tentang penggunaan sumber daya air.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.08/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23/PRT/M/2015 tentang pengelolaan aset irigasi.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 34/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.
12. Peraturan Menteri PUPR No.01/PRT/M/2016 tentang Tata cara perijinan perusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air.
13. Pola pengelolaan SDA WS Teramang Muar dan WS Nasal Padang guci telah ditetapkan oleh Menteri PU.
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 400/KPTS/M/2010 tentang pembentukan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai teramang muar.

I. PEMILIK KEPENTINGAN

II/1. Keterlibatan Pemakai Air

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 3,0

Rating 2016 : 3,0

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,0 : Melibatkan masyarakat sebagai pemakai air untuk memberikan umpan balik terhadap pelayanan dalam menggunakan air.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah berusaha memberikan informasi terkait penggunaan air

1. Telah terbentuk Tim Rekomendasi Teknis (Rekomtek).
2. Terdapat kegiatan surat menyurat tentang permintaan izin pemanfaatan air.
3. Melaksanakan koordinasi dengan para pemakai air (masyarakat, industri, petani, dll) melalui kegiatan TKPSDA.
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi studi seperti kegiatan PKM pada paket setiap pekerjaan konsultan perencanaan.
5. Memberikan informasi kepada stakeholders terkait penanganan bencana alam seperti bencana banjir yang kemudia di sosialisasikan ke masyarakat dan dinas/instansi terkait.

II/2. Umpan Balik Pengguna Air

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 3,0

Rating 2016 : 3,0

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,0 : Para pengguna air didorong untuk menyampaikan umpan balik, melalui survei, quizioner dan alat ukur lainnya. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk mengetahui bentuk kecenderungan.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah berusaha memberikan informasi terkait umpan balik pengguna air

1. Terdapat komunikasi insidentil sesuai dengan situasi dan kondisi serta toleransi terhadap Stakeholder/instansi/pengguna terkait seperti surat menyurat pemberitahuan ada bencana, permintaan studi, survei lokasi, perbaikan kerusakan, bahan banjir, dll dari stakeholder.
2. Memberikan informasi bencana.
3. Secara rutin melaksanakan survei inspeksi sungai, pantai, jaringan irigasi, saluran air baku dan danau.
4. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

II/3. Kondisi Lingkungan

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 2,5

Rating 2016 : 3,0

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 2,5 : Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah melaksanakan kegiatan peningkatan kondisi lingkungan dengan pelaksanaan operasi dan pelaksanaan serta melakukan penyelidikan internal oleh PPNS terhadap pelanggaran hukum pada seluruh kegiatan.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah berusaha memberikan informasi terkait kondisi lingkungan

1. Melaksanakan UKL-UPL.
2. Melaksanakan pemantauan kualitas air secara rutin dan terjadwal.
3. Telah terbentuk PPNS pada tahun ...dan bertugas dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pemanfaatan sumber daya air dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
4. Kegiatan O & P rutin seperti operasi rutin prasarana pintu pengendali banjir air bengkulu, operasi rutin bangunan bendung,dll.
5. Pemeliharaan pos hidrologi serta laporan inspeksi rutin pos hidrologi.
6. Melaksanakan Revitalisasi peralatan pos hidrologi.
7. Melaksanakan review rasionalisasi jaringan pos hidrologi.
8. Melaksanakan AMDAL dan Studi LARAP pada Jaringan Irigasi.

II/4. Konservasi Sumber Daya Air

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 3,0

Rating 2016 : 3,5

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,0 : Telah dilaksanakan perlindungan air, pelestarian air dan pengawetan air serta pelaksanaan pemantauan kualitas air dan kegiatan tindak lanjutnya.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah berusaha melaksanakan pelestarian air dan pengawetan air baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik.

1. Melaksanakan pemantauan kualitas air wilayah sungai secara rutin dan terjadwal.
2. Melaksanakan kegiatan GNKPA meliputi penghijauan dengan menanam 1000 pohon di sepadan danau nibung kabupaten mukomuko dan kegiatan lokakarya revitalisasi GNKPA di kabupaten mukomuko.

III. PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN

III/1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 3,5

Rating 2016 : 3,5

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,5 : Staf telah ditempatkan sesuai dengan bidang pendidikan dan kinerja dan pengembangan SDM terus dilakukan untuk sasaran jangka panjang.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,5), bahwa yang berwenang menangani sumber daya manusia di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Untuk mendapatkan kualitas kinerja SDM yang bagus maka dibutuhkan dukungan dari semua pihak terkait.

1. Pengiriman Pegawai untuk mengikuti diklat dan bimtek secara rutin.
2. Memberikan kesempatan dan izin kepada pegawai untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Terdapat database kepegawaian.
4. Melaksanakan pelatihan dan penilaian sistem kinerja pegawai.
5. Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jabatan fungsional.

III/2. Pengembangan Teknik dan Pengelolaan Aset

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 2,5

Rating 2016 : 3,0

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,0 : Badan pengelola sumber daya air mempunyai rencana manajemen asset dan terus berusaha mencari dan membangun teknologi yang lebih canggih guna mendukung pencapaian misi badan pengelola sumber daya air.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), adalah hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII untuk mendukung

kegiatan badan pengelola sumber daya air sebagai

1. Telah terdapat SK BMN sejak tahun 2007.
2. Melakukan pengelolaan aset irigasi secara rutin setiap tahun.
3. Melaksanakan inspeksi sungai dan danau.
4. Melaksanakan kegiatan audit teknis kinerja irigasi, audit teknis bangunan pengaman pantai, audit teknis bangunan pengaman banjir, audit teknis air kinerja air baku dan audit teknis danau dalam rangka melakukan kajian analisa pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana.
5. Melaksanakan monitoring banjir.
6. penyusunan database asset SDA wilayah sungai teramang muar dan wilayah sungai nasal padang guci dalam skala mikro.

III/3. Pengembangan Badan Pengelola Sumber Daya Air

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 3,0

Rating 2016 : 3,0

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,0 : Balai Wilayah Sungai Sumatera VII melakukan dokumentasi terhadap prosedur operasional yang telah dilaksanakan dan melaksanakan pelatihan bagi staf yang sesuai dengan pelaksanaan prosedur. Beberapa umpan balik untuk perbaikan telah diterima namun belum sepenuhnya diterapkan untuk perbaikan.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), bahwa standar operasional prosedur telah dilaksanakan dokumentasinya dengan baik dan hal-hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan pengembangan badan pengelola sumber daya air yang maksimal sebagai berikut

1. Melaksanakan pelatihan / bimbingan teknis bagi petugas OP.
2. Monitoring kekeringan dilaksanakan namun belum ada SOP.
3. Melakukan koordinasi terhadap penanggulangan bencana banjir dan sistem penanganan namun belum ada SOP.
4. Melakukan Self Assessment setiap tahunnya, sehingga ada perbaikan berkelanjutan.
5. Pompa Banjir belum mempunyai SOP.
6. Melaksanakan pelatihan dalam rangka operasional seperti pelatihan pengamat hidrologi.

IV. TATA KELOLA USAHA INTERNAL

IV/1. Perencanaan tata laksana di dalam badan pengelola sumber daya air

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 3,5

Rating 2016 : 3,5

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,5 : Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah membuat rencana strategis hingga tahun 2019 dan para pimpinan serta staf telah melaksanakan rencana strategis tersebut sebagai bahan untuk membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang serta mengukur kinerja antara dokumen penetapan kinerja dengan rencana strategis yang telah dibuat.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,5), bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII berusaha mencapai visi dan misi secara keseluruhan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat Rencana Strategis (Renstra) 2009 - 2014.
2. Membuat Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019.
3. Telah ditandatangani Dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016 oleh Dirjen SDA.
4. Rencana pengelolaan SDA WS Teramang Muar telah disepakati oleh TKPSDA WS Teramang Muar dan untuk WS Nasal Padang Guci karena TKPSDA WS Nasal Padang Gucinya belum terbentuk telah disetujui oleh Gubernur dan kedua dokumen rencana PSDA tersebut dalam tahap pengesahan Menteri.
5. Implementasi Renstra masuk dalam anggaran DIPA Balai Wilayah Sungai Sumatera VII setiap tahunnya.
6. Review Pola Pengelolaan SDA WS Teramang Muar dan Nasal Padang guci akan dilaksanakan pada tahun 2018.

IV/2. Pendayagunaan SDA, Alokasi Air, Rekomtek/Perijinan dan Kekeringan

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 3,0

Rating 2016 : 3,5

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,5 : Tanggungjawab untuk pendayagunaan SDA, Alokasi Air, Manajemen kekeringan dan atau rekomendasi teknis telah dilaksanakan melalui wadah koordinasi tingkat satuan wilayah sungai yang melibatkan berbagai instansi berbeda dan para pemilik

c. **Hasil Analisa Rating**

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,5), Balai Wilayah Sungai Sumatera VII memiliki kewenangan daerah irigasi untuk areal di atas 3.000 Ha, yang meliputi 6 DI yaitu DI Air Manjuto, DI Air Lais, DI Air Ketahun, DI Air Seluma, DI Air Alas dan DI Air Nipis Seginim.

1. Melaksanakan penyusunan neraca air wilayah sungai teramang muar dan ws nasal padang guci.
2. Melaksanakan Monitoring Kekeringan.
3. Melaksanakan kegiatan Rekomtek.
4. Sebagai Badan pengelola SDA yang bertugas memberikan rekomentasi teknis/ perizinan dalam pemanfaatan air di WS Teramang Muar dan WS Nasal Padang Guci.
5. Rapat koordinasi kesepakatan alokasi air.
6. Dalam pola pengelolaan SDA WS Teramang Muar dan WS Nasal Padang Guci telah direncanakan skenario neraca air dengan infrastruktur yang dibangun.

IV/3. **Pengendalian Daya Rusak Air**

a. **Hasil Penilaian Sendiri**

Rating 2015 : 3,0

Rating 2016 : 3,0

Target 2020 : 3,5

b. **Kriteria Rating**

Rating 3,0 : Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah melibatkan masyarakat dalam upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air dengan program pemberdayaan masyarakat namun belum dilaksanakan sepenuhnya.

c. **Hasil Analisa Rating**

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah mensosialisasikan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat sekitar, yang meliputi

1. Upaya Pencegahan
 - Pembangunan bangunan pengendali banjir.
 - Pembangunan bangunan pengaman pantai.
 - Pembangunan sarana prasarana danau.
 - Penyeimbangan kegiatan di hulu dan di hilir wilayah sungai.
 - pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA.
2. Upaya Menanggulangi
 - Mitigasi bencana sebagai contoh yang telah dilaksanakan adalah Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Alam Tanah Longsor IKK Sindang Kelingi - Binduriang - Padang Ulak Tanding, Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, serta Penanganan Darurat Abrasi Pantai Punggur - Air Dikit Kabupaten Mukomuko.

3. Upaya Memulihkan Kerusakan Kualitas Lingkungan
 - Melakukan rehabilitasi penanaman 1000 pohon di sekitar danau, yang baru-baru ini dilaksanakan yaitu di danau denam tak sudah.
 - Mengajak masyarakat untuk kembali menjadikan lahan yang alih fungsi menjadi kebun sawit menjadi persawahan kembali. dan ini telah dilaksanakan sedikit demi sedikit oleh masyarakat setelah terbangunnya saluran atau jaringan irigasi tersier.

IV/4. Pengelolaan Data

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 2,5

Rating 2016 : 3,0

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,0 : Pemutakhiran data telah mulai dilaksanakan pada tahun 2015 namun baru dilaksanakan pada 1 (satu) DI yang kemudian pada tahun 2016 belum dilaksanakan secara konsisten. Media pengelolaan data seperti website juga telah dilaksanakan pada akhir 2016 dan masih dalam tahap persiapan penggunaannya sehingga pengelolaan data dan informasi belum efektif dan efisien. Hidrologi telah mendapatkan ISO.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), bahwa Balai Balai Wilayah Sungai Sumatera VII belum sepenuhnya menerapkan sistem pengelolaan informasi sebagaimana di atur di dalam UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat belum bisa mengakses data-data dengan mudah karena belum adanya media informasi seperti website untuk mengakses data-data tersebut. Namun demikian Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah melakukan hal-hal yang mendukung pengelolaan data, sebagai berikut:

1. Data Hidrologi (debit air, curah hujan, TMA) telah mendapatkan sertifikasi ISO pada tahun 2014 ISO 9001 : 2008 dengan nomor sertifikat QMS40851
2. Data Inspeksi Sungai dan Danau.
3. Data Audit Kinerja Irigasi, Audit kinerja bangunan pengaman pantai, audit kinerja bangunan pengendali banjir, audit kinerja air baku dan audit kinerja danau.
4. telah dibuatnya website Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dan sedang tahap finishing.
5. Data kekeringan dan banjir.
6. Data infrastruktur sarana prasarana SDA.
7. Rencana pembangunan integrated database (bank data micro) dan sistem GIS pada tahun 2017.

V. KEUANGAN

V/1. Efisiensi Keuangan

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 3,0

Rating 2016 : 3,0

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 3,0 : Telah melaksanakan koordinasi terpadu dalam membuat rencana teknis dan keuangan untuk mencapai kinerja terbaik.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), Balai Wilayah Sungai Sumatera VII melakukan pengelolaan keuangan yang efisien untuk meningkatkan kinerjanya dan hal-hal yang telah dilakukan adalah

1. Penyusunan DIPA, RKA-K/L, LAKIP, SAI, PBMN, POK, PK.
2. Monitoring dan evaluasi keuangan melalui e-Monitoring.
3. Sistem pelelangan umum dengan menggunakan e-procurement.

V/2. Pemulihan Biaya

a. Hasil Penilaian Sendiri

Rating 2015 : 2,0

Rating 2016 : 2,0

Target 2020 : 3,5

b. Kriteria Rating

Rating 2,0 : Badan pengelola memperoleh biaya operasional dan pemeliharaan hanya dari pemerintah sedangkan ada pengguna air yang teridentifikasi mampu untuk dilakukan pemungutan biaya.

c. Hasil Analisa Rating

Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 2,0), Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah melaksanakan Fasilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak - Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PNBP-BPJSDA namun belum melaksanakan kegiatan tersebut sehingga sebagai badan pengelola untuk biaya operasional.

ACTION PLAN TAHUN 2016 - 2020

No.	BIDANG KERJA KRITIS/ INDIKATOR	KEGIATAN	PROGRAM TAHUNAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	MISI						
	Status Badan Pengelola	Membahas dan mensosialisasikan Tupoksi dan tanggung jawab masing - masing unit					
		Menyelenggarakan rapat internal sekurang - kurangnya 12 kali per tahun					
		Inventarisasi permasalahan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi triwulanan					
		Melaksanakan konsultasi/dialog antara stakeholder, wadah koordinasi, dan lembaga pengelola SDA untuk mengakomodir pendapat stakeholder dan/atau membahas rencana pengelolaan SDA.					
		Secara konsisten menetapkan QA atau sistem penjaminan mutu					
		Menyebarkan dan menggunakan hasil - hasil rapat eksternal, internal, dan TKPSDA sebagai bahan perencanaan pengelolaan sumber daya air yang terpadu.					
	Tatakelola Sumber Daya Air	Melaksanakan pemberdayaan P3A					
		Sinkronisasi antara data pendukung aset tanah dengan aplikasi simak BMN					
		Melaksanakan peninjauan kembali terhadap pola pengelolaan SDA yang telah tersusun dan ditetapkan					
		Melaksanakan sosialisasi Pola dan Regulasi Pengelolaan SDA kepada para stakeholder					
		Melaksanakan GNKPA secara berkesinambungan					

		Mengakomodasi usulan / rekomendasi dari stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan PSDA					
		Penertiban aset-aset tanah yang dimanfaatkan secara ilegal oleh umum					
		Menyelenggarakan rapat eksternal sekurang - kurang 4 kali per tahun					
		Meninjau kembali Renstra (RPJM) sesuai dengan pola, rencana pengelolaan, rekomendasi stakeholder, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penajaman program dan kegiatan.					
		Peningkatan koordinasi antar kelembagaan pengelola SDA (Koordinasi Ketatalaksanaan)					
2.	PEMILIK KEPENTINGAN						
	Keterlibatan Pemakai Air	Pemberdayaan kelompok tani dan masyarakat untuk penghijauan					
		Serangkaian kegiatan dalam rangka peningkatan komunikasi masyarakat guna merespon dan menindaklanjuti harapan masyarakat terkait pengelolaan SDA, serta pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, O&P, serta Monev Pengelolaan SDA.					
		Terselenggaranya tugas dan fungsi sekretariat TKPSDA yang berkualitas dalam memfasilitasi kegiatan TK-PSDA (pertemuan yang terjadwal, menyiapkan ringkasan pembahasan masalah dan pemecahannya, dan memformulasi hasil pertemuan TK-PSDA terhadap masalah dan pemecahannya).					
		Usulan TKPSDA WS diformulasikan / direalisasikan dalam perencanaan strategis (Renstra) dan DIPA.					
		Memasang papan informasi bendung, papan larangan di beberapa titik sungai dan di jaringan irigasi					

	Umpan Balik Pemakai Air	Melaksanakan survey secara rutin dan terjadwal terhadap masyarakat pengguna air untuk mengetahui tingkat kepuasannya dalam pelaksanaan PSDA dengan mencatat keluhan, usulan, dan pendapatnya.					
		Menyusun panduan survey pertemuan dialogis dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan survey rutin.					
		Kerjasama saling menguntungkan dalam pemeliharaan sungai dengan para penambang galian golongan C					
		Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan dilakukan secara rutin					
	Kondisi Lingkungan	Melaksanakan kajian audit lingkungan					
		Melakukan tindak lanjut atas kajian / audit lingkungan					
		Melaksanakan review hasil kajian / audit lingkungan yang telah dilaksanakan sendiri maupun instansi lain					
		Melanjutkan dan mengembangkan Monev kualitas air dan bencana di Wilayah Sungai					
		Mengikutsertakan masyarakat pengguna dalam pelaksanaan penatausahaan lingkungan					
		Penyidikan terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan oleh PPNS					
	Konservasi Sumber Daya Air (SDA)	Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pelestarian SDA melalui pembangunan dan rehabilitasi embung					
		Melaksanakan pemantauan kualitas air pada beberapa sumber air secara bertahap					
		Melaksanakan pemantauan kualitas air pada seluruh sumber air yang menjadi kewenangan RBO					

		Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pelestarian SDA dan pemantauan kualitas air					
		Merumuskan kegiatan tindak lanjut dari hasil pemantauan kualitas air					
3.	PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN						
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyempurnaan / Updating Data Base Sumber Daya Manusia (Pegawai)					
		Serangkaian kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaksana pengelolaan SDA (workshop & pelatihan).					
		Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai secara rutin guna menanamkan pemahaman bahwa SDM merupakan aset sehingga dapat memotivasi untuk selalu mengembangkan diri / kemampuan.					
		Melaksanakan pengamatan dan penilaian kinerja pegawai					
		Menyediakan dan mengelola Sistem Informasi Kepegawaian yang handal dan up to date					
		Menyusun perencanaan karier dan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai					
	Pengembangan Teknik	Mengelola Manajemen Aset (Inventarisasi prasarana SDA, perencanaan penggantian dan pemeliharaan aset, perencanaan pengoperasian aset, Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)					
		Melaksanakan operasional, pemeliharaan, pengembangan dan pemberdayaan aset					
		Melaksanakan penyusunan analisis perhitungan nilai manfaat aset guna tercapainya rencana biaya operasional yang efisien dan efektif					

		Pengadaan alat AWL Logger di beberapa sungai dan wilayah kerja BWS Sumatera VII untuk mendapatkan data tinggi muka air secara otomatis dalam jangka waktu tertentu					
		Pengembangan sistem real time telemetri					
	Pengembangan Badan Pengelola Sumber Daya Air	Menyusun dan menetapkan SOP disemua unit/seksi					
		Menyediakan petugas yang terlatih untuk menangani pendokumentasian prosedur operasional di segala bidang kegiatan Balai.					
		Mengikuti pensertifikatan ISO untuk BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu					
		Melaksanakan sosialisasi penerapan dan pelaksanaan SOP kepada seluruh personil secara kontinyu guna tersedianya staf yang terlatih dalam pemakaian prosedur operasional.					
		Melaksanakan penjarangan umpan balik dari staf tentang pelaksanaan prosedur / SOP yang telah disusun/ditetapkan.					
		Manajemen dan audit teknis oleh tim internal bisa dilakukan secara rutin					
4.	TATA LAKSANA USAHA INTERNAL						
	Perencanaan Tata Kelola Dalam Badan Pengelola SDA	Dokumen rencana PSDA telah dibahas dalam PKM/TKPSDA dan dalam proses penetapan WS Teramang Muar					
		Melaksanakan studi kelayakan, perencanaan strategis pembangunan prasarana SDA, dan perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan					
		Menyiapkan SOP perencanaan prasarana SDA					
		Menyiapkan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan OP sesuai rencana Pengelolaan SDA.					

		Melaksanakan perencanaan yang didasarkan dari hasil kajian manajemen aset serta pencapaian visi dan misi Pengelolaan SDA.					
		Membuat laporan Lakip setiap tahunnya					
		ME hasil perencanaan untuk ditindak lanjuti					
		Penyelesaian pembentukan TKPSDA sebagai wadah koordinasi pemilik kepentingan yang nantinya terlibat di dalam penyusunan rencana pengelolaan strategis BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu termasuk masalah alokasi air					
		Meningkatkan monitoring dan evaluasi alokasi air dan kekeringan pada wilayah sungai beserta tindak lanjutnya					
		Melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka penggunaan air secara efisien dengan sistem alokasi terpadu yang telah disepakati dan upaya - upaya agar ketersediaan air pada musim kemarau dapat tercukupi.					
		Membahas pendayagunaan SDA, alokasi air, kekeringan, dan proses perijinan dalam wadah koordinasi PSDA untuk ditetapkan					
		Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan lembaga dan stakeholder terkait PSDA guna membahas matriks operasional serta saling bertukar informasi					
		Melakukan perjanjian kerjasama dengan KSO/stakeholder tentang alokasi air.					
		Penyusunan laporan alokasi air					
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan kejadian bencana					

		Tersedianya pedoman penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air					
		Melakukan pembinaan/pelatihan kepada pegawai sebagai petugas pengendalian bencana akibat daya rusak air guna peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sesuai prosedur/pedoman/SOP					
		Peningkatan SDM/Pelatihan staf di bidang sistem informaso					
		Pengembangan software untuk data hidrologi, kualitas air, alokasi air dan data teknik lainnya					
		menyediakan ruang dan peralatan untuk analisa data					
		Mengembangkan sistem real time telemetri					
		membuat Website BWS Sumatera VII					
5.	KEUANGAN						
		Penyempurnaan sistem pelelangan umum dengan menggunakan e-procurement plus					
		Pengoptimalan penggunaan software SAI, E-mon dan SABMN					
		Adanya sistem informasi manajemen yang dapat diakses oleh publik misalnya website BWS Sumatera VII					
		Mengembangkan kerjasama terpadu antara bidang keuangan dan perencanaan teknis					
		membuat database pemakai air yang mempunyai izin pengambilan air					
		melakukan audit setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku					
		Persiapan BWS Sumatera VII untuk menjadi Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk merapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)					
		setelah menerapkan pengelolaan badan layanan umum (BLU), memiliki kewenangan untuk memungut biaya manajemen dari pengguna air					

Pengertian-Pengertian

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air.
3. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air.
4. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
5. Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km².
6. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
8. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
9. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
10. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
11. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
12. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
14. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
15. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
16. River Basin Organization (RBO) adalah organisasi pengelola sumber daya air wilayah sungai yaitu : Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA), dan Perum Jasa Tirta (PJT) atau dengan nama lain, termasuk unit-unit yang melekat didalamnya
17. Performance adalah kinerja suatu organisasi, dalam hal ini kinerja RBO (BBWS/BWS/BPSDA/PJT).
18. Benchmarking adalah “patok” atau titik ukur saat ini untuk mewujudkan perbaikan ke-depan secara terus menerus melalui perbandingan dengan nilai dan standar (internal maupun eksternal) yang relevan dapat tercapai
19. RBO performance benchmarking adalah pengukuran kinerja RBO dengan menggunakan “tools”/alat ukur yang dikeluarkan oleh NARBO yang sudah dimodifikasi untuk menilai kinerja BBWS/BWS/BPSDA/PJT berdasarkan 5 elemen pokok, 15 indikator dan parameter bernilai dari 0 - 4.
20. NARBO adalah Networks of Asian River Basin Organization merupakan jaringan komunikasi diantara RBO di kawasan Asia.

21. Self assessment adalah melakukan pengukuran kinerja RBO (BBWS/BWS/BPSDA/PJT) dilakukan oleh pimpinan dan staf RBO (BBWS/BWS/BPSDA/PJT) sendiri dengan membandingkan terhadap norma, standar, pedoman dan/atau kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan menjamin adanya perbaikan berlanjut kinerja RBO.
22. Peer review adalah kegiatan kaji ulang yang dilakukan oleh mitra sejawat (“peer”) untuk mengukur tingkat obyektivitas dari hasil penilaian Tim Self Assessment atas kinerja RBO(BBWS/BWS/BPSDA/PJT).
23. Kinerja RBO adalah gambaran hasil kerja atau tingkat prestasi RBO (BBWS/BWS/BPSDA/PJT) yang menjadi kenyataan dan dinyatakan dalam penilaian angka tertentu berdasarkan tool NARBO.
Balance Scorecard adalah penilaian secara seimbang terhadap 5 elemen pokok yaitu: 1.misi, 2.pemilik kepentingan, 3.pembelajaran dan pertumbuhan, 4.tata kelola usaha internal, dan 5.keuangan.

BAB

4



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. BWS Sumatera VII sudah melaksanakan kegiatan sejak tahun 2007 menurut Persetujuan Menteri Perencanaan Nomor : B/1616/M.PAN/11/2006 tanggal 28 Juni 2006 Perihal Pembentukan UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 34/PRT/M/2015 tanggal 1 Juli 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BWS Sumatera VII merupakan Balai Tipe A yang terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Program dan Perencanaan Umum
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 - d. Seksi Pelaksanaan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BWS Sumatera VII didukung 321 orang pegawai yang terdiri dari 167 orang PNS Pusat, 55 orang PNS Daerah yang diperbantukan dan 99 Orang Non PNS.
3. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pembagian Wilayah Sungai, BWS Sumatera VII untuk mengelola WS Teramang Muar dan Nasal Padang-Guci.
4. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan SDA secara terpadu, pada tahun 2011 untuk pertama kalinya BWS Sumatera VII melaksanakan SA dengan menggunakan 14 Indikator yang dikeluarkan oleh NARBO dan terus berlanjut setiap tahunnya.
5. Pada tahun ini, tahun 2016 dilaksanakan kembali review terhadap skor SA yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan menggunakan 15 Indikator yang dikeluarkan oleh NARBO (terdapat penambahan Indikator baru). Review ini menghasilkan peningkatan nilai menjadi 43,5 (dari nilai tahun sebelumnya 41.5). Target yang ingin dicapai di tahun 2021 adalah 53 dari nilai maksimum 60.
6. Untuk mencapai target nilai 53 pada tahun 2021, langkah-langkah yang akan disiapkan BWS Sumatera VII mencakup kegiatan fisik dan non fisik .
7. Kegiatan fisik yang akan dilaksanakan antara lain: melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur SDA, rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur SDA, serta kegiatan OP sarana dan prasarana SDA.
8. Kegiatan Non fisik yang akan dilaksanakan antara lain : penguatan organisasi (Capacity Building), implementasi semua SOP dengan mantap dan benar, meningkatkan koordinasi dengan para stakeholders, melibatkan para pemakai air dalam segala kegiatan PSDA, melaksanakan SISDA secara lebih baik dan efisien, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intensif dan melaksanakan kegiatan ME terhadap semua kegiatan BWS Sumatera VII.

4.2 Kendala-Kendala

Pengelolaan SDA di Indonesia menghadapi persoalan yang sangat kompleks dengan melibatkan banyak pihak. Berikut ini adalah kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan SA RBO Performance Benchmarking di BWS Sumatera VII Tahun 2016 adalah :

1. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki waktu sepenuhnya untuk melaksanakan SA karena masing-masing anggota tim SA memiliki prioritas tugas rutinnnya yang juga harus dilaksanakan,
2. Kurangnya perhatian dari para Kasatker dan PPK di lingkungan BWS Sumatera VII tentang pentingnya kegiatan yang dilaksanakan Tim SA,
3. Kurangnya koordinasi antar pemegang kewenangan pada BWS Sumatera VII dalam mendiskusikan hal yang terkait dengan SA,
4. Selama menjalankan kegiatan, perhatian terhadap penyimpanan data dan dokumen – dokumen penting (tertib pengarsipan) guna mendukung pelaksanaan SA dirasa masih sangat kurang, sehingga penilaian yang ada cenderung kurang tepat,
5. Belum ada kegiatan untuk berbagi pengalaman antar BWS dalam hal pelaksanaan SA.

4.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang dikemukakan oleh Tim SA RBO Performance Benchmarking Tahun 2016 untuk peningkatan kinerja BWS Sumatera VII antara lain sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan semua kegiatan di BWS Sumatera VII melalui sarana pelatihan, dimana pengajarnya adalah profesional maupun Jabfung di bidangnya,
2. Menyediakan anggaran khusus terhadap peningkatan sumber daya manusia di BWS Sumatera VII seperti pembuatan buku, upgrade buku perpustakaan dan maintenance internet,
3. Membuat ruangan khusus bank data yang berfungsi sebagai pusat informasi data di BWS Sumatera VII,
4. Membuat MOU dan mengadakan kerjasama dengan dinas - dinas atau instansi yang memiliki bidang pekerjaan yang relatif sama agar tercipta keselarasan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dapat saling melengkapi satu sama lain,
5. Sharing pengalaman dengan Balai/Balai Besar Wilayah Sungai lainnya sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja di BWS Sumatera VII,
6. Perlu adanya komitmen bersama antara pejabat dan staf BWS Sumatera VII untuk meningkatkan SISDA,
7. Memperbanyak kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana lebih efektif dan efisien begitu pula dalam hal pemeliharaan,
8. Mengoptimalkan penggunaan alat-alat dan fasilitas yang dimiliki oleh BWS Sumatera VII,
9. Memberikan kekuatan hukum yang nyata terhadap peraturan-peraturan baru yang dinilai penting untuk menunjang pembuatan keputusan dan pelaksanaan kegiatan,
10. Diperlukannya Tim SA dimana anggota-anggotanya mampu memberikan kontribusi baik berupa pengetahuan maupun waktu serta komitmen tinggi/fokus dalam memberikan penilaian dan pengumpulan data terhadap kinerja balai terkait indikator-indikator penilaian RBO,
11. Melanjutkan kerjasama dengan instansi terkait dengan melibatkan mereka lebih jauh dalam penyusunan program,
12. Perlunya kerjasama, komitmen, kepedulian serta tanggung jawab yang sama antara pimpinan, staf serta semua pihak terhadap PSDA di BWS Sumatera VII,

13. Kemauan untuk berpartisipasi secara aktif dalam hal penyerahan data oleh masing-masing bagian di BWS Sumatera VII juga sangat diperlukan,
14. Membangun dan menerapkan suatu kerangka kebijakan terpadu dalam pengelolaan SDA yang berdasarkan pertimbangan aspek kualitas, kuantitas, ruang dan waktu,
15. Meneruskan dan mengoptimalkan penggunaan perangkat bantuan teknologi sistem informasi dalam proses pembuatan keputusan, pengelolaan keuangan, mekanisme pelayanan bagi pelanggan,
16. Mempersiapkan dan menerapkan suatu rancangan pengelolaan aset SDA yang efektif dan efisien termasuk program rehabilitasi,
17. Mempersiapkan SOP dalam bentuk dokumen resmi yang sah untuk menunjang proses pembuatan keputusan.





Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
Jl. Batanghari No. 25 Kecamatan Ratu Agung Bengkulu
Tlp. 0736 341405, Fax. 0736 341405

© 2017, COPYRIGHT SISDA BWS SUMATERA VII